

2026



INSPEKTORAT
KABUPATEN WONOGIRI

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN ANGGARAN 2025

INSPEKTORAT KABUPATEN WONOGIRI

Jalan Pemuda I / 55 Wonogiri, Jawa Tengah
Kode Pos 57612
Telepon (0273) 321138 Faksimile (0273) 321138
Laman www.inspektorat.wonogirikab.go.id
Pos-el inspektorat@wonogirikab.go.id

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
KATA PENGANTAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3 Permasalahan Utama yang Dihadapi/Isu Strategis	4
1.4 Keadaan Pegawai	7
1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana	9
1.6 Landasan Hukum	10
1.5 Sistematika	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis	13
2.2 Perencanaan Kinerja	18
2.3 Perjanjian Kinerja	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	20
3.2 Analisis Capaian Kinerja	21
3.3 Realisasi Anggaran	78
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	80
4.2 Rekomendasi	84
LAMPIRAN	
1. Rencana Kinerja pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025	
2. Perjanjian Kinerja pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025	
3. Perjanjian Kinerja Perubahan pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025	

4. Rencana Aksi Agen Perubahan Tahun 2025
5. Tabel Pengolahan Survey Kepuasan Masyarakat pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025
6. Laporan Realisasi Kinerja dan Penggunaan Anggaran Akhir Tahun Anggaran 2025 pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Pegawai Berdasarkan Gender	8
Tabel 2.1	Indikator Kinerja dan Target pada Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Wonogiri sesuai Renstra Tahun 2021-2026	16
Tabel 2.2	Indikator Kinerja dan Target pada Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Wonogiri Sesuai Lembar Pengendalian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Kabupaten Wonogiri Tahun 2024	17
Tabel 2.3	Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Tahun 2025	18
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Inspektur Kabupaten Wonogiri Tahun 2025	19
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025	22
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2025 Dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2022, 2023 dan 2024	34
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 Dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2022, 2023 dan 2024	42
Tabel 3.4	Capaian Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Wonogiri s.d Tahun 2025 Dibandingkan dengan Target Akhir Tahun 2026	51
Tabel 3.5	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sampai Dengan Tahun 2025 Dibandingkan Dengan Target Akhir Tahun 2026	54
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi Indikator Tujuan dan Sasaran Tahun 2025 dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten	61
Tabel 3.7	Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2025 serta Alternatif Solusinya	69
Tabel 3.8	Capaian Kinerja dan Capaian Keuangan per Sasaran di Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025	71
Tabel 3.9	Tingkat Efektivitas dan Efisiensi per Sasaran Tahun 2025	72
Tabel 3.10	Program/Kegiatan Penunjang Tujuan dan Sasaran Tahun 2025 di Inspektorat Kabupaten Wonogiri	74
Tabel 3.11	Capaian Kinerja Keuangan Inspektorat Tahun 2025	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Wonogiri	2
Gambar 1.2	Jumlah SDM Inspektorat Berdasarkan Pendidikan	8
Gambar 1.3	Jumlah SDM Inspektorat Berdasarkan Golongan	8
Gambar 1.4	Jumlah SDM Inspektorat Berdasarkan Jabatan	9
Gambar 1.5	Jumlah SDM Inspektorat Berdasarkan Masa Kerja	9
Gambar 3.1	Hasil Penilaian Evaluasi AKIP Inspektorat TA. 2024	27
Gambar 3.2	Hasil Rekap IP ASN Inspektorat Tahun 2024	30
Gambar 3.3	<i>Digital Library</i> pada Website Inspektorat Kabupaten Wonogiri	32
Gambar 3.4	Hasil Penilaian per Unsur Pelayanan IKM Inspektorat Tahun 2025	33
Gambar 3.5	Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 dengan Tahun 2022, 2023 dan 2024	35

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Wonogiri, bahwa Inspektorat Kabupaten Wonogiri mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcome. Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Inspektorat Kabupaten Wonogiri melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Strategis 2021-2026 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Wonogiri, 19 Februari 2026

Inspektur Kabupaten Wonogiri



Mardianto, S.E
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19710124 199903 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), diperlukan sistem pengawasan dan evaluasi yang efektif terhadap kinerja instansi pemerintah. Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap instansi pemerintah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) atas terselenggaranya kinerja instansi pemerintah yang optimal, sekaligus sebagai mekanisme peringatan dini (*early warning system*) dalam mendeteksi potensi penyimpangan, inefisiensi, dan permasalahan yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, kegiatan pengawasan juga berfungsi memberikan rekomendasi dan saran perbaikan atas berbagai aspek tata kelola, manajemen risiko, serta sistem pengendalian internal yang masih memerlukan peningkatan.

Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Wonogiri ini disusun berdasarkan hasil pelaksanaan pengawasan dan evaluasi yang telah dilakukan selama Tahun 2025. Laporan ini menjadi instrumen penting dalam mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat, capaian kinerja yang telah diraih, serta tingkat keberhasilan implementasi program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Melalui penyusunan laporan kinerja ini, diharapkan dapat terwujud peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan integritas dalam pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan di lingkungan Inspektorat Kabupaten Wonogiri. Laporan ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan acuan bagi Inspektur dalam pengambilan kebijakan strategis serta penetapan langkah-langkah perbaikan kinerja pada periode selanjutnya.

Dengan demikian, Inspektorat Kabupaten Wonogiri senantiasa

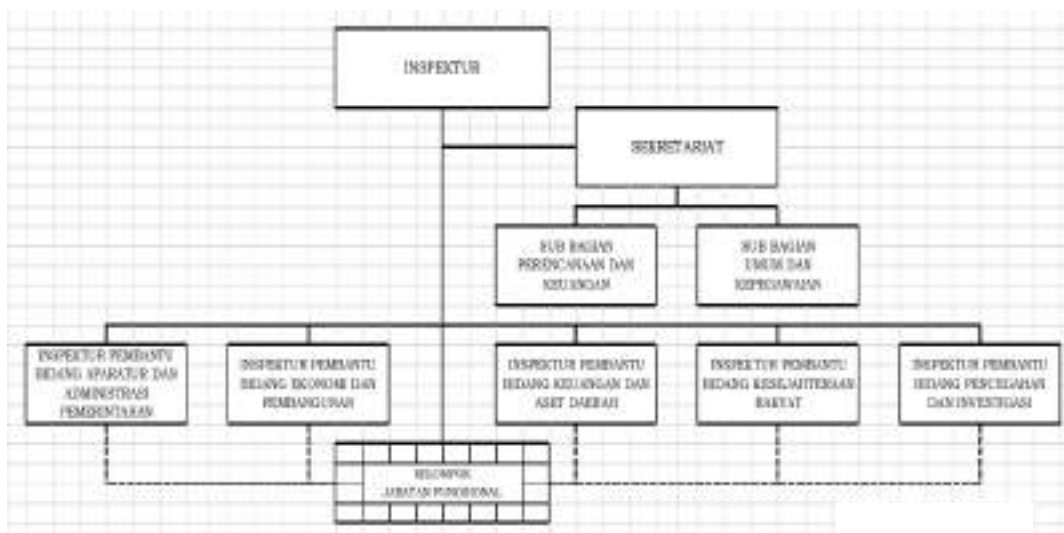
berkomitmen untuk mendukung terwujudnya birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada hasil melalui peningkatan kualitas pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 122 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat berikut kedudukan, tugas pokok dan fungsi dari Inspektorat Kabupaten Wonogiri :

1.2.1 Kedudukan

Inspektorat merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Inspektur dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan bagan susunan organisasi Inspektorat Kabupaten Wonogiri sebagai berikut :



Gambar 1.1

Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Wonogiri

1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat menyelenggarakan fungsi yang terdiri atas :

- a) perumusan kebijakan di bidang pengawasan dan pembinaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan

- kepada daerah;
- b) pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan dan pembinaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah;
 - c) pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - d) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
 - e) dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana pada huruf c terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian negara /daerah, dapat dilaksanakan tanpa menunggu penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
 - f) penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - g) pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - h) pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - i) pelaksanaan administrasi Inspektorat bidang pengawasan dan pembinaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah;
 - j) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Permasalahan Utama yang Dihadapi / Isu Strategis

Aspek strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah fokus pada peran dan tanggung jawab utama masing-masing Perangkat Daerah dalam mendukung visi dan misi pemerintah daerah serta mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang telah direncanakan sesuai tugas dan fungsi sektor yang ditangani. Berikut beberapa aspek strategis pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri :

1. Penguatan Pengawasan Internal

Inspektorat memiliki peran penting dalam memberikan keyakinan bahwa penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kabupaten Wonogiri berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, transparan, akuntabel, dan efektif. Penguatan fungsi pengawasan ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola

pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean governance*) dengan mendorong perbaikan GRC (*Governance, Risk, and Compliance*).

2. Peran dalam Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Inspektorat Kabupaten Wonogiri mengevaluasi dan memastikan kinerja dari masing-masing Perangkat Daerah melalui revidi, monitoring, evaluasi dan audit untuk memastikan pencapaian sasaran kinerja sesuai dengan yang ditetapkan dalam perencanaan pembangunan daerah. Akuntabilitas ini penting dalam mewujudkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah.

3. Peningkatan Efisiensi Penggunaan Anggaran Daerah

Dalam menjalankan tugas pengawasan, Inspektorat juga melakukan evaluasi atas efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah dalam memastikan bahwa anggaran digunakan secara bijaksana dan sesuai dengan prioritas pembangunan, sehingga memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Wonogiri.

4. Pendampingan dan Pengawasan terhadap Implementasi Program Pembangunan Daerah

Inspektorat juga berperan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program-program pembangunan di Kabupaten Wonogiri. Fungsi ini mencakup pengawasan terhadap proyek fisik maupun non-fisik yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan peruntukannya. Selain itu, Inspektorat juga memberikan pendampingan kepada OPD untuk memastikan program dilaksanakan sesuai prosedur.

5. Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Penguatan implementasi SPIP Terintegrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri menjadi salah satu fokus strategis Inspektorat. SPIP Terintegrasi yang efektif akan mendukung pencapaian tujuan pemerintah, pengamanan aset, penyediaan laporan keuangan yang dapat diandalkan, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

6. Pencegahan dan Penanganan Tindak Penyimpangan atau Korupsi

Dalam kerangka pencegahan korupsi, Inspektorat bertugas untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan di berbagai sektor. Selain melalui pengawasan rutin dan aktif dalam mendukung *Monitoring Center for*

Prevention (MCP) dan program pengendalian gratifikasi yang diselenggarakan oleh KPK-RI, Inspektorat juga melakukan investigasi apabila ditemukan dugaan adanya penyalahgunaan wewenang, penyimpangan anggaran, atau praktik korupsi. Fungsi ini sangat strategis dalam menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

Namun demikian, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Inspektorat Kabupaten Wonogiri masih menghadapi berbagai permasalahan utama yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja. Permasalahan tersebut antara lain :

1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang Belum Optimal

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Wonogiri adalah SDM yang ada belum optimal. Meskipun telah terjadi penambahan kuantitas SDM di Inspektorat Kabupaten Wonogiri khususnya Auditor dan PPUPD. Namun hal tersebut masih menjadi masalah utama karena SDM yang masih baru masih memerlukan pelatihan dan peningkatan kompetensi (belum dapat bekerja secara optimal). Selain itu, kekosongan fungsi evaluasi dan pelaporan di Sekretariat sehingga masih menjadi beban di bidang/tim terkait administrasi penyelesaian tindak lanjut hasil rekomendasi pengawasan.

2. Belum Optimalnya Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi

Implementasi SPIP Terintegrasi di sejumlah Perangkat Daerah di Kabupaten Wonogiri masih belum optimal. Perangkat Daerah sudah menerapkan prinsip-prinsip pengendalian intern yaitu identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan, namun masih terdapat kekurangan diantaranya dlm penilaian risiko, yaitu penentuan skor risiko dan rencana tindak pengendalian yang kurang efektif sehingga masih memunculkan potensi terjadinya kelemahan dalam pencapaian tujuan organisasi.

3. Rendahnya Kesadaran dan Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap Pengawasan Internal

Beberapa Perangkat Daerah di Kabupaten Wonogiri masih memandang proses audit dan pengawasan sebagai beban administrasi. Rendahnya

kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya pengawasan internal menyebabkan keterlambatan dalam penyampaian laporan, tidak lengkapnya data pendukung, adanya resistensi terhadap proses audit, rekomendasi berulang dan rendahnya pemenuhan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan. Ini dapat memperlambat pelaksanaan program pengawasan yang efektif.

4. Kendala Teknologi dan Sistem Informasi Pengawasan yang Terintegrasi
Pemanfaatan teknologi dalam sistem pengawasan masih belum optimal. Penggunaan sistem informasi manajemen pengawasan yang terintegrasi antara Perangkat Daerah dan Inspektorat masih menghadapi berbagai kendala, seperti infrastruktur teknologi yang belum optimal dan kurangnya SDM yang memahami teknologi tersebut. Ini mempengaruhi akurasi dan kecepatan pelaporan kinerja hasil pengawasan. Beberapa aplikasi yang mendukung kegiatan pengawasan seperti E-Sakip, Siswaskeudes dan SIMHP masih perlu dioptimalkan menyesuaikan kebutuhan pengawasan.
5. Respon Aktif terhadap Rekomendasi Hasil Pengawasan
Belum maksimalnya tingkat respon aktif dari Perangkat Desa dan beberapa Perangkat Daerah terhadap rekomendasi hasil pengawasan. Meskipun Inspektorat telah memberikan saran perbaikan dan rekomendasi pasca pengawasan, tidak semua Perangkat Desa dan sebagian Perangkat Daerah menindaklanjuti dengan respon yang cepat dan sesuai dengan yang diharapkan.

Penanganan permasalahan-permasalahan tersebut memerlukan langkah-langkah strategis, seperti :

1. usulan penambahan SDM terkait dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 51 Tahun 2023 yang belum memasukkan sub bagian analisis dan evaluasi sehingga terjadi kekosongan pada sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan dalam bagan organisasi pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri. Namun telah dilakukan langkah evaluasi atas hal tersebut dan diusulkan kepada Bupati Wonogiri dengan tembusan Kepala Bagian Organisasi melalui Surat Inspektur Kabupaten Wonogiri Nomor B/602/000.8.1/VI/2025, tanggal 23 Juni 2025 dengan melampirkan kajian atas kelembagaan pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri dan di bulan November 2025 baru ditetapkan Perbup SOTK baru dengan penambahan Sub Bagian

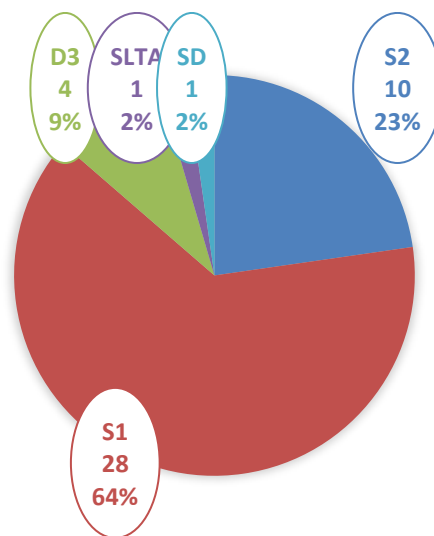
- Perencanaan dan Keuangan;
2. peningkatan kompetensi SDM;
 3. optimalisasi teknologi pengawasan; serta
 4. penguatan kerja sama dengan Perangkat Desa dan Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan rekomendasi hasil pengawasan.

Diharapkan dengan upaya-upaya tersebut, Inspektorat Kabupaten Wonogiri dapat menjalankan perannya secara lebih efektif dan memberikan kontribusi yang signifikan untuk mendukung sasaran daerah dalam terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel dan pelayanan publik yang prima.

1.4 KEADAAN PEGAWAI

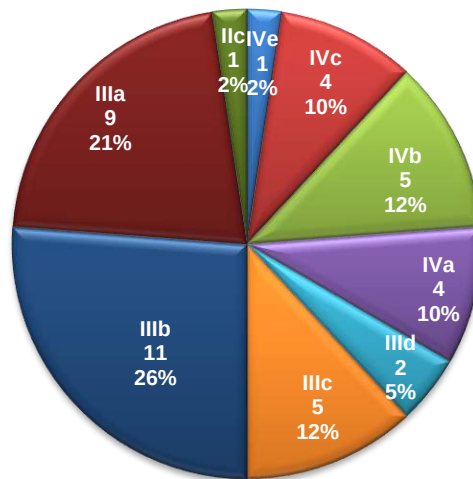
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tersebut, Inspektorat Kabupaten Wonogiri didukung oleh sumber daya manusia, dengan rincian sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pendidikan



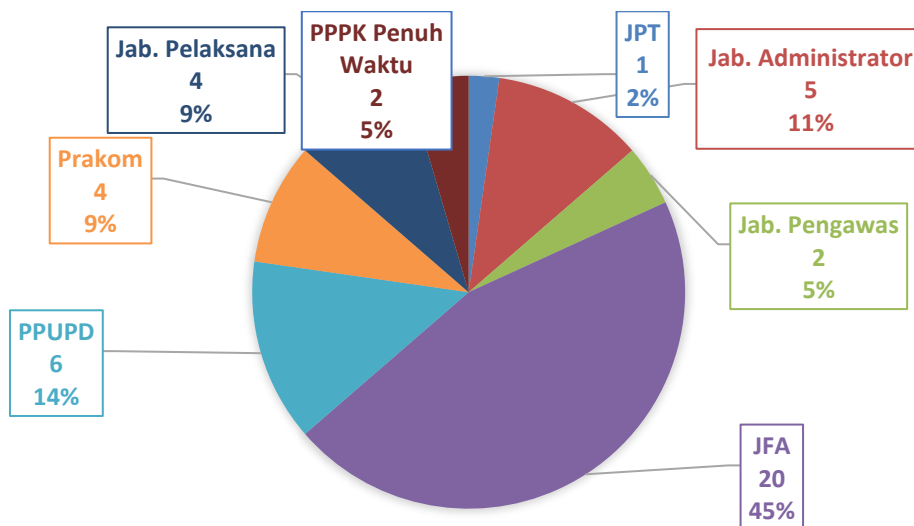
Gambar 1.2
Jumlah SDM Inspektorat Berdasarkan Pendidikan

2. Berdasarkan Golongan



Gambar 1.3
Jumlah SDM Inspektorat Berdasarkan Golongan

3. Berdasarkan Jabatan



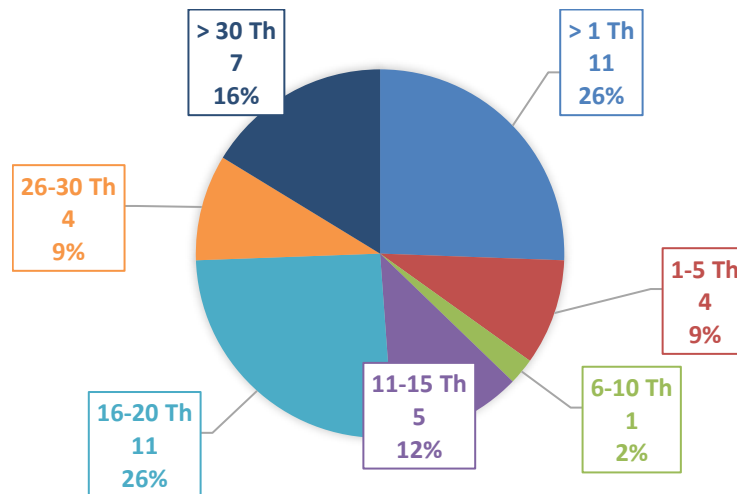
Gambar 1.4
Jumlah SDM Inspektorat Berdasarkan Jabatan

4. Berdasarkan Data Pilah Gender

Tabel 1.1
Data Pegawai Berdasarkan Gender

		DATA PILAH				TOTAL	%
		L	%	P	%		
1	Struktural	4	50	4	50	8	100
2	Auditor	8	40	12	60	20	100
3	PPUPD	4	67	2	33	6	100
4	Pelaksana	2	50	2	50	4	100
5	Pranata Komputer	1	25	3	75	4	100
6	PPPK	2	100	0	0	2	100

5. Berdasarkan Masa Kerja :



Gambar 1.5
Jumlah SDM Inspektorat Berdasarkan Masa Kerja

1.5 KEADAAN SARANA PRASARANA

Selain didukung oleh sumber daya manusia seperti yang telah diuraikan sebelumnya, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tersebut, Inspektorat Kabupaten Wonogiri juga didukung oleh sarana dan prasarana, dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanah seluas : 1.111 m²
2. Gedung seluas : 593 m²
3. Kendaraan
 - a. Kendaraan Roda 4 : 8 unit
 - b. Kendaraan Roda 2 : 5 unit
4. Lemari
 - a. Lemari Besi : 20 unit
 - b. Lemari Kayu : 23 unit
 - c. Lemari Sorok : 3 unit
5. Filling Cabinet : 8 unit
6. Rak Display : 1 unit
7. Komputer : 8 unit
8. Proyektor : 2 unit
9. Laptop/Notebook : 34 unit
10. Monitor : 8 unit
11. HP/Tablet : 2 unit

- 12. Kamera : 1 unit
- 13. Saluran Telepon : 1 unit
- 14. Ploter : 1 unit
- 15. Router : 4 unit
- 16. AC Ruangan : 14 unit
- 17. Mesin Ketik : 1 unit
- 18. Printer : 24 unit
- 19. Scanner : 7 unit
- 20. Sound System : 1 unit
- 21. Wireless Amplifier : 2 unit
- 22. Alat Pemadam Portable : 2 unit
- 23. Kipas Angin : 3 buah
- 24. Televisi : 1 buah
- 25. Kursi
 - a. Kursi Rapat : 100 unit
 - b. Kursi Kerja : 45 unit
- 26. Meja
 - a. Meja Kerja : 45 buah
 - b. Meja Kerja Eselon : 7 buah
 - c. Meja Rapat : 6 buah
 - d. Meja Kursi Tamu : 3 unit
 - e. Meja Komputer : 3 buah

1.6 LANDASAN HUKUM

1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 6);
3. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 65 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 67);

4. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 Nomor 32);
5. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 Nomor 36);
6. Peraturan Bupati Nomor 122 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 Nomor 122).

1.7 SISTEMATIKA

Sistematika penulisan LKjIP Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini menyajikan gambaran umum yang melatar belakangi dasar penyusunan LKjIP, Tugas dan Fungsi serta struktur organisasi Perangkat Daerah, Aspek Strategis dan Isu Strategis yang dihadapi didalam pelaksanaan pembangunan, dasar hukum dan sistematika penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini menyajikan uraian ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab ini menyajikan :

1. membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;
3. membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis;
4. membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar

nasional (jika ada);

5. analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada Bab ini menyajikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. Rencana Kinerja pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025
2. Perjanjian Kinerja pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025
3. Perjanjian Kinerja Perubahan pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025
4. Rencana Aksi Agen Perubahan Tahun 2025
5. Pengolahan Survey Kepuasan Masyarakat pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025
6. Laporan Realisasi Kinerja dan Penggunaan Anggaran Akhir Tahun Anggaran 2025 pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan komponen penting yang berfungsi sebagai pedoman bagi instansi pemerintah untuk menentukan arah, tujuan, serta prioritas yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan strategis ini mencakup identifikasi visi, misi, tujuan, sasaran, serta indikator kinerja utama yang terukur. Melalui perencanaan strategis yang baik, instansi pemerintah dapat memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan sejalan dengan kebijakan nasional, kebutuhan masyarakat, selaras dengan visi dan misi Pemerintah Daerah, serta alokasi sumber daya yang ada, sehingga dapat tercapai hasil yang efektif, efisien, dan akuntabel. Berikut adalah Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026 :

2.1.1 Visi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026, Visi Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 – 2026, yaitu : “Mewujudkan Wonogiri Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera” dengan semangat Go Nyawiji Sesarengan Mbangun Wonogiri.

2.1.2 Misi

Kemudian demi tercapainya visi tersebut, ditetapkan 4 Misi Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026, yaitu :

1. menjadikan rakyat Wonogiri yang lebih pintar, lebih sehat dan lebih berbudaya;
2. mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
3. memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
4. membangun pemenuhan sarana dan prasarana dasar di Wonogiri yang berkualitas dan berwawasan lingkungan guna menunjang pengembangan wilayah;

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Guna mewujudkan Visi Kabupaten Wonogiri, sesuai tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Wonogiri berperan untuk mendukung keberhasilan Misi Kedua, yaitu “Mempercepat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Wonogiri” dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kerangka pengawasan internal yang efektif dan akuntabel. Inspektorat Kabupaten Wonogiri bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik melalui penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, program, serta anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Sasaran yang ingin dicapai meliputi peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, optimalisasi kinerja aparatur, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Selain itu, Inspektorat juga berupaya untuk mendorong terciptanya budaya kerja yang profesional, kompeten, dan berintegritas, yang pada akhirnya akan mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah secara efektif, efisien, dan berkelanjutan dengan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Tabel 2.1 terkait Tujuan dan Sasaran berdasarkan Renstra Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026.

Namun di Triwulan II Tahun 2024 sebagai langkah tindak lanjut atas evaluasi RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026 serta rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 maka disusun Lembar Pengendalian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 yang memberikan dampak perubahan indikator tujuan dan sasaran pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri seperti yang akan ditampilkan pada Tabel 2.2 terkait Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026 berdasarkan Lembar Pengendalian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri tanggal 6 Juni 2024.

Perubahan ini terjadi atas rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas implementasi SAKIP Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 yang dilaksanakan

evaluasi penilaiannya di Tahun 2024. Salah satu rekomendasi yang harus ditindaklanjuti adalah menurunkan beberapa indikator sasaran Pemerintah Daerah pada RPJMD menjadi indikator tujuan Perangkat Daerah dan menghilangkan beberapa indikator yang telah menjadi IKU Perangkat Daerah karena dianggap tidak sesuai oleh evaluator. Tabel 2.1 menampilkan tujuan, sasaran beserta indikator yang menjadi IKU Inspektorat Kabupaten Wonogiri sesuai RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026. Sementara Tabel 2.2 menampilkan perubahan tujuan, sasaran beserta indikator yang telah menjadi IKU Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026 sesuai Lembar Pengendalian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Kabupaten Wonogiri Tahun 2024, sebagai berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja dan Target pada Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Wonogiri sesuai Renstra Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan efektifitas peran APIP dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1.1 Meningkatnya efektifitas pengawasan	Level Kapabilitas APIP <i>/(Internal Audit Capacity Models/IACM)</i>	Level	3	3	3	3	3	3
			Jumlah Unit Kerja/Perangkat Daerah yang mendapat predikat WBK/WBBM dalam 1 tahun	Unit Kerja/OPD	0	1	0	1	1	1
			Indeks Integritas Daerah	Indeks	60	65	70	75	80	85
			Persentase OPD yang dilaksanakan PMPRB dan mendapat nilai dari 30 ke atas	Persen	60	60	60	65	70	75
			Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	3	3	3	3	3
			Persentase OPD dengan Hasil Evaluasi AKIP dari BB ke atas	Persen	55	60	70	75	80	85
			Persentase penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Fungsional, baik APIP maupun APEP	Persen	95	95	95	95	95	95
2	Mewujudkan tata kelola pemerintahan Inspektorat yang baik	2.1 Meningkatnya kinerja Inspektorat	Nilai kematangan organisasi Inspektorat	Nilai	43	43	43	43	43	43
			Nilai SAKIP Inspektorat	Nilai	78	80	81	82	83	84
			Indeks profesionalitas ASN Inspektorat	Indeks	80	82	87	88,5	88,5	88,5
			Jumlah ASN Inspektorat yang menjadi agen perubahan	ASN	0	1	2	3	4	5
			Jumlah Inovasi Inspektorat	Inovasi	0	1	1	0	0	0
			IKM Inspektorat	Indeks	84	84	85	85	86	86

Tabel 2.2
Indikator Kinerja dan Target pada Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Wonogiri
Sesuai Lembar Pengendalian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Kabupaten Wonogiri Tahun 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan efektifitas peran APIP dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi		Level Kapabilitas APIP <i>/(Internal Audit Capacity Models/IACM)</i>	Level	3	3	3	3	3	3
			Indeks Penerapan Manajemen Risiko	Indeks	1,75	2	2,25	2,5	3	3,25
		1.1 Meningkatnya efektivitas pengawasan	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	3	3	3	3	3
2	Mewujudkan tata kelola pemerintahan Inspektorat yang baik		Nilai kematangan organisasi Inspektorat	Nilai	43	43	43	43	43	43
		2.1 Meningkatnya kinerja Inspektorat	Nilai SAKIP Inspektorat	Nilai	78	80	81	82	83	84
			Indeks profesionalitas ASN Inspektorat	Indeks	80	82	87	88,5	88,5	88,5
			Jumlah ASN Inspektorat yang menjadi agen perubahan	ASN	0	1	2	3	4	5
			Jumlah Inovasi Inspektorat	Inovasi	0	1	1	0	0	0
			IKM Inspektorat	Indeks	84	84	85	85	86	86

Catatan :

Indikator Tujuan 1 yaitu “Indeks Penerapan Manajemen Risiko” merupakan indikator turunan dari indikator sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri pada RPJMD Tahun 2021-2026 yang diturunkan menjadi indikator tujuan Inspektur Kabupaten Wonogiri dalam Lembar Pengendalian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Kabupaten Wonogiri Tahun 2024. Kemudian beberapa indikator sasaran Inspektur Kabupaten Wonogiri dihilangkan karena dianggap tidak sesuai oleh evaluator dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

2.2. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja adalah proses sistematis yang digunakan oleh organisasi untuk menetapkan tujuan dan sasaran kinerja, merumuskan langkah-langkah strategis, serta menentukan indikator kinerja yang terukur untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam konteks organisasi pemerintah, perencanaan kinerja berfungsi sebagai dasar untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Guna mendukung misi kedua Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi maka ditentukan tujuan dan sasaran yang akan dicapai Inspektorat Kabupaten Wonogiri di Tahun 2025 seperti yang tertuang dalam tabel 2.3 di bawah ini :

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat
Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatkan efektifitas peran APIP dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi		Level Kapabilitas APIP /(<i>Internal Audit Capacity Models/IACM</i>)	Level	3
			Indeks Penerapan Manajemen Resiko	Indeks	3
		Meningkatnya efektifitas pengawasan	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3
2	Mewujudkan tata kelola pemerintahan Inspektorat yang baik		Nilai kematangan organisasi Inspektorat	Nilai	43
		Meningkatnya kinerja Inspektorat	Nilai SAKIP Inspektorat	Nilai	83
			Indeks profesionalitas ASN Inspektorat	Indeks	88,5
			Jumlah ASN Inspektorat yang menjadi agen perubahan	ASN	4
			Jumlah Inovasi Inspektorat	Inovasi	0
			IKM Inspektorat	Indeks	86

2.3. Perjanjian Kinerja

Dalam mewujudkan target kinerja yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) terlampir, dibuatlah Perjanjian Kinerja (PK) berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD tahun berjalan . Perjanjian Kinerja tersebut merupakan Pernyataan Kinerja / Kesepakatan Kinerja antara bawahan dengan pimpinan. Perjanjian Kinerja pada Inspektorat

Kabupaten Wonogiri mengalami satu kali perubahan di Tahun 2025 yaitu saat terjadi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Terdapat 9 Perjanjian Kinerja pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri yaitu Perjanjian Kinerja Inspektur atas Tujuan dan Sasaran, Sekretaris atas Program dan Kegiatan Non Urusan, Inspektur Pembantu pada 5 Bidang atas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Urusan Pengawasan dan 2 Kepala Sub Bagian atas Sub Kegiatan Non Urusan sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

Kemudian berikut adalah Tabel Perjanjian Kinerja Inspektur Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Inspektur Kabupaten Wonogiri Tahun 2025

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatkan efektifitas peran APIP dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1	Levelling Kapabilitas APIP /(Internal Audit Capacity Models/IACM)	3 Level
		2	Indeks Penerapan Manajemen Resiko	3 Indeks
2	Mewujudkan tata kelola pemerintahan Inspektorat yang baik	3	Nilai kematangan organisasi Inspektorat	43 Nilai
3	Meningkatnya efektivitas pengawasan	4	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3 Level
4	Meningkatnya kinerja Inspektorat	5	Nilai SAKIP Inspektorat	83 Nilai
		6	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat	88.5 Indeks
		7	Jumlah ASN Inspektorat yang menjadi agen perubahan	4 Orang/tahun
		8	Jumlah Inovasi Inspektorat	1 Buah
		9	IKM Inspektorat	86 Indeks
No	Program	Anggaran (Rp)		Keterangan
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	262.910.250		APBD
2	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	197.459.900		APBD
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.284.534.412		APBD
TOTAL		8.744.904.562		

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada akhir tahun 2025 Inspektorat Kabupaten Wonogiri telah melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2025 melalui e-sakip Kabupaten Wonogiri. Kemudian dalam rangka pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penyusunan LKjIP setiap tahunnya maka pada Bab III ini dilakukan pengukuran kinerja, sebagai berikut :

1. pengukuran kinerja target dan realisasi atas tujuan dan sasaran di tahun 2025;
2. pengukuran kinerja target dan realisasi atas tujuan dan sasaran dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025;
3. pengukuran kinerja target dan realisasi dengan tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2026;
4. pengukuran kinerja target dan realisasi atas tujuan dan sasaran tahun 2025 dibandingkan dengan standar nasional/provinsi/ kabupaten (jika ada);
5. analisis keberhasilan/kegagalan capaian kinerja tujuan dan sasaran tahun 2025 beserta solusi yang dilakukan;
6. analisis tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran tahun 2025;
7. analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran tahun 2025.

Dalam rangka evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah (Renstra), maka digunakan skala pengukuran kinerja atas capaian kinerja sebagai berikut :

Skala nilai peringkat capaian kinerja :

- a. Sangat Baik : $\geq 91\%$
- b. Baik : 76 – 90,99%
- c. Cukup : 66 – 75,99%
- d. Kurang : 51 – 65,99%
- e. Sangat Kurang : $\leq 50,99\%$

Formulasi Perhitungan Capaian Kinerja :

- Semakin tinggi realisasi artinya pencapaian kinerja semakin baik, maka formulasi penghitungan capaian kinerjanya yaitu :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- Semakin tinggi realisasi artinya pencapaian kinerja semakin buruk, maka formulasi penghitungan capaian kinerjanya yaitu :

$$\frac{(\text{Realisasi} - (\text{Target} - \text{Realisasi}))}{\text{Target}} \times 100\%$$

3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pada sub bab ini disajikan kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya pada sub bab 3.1. terkait pengukuran kinerja dan analisisnya berikut adalah uraian atas pengukuran kinerja di Inspektorat Kabupaten Wonogiri dengan berbagai tolok ukur sebagai pembanding atas capaian kinerjanya.

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Hal ini untuk melihat capaian kinerja atas sasaran dan tujuan tahun 2025 di Inspektorat Kabupaten Wonogiri berdasarkan Perubahan PK terakhir, sebagaimana yang ditampilkan pada tabel 3.1 di bawah ini, serta melakukan analisis atas capaian kinerja tersebut.

Tabel 3.1

Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatkan efektifitas peran APIP dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Level Kapabilitas APIP /(<i>Internal Audit Capacity Models/IACM</i>)	Level	3	n/a	n/a	n/a	Belum tersedia data hasilnya
		Indeks Penerapan Manajemen Risiko	Indeks	3,023	2,816	93,15%	Sangat Baik	LHE dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
1.1	Meningkatnya efektivitas pengawasan	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	2 (Skor : 2,963)	66,67%	Cukup	LHE dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
2	Mewujudkan tata kelola pemerintahan Inspektorat yang baik	Nilai kematangan organisasi Inspektorat	Nilai	43	47	109,3%	Sangat Baik	LHE dari Bagian Organisasi
2.1	Meningkatnya kinerja Inspektorat	Nilai SAKIP Inspektorat	Nilai	83	80,25	96,7%	Sangat Baik	LHE dari Inspektorat Kabupaten Wonogiri
		Indeks profesionalitas ASN Inspektorat	Indeks	88,5	81,5	92,1%	Sangat Baik	Hasil Verifikasi BKN atas Data Tahun 2024
		Jumlah ASN Inspektorat yang menjadi agen perubahan	Orang	4	4	100%	Sangat Baik	SK dan Laporan dari Inspektorat Kabupaten Wonogiri
		Jumlah Inovasi Inspektorat	Inovasi	1	1	100%	Sangat Baik	Inspektorat Kabupaten Wonogiri
		IKM Inspektorat	Indeks	86	86,32	100,4%	Sangat Baik	Laporan dari Inspektorat Kabupaten Wonogiri

Berdasarkan tabel 3.1 terkait capaian kinerja tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 dapat dibuat analisisnya sebagai berikut :

- a) Tujuan 1 : Meningkatkan efektivitas peran APIP dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan beberapa indikator tujuannya sebagai berikut :

1) Level Kapabilitas APIP

Tidak tersedia hasil penilaiannya di tahun 2025 sehingga tidak dapat dilakukan analisa atas pencapaiannya di tahun 2025. Hal ini disebabkan adanya perubahan regulasi penilaian dari Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 yang telah diganti dengan Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 sehingga tidak dilakukan penilaiannya atas tahun 2025. Namun demikian dapat diuraikan bahwa berdasarkan atas pencapaian level kapabilitas APIP tahun 2024, Inspektorat telah berhasil meraih level 3 dengan realisasi skor 3,02 (BPKP : Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP, Nomor : PE.09.03/LHP-333/PW11/6/2024, Tanggal 23 Agustus 2024). Ini menunjukkan bahwa APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) telah efektif dalam meningkatkan kapasitas internal untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini penting karena peran APIP sebagai lembaga pengawasan internal sangat kritis dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas tata kelola pemerintahan.

2) Indeks Penerapan Manajemen Risiko

Realisasi Indeks Manajemen Risiko (MRI) pada tahun 2024 tercatat sebesar 3,023, sedangkan pada tahun 2025 menurun menjadi 2,816 (Surat BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor : PE.09.03/LHP-886/PW11/3.2/2025 tanggal 30 Desember 2025). Penurunan sebesar 0,207 poin tersebut menunjukkan bahwa tingkat kematangan penerapan manajemen risiko belum mengalami peningkatan, bahkan cenderung melemah dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa berbagai upaya perbaikan yang dilakukan belum sepenuhnya mampu mengatasi

kelemahan-kelemahan mendasar dalam penerapan manajemen risiko di lingkungan perangkat daerah. Hasil evaluasi MRI tahun 2025 memperlihatkan sejumlah faktor yang berkontribusi terhadap penurunan capaian tersebut. Keterbatasan alokasi sumber daya, baik dari sisi anggaran maupun SDM, masih menjadi kendala utama dalam penerapan manajemen risiko pada level operasional, strategis unit kerja, maupun strategis daerah. Selain itu, pengambilan keputusan di tingkat operasional dan strategis belum sepenuhnya berbasis risiko, sehingga manajemen risiko belum terintegrasi secara optimal dalam proses manajerial sehari-hari. Lebih lanjut, penerapan manajemen risiko juga belum dimanfaatkan sebagai indikator kinerja dalam dokumen perencanaan, yang berdampak pada lemahnya dorongan institusional untuk meningkatkan kualitas pengelolaan risiko. Di sisi kompetensi, belum seluruh pegawai mendapatkan peningkatan kapasitas dan keterampilan terkait manajemen risiko, sehingga pemahaman dan konsistensi penerapannya masih bervariasi antar unit kerja. Kelemahan lainnya tercermin dari Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang telah disusun, namun belum menunjukkan penurunan yang signifikan terhadap dampak dan/atau kemungkinan terjadinya risiko. Hal ini diperparah dengan belum memadainya monitoring terhadap risiko dan tindak pengendalian, khususnya pada risiko operasional unit kerja/OPD. Akumulasi berbagai kelemahan tersebut menyebabkan hasil penerapan manajemen risiko pada tahun 2025 belum mampu melampaui capaian tahun 2024. Dengan demikian, meskipun secara umum kerangka manajemen risiko telah tersedia, namun efektivitas implementasinya masih perlu diperkuat agar capaian MRI ke depan dapat meningkat. Fokus perbaikan perlu diarahkan pada penguatan alokasi sumber daya, integrasi risiko dalam pengambilan keputusan dan perencanaan kinerja, peningkatan kompetensi pegawai, serta penguatan kualitas RTP dan mekanisme monitoring. Upaya-upaya tersebut diharapkan mampu membalikkan tren penurunan MRI dan mendorong peningkatan kematangan manajemen risiko pada tahun-tahun berikutnya.

- b) Sasaran 1 : Meningkatkan efektivitas pengawasan dengan indikator sasarannya adalah Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah). Realisasi Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada tahun 2024 berada pada Level 3 dengan skor 3,161. Sementara itu, pada tahun 2025 realisasi menurun menjadi Level 2 dengan skor 2,963 (Surat BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor : PE.09.03/LHP-886/PW11/3.2/2025 tanggal 30 Desember 2025). Secara level, terjadi penurunan satu tingkat dari Level 3 ke Level 2, yang menunjukkan bahwa kematangan penyelenggaraan SPIP belum dapat dipertahankan pada level yang sama dengan tahun sebelumnya. Kondisi ini sekaligus mengindikasikan adanya pelemahan dalam konsistensi penerapan unsur-unsur SPIP pada tahun 2025. Dari sisi skor, terjadi penurunan sebesar 0,198 poin (dari 3,161 menjadi 2,963). Penurunan skor ini memperkuat gambaran bahwa kualitas penyelenggaraan SPIP secara keseluruhan belum mengalami peningkatan, bahkan cenderung menurun dibandingkan capaian tahun 2024. Meskipun nilai maturitas tahun 2025 masih berada pada kisaran mendekati Level 3, namun belum memenuhi ambang batas untuk mempertahankan level tersebut. Jika dikaitkan dengan target indikator tahun 2025, yaitu Level 3, maka capaian kinerja belum memenuhi target yang ditetapkan karena realisasi baru mencapai Level 2. Dengan demikian, secara level, terjadi gap satu tingkat antara target dan realisasi. Sementara itu, secara skor, selisih capaian terhadap target minimal Level 3 juga tercermin dari skor 2,963 yang masih berada di bawah capaian tahun 2024 sebesar 3,161, serta di bawah skor yang dibutuhkan untuk memastikan keberlanjutan Level 3. Berdasarkan rincian nilai maturitas tahun 2025 sebagaimana hasil penilaian, nilai akhir sebesar 2,963 dipengaruhi oleh variasi capaian pada masing-masing komponen. Komponen Penetapan Tujuan dan Pencapaian Tujuan masing-masing masih menunjukkan nilai maksimal (skor 3,000), namun pada komponen Struktur dan Proses terdapat nilai yang relatif lebih rendah, khususnya pada unsur Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pelemahan implementasi SPIP lebih banyak terjadi pada aspek proses

pengendalian dan mekanisme pemantauan, yang berdampak pada penurunan skor agregat dan turunya level maturitas. Dengan demikian, dibandingkan realisasi tahun 2024, capaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP tahun 2025 belum menunjukkan perbaikan, baik secara level maupun skor. Penurunan satu level dan berkurangnya skor sebesar 0,198 poin mencerminkan perlunya penguatan kembali konsistensi penerapan SPIP, terutama pada unsur Struktur dan Proses. Upaya perbaikan perlu difokuskan pada peningkatan kualitas lingkungan pengendalian, penajaman penilaian risiko, penguatan informasi dan komunikasi, serta efektivitas pemantauan, agar target Level 3 dapat kembali dicapai dan dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya.

- c) Tujuan 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan Inspektorat yang baik dengan indikator tujuannya adalah Nilai Kematangan Organisasi Inspektorat dengan capaian kinerja 109,3% dari target 43 dan realisasinya adalah 47 (Sekretariat Daerah : Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah, Nomor : B/6201/000.8.1/XII/2025, Tanggal 22 Desember 2025) dengan nilai 5 pada variabel VII s.d XII dan nilai 4 pada Variabel I, II, IV, V, VI. Sedangkan nilai 2 pada Variabel III. Berdasarkan hasil tersebut, Inspektorat termasuk dalam kategori lima besar nilai tertinggi di Kabupaten Wonogiri karena nilai tertingginya adalah 50. Namun demikian, dari 11 variabel penilaian kematangan organisasi, masih terdapat 1 variabel penilaian yang perlu menjadi perhatian, yaitu variabel III dimana Inspektorat mendapat nilai terendah dengan nilai 2 dalam variabel III tersebut dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya di Kabupaten Wonogiri. Hal ini dikarenakan saat penilaian di tahun 2025 atas tahun 2024 dalam variabel III terkait penjaminan mutu layanan, Inspektorat Kabupaten Wonogiri belum memiliki Standar Pelayanan yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.
- d) Sasaran 2 : Meningkatkan kinerja Inspektorat dengan beberapa indikator sasarannya sebagai berikut :
- 1) Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) Inspektorat. SAKIP merupakan sistem yang mengukur tingkat

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Nilai SAKIP Inspektorat mencapai 96,7% dari target yang ditetapkan, dengan realisasi 80,25 dari target 83 (Inspektorat Kabupaten Wonogiri : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024, Nomor B/597/700.1.2.7/VI/2025, Tanggal 20 Juni 2025) dengan penilaiannya sebagai berikut :

**HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN WONOGIRI
PERIODE EVALUASI TAHUN 2024**

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30,00	24,60	24,60
2	Pengukuran Kinerja	30,00	24,60	24,60
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,30	12,30
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	18,75	18,75
Nilai Akuntabilitas Kinerja			80,25	80,25
			A	A

Gambar 3.1

Hasil Penilaian Evaluasi AKIP Inspektorat TA. 2024

Walaupun pencapaiannya sangat baik, ada sedikit penurunan dari target yang ditetapkan terkait dengan beberapa faktor kinerja yang belum optimal. Hal ini mengindikasikan bahwa Inspektorat Kabupaten Wonogiri sudah cukup baik dalam mempertanggungjawabkan hasil kerjanya, namun masih dapat melakukan peningkatan pada beberapa aspek penilaian lainnya. Kemudian, Inspektorat Kabupaten Wonogiri juga telah melakukan tindak lanjut atas beberapa rekomendasi dalam Laporan Hasil Evaluasi AKIP Inspektorat Kabupaten Wonogiri sesuai yang tertuang dalam Berita Acara Pemantauan dan Validasi Tindak Lanjut atas Evaluasi AKIP Tahun 2024 yang ditandatangani oleh petugas pemantau tindak lanjut pada tanggal 19 Agustus 2025 dengan beberapa rekomendasinya sebagai berikut :

- (1) berupaya secara maksimal untuk memenuhi target kinerja yang telah diperjanjikan (masih terdapat dua indikator sasaran yang belum tercapai (IPASN dan nilai AKIP) dan sudah ditindaklanjuti atas proses upaya untuk peningkatan hasilnya di tahun

berikutnya);

- (2) mengoptimalkan implementasi manajemen risiko dan mengkaitkannya dengan kegiatan pengukuran kinerja dan evaluasi internal sehingga rekomendasi atau rencana tindak pengendalian yang dipilih bisa cukup efektif untuk penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja, perubahan budaya kerja organisasi dan penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya (telah selesai ditindaklanjuti);
 - (3) menginformasikan pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dibandingkan dengan target – target tahun sebelumnya pada dokumen LKjIP (belum ditindaklanjuti karena tindak lanjutnya baru dapat dilakukan di tahun 2026 saat penyusunan LKjIP Tahun 2025 yang tertuang dalam laporan ini);
 - (4) berupaya secara maksimal untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya atas pelaksanaan kinerja dari tahun sebelumnya (telah selesai ditindaklanjuti upaya perbaikannya);
- 2) Indeks Profesionalitas ASN (IPASN) Inspektorat
- Berdasarkan surat dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wonogiri, Nomor B/30/100.3.4.2/I/2026, tanggal 12 Januari 2026, Hal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN disampaikan bahwa berdasarkan surat Sekretaris Deputy Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN Badan Kepegawaian Negara Nomor 15014/B-BM.02.01/SD/C.VII/2025 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, sudah tidak dilakukan lagi pengukuran IPASN oleh BKN dan data terakhir atas pengukuran IPASN adalah data tahun 2024. Oleh sebab itu, realisasi atas IPASN di tahun 2025 adalah data atas tahun 2024 disesuaikan pegawai di tahun 2025 sehingga diperoleh nilai IP ASN 81,5 (Gambar 3.2 Hasil IP ASN Tahun 2024) dengan capaian kinerja “Sangat Baik”. Kondisi tersebut berdampak pada pengukuran kinerja perangkat daerah yang menjadikan Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) sebagai salah satu

indikator kinerja. Karena tidak dilaksanakannya pengukuran IP ASN oleh BKN pada tahun 2025, maka nilai IP ASN yang digunakan merupakan nilai terakhir hasil pengukuran tahun 2024 yang disesuaikan dengan kondisi kepegawaian tahun 2025. Penyesuaian ini dilakukan dengan memperhitungkan perubahan data pegawai, antara lain pegawai yang pensiun, mutasi, maupun perubahan status kepegawaian lainnya. Dengan demikian, capaian IP ASN sebesar 81,5 pada tahun 2025 tidak sepenuhnya mencerminkan hasil pengukuran kinerja aktual tahun berjalan, melainkan merupakan data historis yang digunakan kembali (*carry over*) sebagai dasar penilaian kinerja. Kondisi ini menjadi keterbatasan (*limitation*) dalam evaluasi kinerja aparatur, khususnya dalam menilai peningkatan profesionalitas ASN secara *year on year*. Namun demikian, nilai IP ASN dengan kategori “Sangat Baik” tetap menunjukkan bahwa secara umum tingkat profesionalitas ASN telah berada pada level yang tinggi. Hal ini mencerminkan adanya dukungan kompetensi, kualifikasi, kinerja, dan disiplin ASN yang relatif terjaga.

NILAI PENGUKURAN IP ASN INSPEKTORAT TAHUN 2024

NO	NIP	NAMA	JABATAN	NILAI PENGUKURAN IP ASN (myasn.go.id)				
				KUALIFIK	KOMPETEN	KINERJA	DISIPLIN	TOTAL
1	197101241999031002	MARDIANTO	Inspektur	20	35	25	5	85
2	196806181993031010	MULYANTO	Sekretaris	20	20	25	5	70
3	196801071994031010	SARDJITO	Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat	25	20	25	5	75
4	197103271991011002	SRIYONO	Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	25	30	25	5	85
5	197402061999032008	DEWI ATTUTIANINGRUM	Inspektur Pembantu Bidang Keuangan Dan Aset Daerah	25	25	25	5	80
6	197006201994012001	ARIS DEWI ANGGRAINI	Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan Dan Investigasi	25	25	25	5	80
7	197507102009032003	MURNI HASTUTI	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	25	25	25	5	80
8	197404201997032002	LANTIN ISTINGGAR	Kepala Sub Bagian Keuangan	25	20	25	5	75
9	196405081990031007	MOH. RIFA'I	Auditor Ahli Utama	20	20	25	5	70
10	196806121990031011	ARIS WIDODO	Auditor Ahli Madya	20	20	25	5	70
11	196707211990031005	EMANUEL EKO KRISTYANTO	Auditor Ahli Madya	20	20	25	5	70
12	197104061996032003	NENI SAPTANINGRUM	Auditor Ahli Madya	20	30	25	5	80
13	198508222009032008	AGUSTIN RATRIANA	Auditor Ahli Madya	20	35	25	5	85
14	198007312009032007	YULIA INDAH CINTAMI	Auditor Ahli Muda	25	30	25	5	85
15	197408112009011005	SUKIYATNO	Auditor Ahli Pertama	20	30	25	5	80
16	197906302006041008	HERY SUBYANTO	Auditor Ahli Pertama	20	35	25	5	85
17	198301242006042011	WIWIT KARYANTI	Auditor Ahli Pertama	25	35	25	5	90
18	199304142020121002	DICKY SATRIA	Auditor Ahli Pertama	20	35	25	5	85
19	199703122020122007	PAMELA DEVI CAHYARINI	Auditor Ahli Pertama	20	35	25	5	85
20	199703262020121005	RIZA YOGA SUSANTO	Auditor Ahli Pertama	20	35	25	5	85
21	199810142022032007	OCTAVIA ANDARESTA HERDININGSIH	Auditor Ahli Pertama	20	35	25	5	85
22	199912172022032003	AJENG WULAN HAPSARI	Auditor Ahli Pertama	20	30,5	25	5	80,5
23	197605042011011003	JAROD MALADI GUNAWAN	Auditor Penyelia	20	25	25	5	75
24	198108132011012004	AGUS PRIYANTI	Auditor Penyelia	20	25	25	5	75
25	197901152005011006	SETYAWAN ARFIANTO	Ppud Ahli Madya	20	30	25	5	80
26	198203272005012009	ARIEF WULANDARI	Ppud Ahli Muda	25	35	25	5	90
27	198101262010041001	ANDRIYANTO TULUS WIJAYA	Ppud Ahli Pertama	20	35	25	5	85
28	198412092009031003	BAMBANG MAHESTHI WIBOWO	Pranata Komputer Ahli Muda	20	35	25	5	85
29	198110262010012015	RINI SETYA HASTUTI	Pranata Komputer Mahir	20	30	25	5	80
30	198307122010012031	FITRI LESTARI	Pranata Komputer Mahir	25	35	25	5	90
31	196912272007012016	SITI DARYANTININGSIH	Penelaah Teknis Kebijakan	25	30	25	5	85
32	198911162020122001	ENI SUSANTI	Penelaah Teknis Kebijakan	25	35	25	5	90
33	197012152014061002	MARDIONO	Pengolah Data Dan Informasi	25	30	25	5	85
34	197010132008011004	WIYADI	Pengelola Layanan Operasional	25	30	25	5	85
Nilai IPASN				22,1	29,4	25,0	5,0	81,5

INSPEKTUR KABUPATEN WONOGIRI,
MARDIANTO, S.E
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710124 199903 1 002

Gambar 3.2

Hasil Rekap IP ASN Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2024

3) Jumlah ASN Inspektorat yang Menjadi Agen Perubahan

Target jumlah ASN yang menjadi agen perubahan telah tercapai 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan di tahun 2025. Ini adalah indikasi bahwa Inspektorat telah berhasil mengidentifikasi dan memfasilitasi peran ASN yang dapat mendorong perubahan positif dalam organisasi. Setiap tahunnya, Inspektorat Kabupaten Wonogiri selalu berupaya untuk menetapkan agen perubahan sesuai yang telah di targetkan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Wonogiri (Surat Keputusan Inspektur Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penetapan Agen Perubahan pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 yang ditetapkan tanggal 2 Mei 2025) untuk 4 agen perubahan di tahun 2025, yaitu :

- (1) Inspektur Kabupaten Wonogiri (Mardianto, S.E) yang melakukan proyek perubahan dengan tema “Strategi Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan” yang ikut berperan serta dalam memberikan hasil pada pelaksanaan monitoring penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan secara berkala di tahun 2025;
- (2) Sekretaris Inspektorat Kabupaten Wonogiri (Mulyanto, S.E) yang membuat proyek perubahan dengan tema “Penataan Lingkungan Kantor” dengan melakukan peningkatan kualitas fisik kantor demi kenyamanan kantor dengan melakukan pengecatan pagar dan perbaikan teras dan taman kantor;
- (3) Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset Daerah pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri (Dewi Attutianingrum, S.Sos., M.M.) yang membuat proyek perubahan terkait optimalisasi pengelolaan arsip dinamis di Bidang Keuangan dan Aset Daerah yang dimaksudkan untuk memastikan arsip yang digunakan secara aktif dan inaktif tertata, aman, mudah diakses, serta mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas di Bidang Keuangan dan Aset Daerah.

(4) Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri (Riza Yoga Susanto, S.E) yang membuat proyek perubahan terkait optimalisasi penggunaan Instagram dalam penyebaran informasi dan kegiatan anti korupsi di Inspektorat Kabupaten Wonogiri di era komunikasi modern bagi Instansi Pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja serta transformasi digital dalam penggunaan media khususnya media sosial Instagram dalam rangka sosialisasi anti korupsi ke publik.

Agen perubahan ini selain ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur setiap tahunnya juga diwajibkan untuk membuat proyek perubahan yang berisikan rencana aksi perubahan dan tindak lanjutnya. Hal ini setiap tahunnya dapat dilanjutkan atau dikembangkan oleh agen perubahan di tahun berikutnya demi perbaikan organisasi.

4) Jumlah Inovasi Inspektorat

Target jumlah inovasi di tahun 2025 adalah 1 dengan capaiannya 100% dan telah didaftarkan dalam aplikasi Gerbang Indah Wonogiri dengan dimunculkannya inovasi atas optimalisasi pengelolaan *digital library* sebagai wadah dokumen regulasi dan referensi untuk mendukung kegiatan pengawasan intern di Inspektorat Kabupaten Wonogiri yang dapat diakses melalui website Inspektorat Kabupaten Wonogiri. Inovasi ini memberikan kemudahan bagi pengawas dalam memperoleh regulasi terbaru dengan cepat dan mudah.



Gambar 3.3
Digital Library pada Website Inspektorat Kabupaten Wonogiri

5) IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Inspektorat

**PENGOLAHAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN
DAN PER UNSUR PELAYANAN**

UNIT PELAYANAN
ALAMAT :
Telp/Fax :

INSPEKTORAT KABUPATEN WONOGIRI
Jl. Periode 1 No 55 Wonogiri
(0273) 321138

Tempat Survei : Inspektorat Kabupaten Wonogiri

Waktu Survei : Mei s.d Oktober 2024

Responden : 80

IKM UNIT PELAYANAN :

86,32

Mutu Pelayanan : Baik

A (Sangat Baik) : 88,31 - 100,00

B (Baik) : 70,61 - 88,30

C (Kurang Baik) : 55,00 - 70,60

D (Tidak Baik) : 25,00 - 54,99

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Penyambutan	3,538 Sangat Baik
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,375 Baik
U3	Waktu Penyelesaian	3,238 Baik
U4	Biaya/Tarif	3,775 Sangat Baik
U5	Produk/Spesifikasi Jasa Pelayanan	3,525 Baik
U6	Kompetensi Petugas	3,460 Baik
U7	Perilaku Petugas	3,660 Sangat Baik
U8	Sarana dan prasarana	3,113 Baik
U9	Peningkatan pengetahuan, saran dan masukan	3,675 Sangat Baik

Gambar 3.4

Hasil Penilaian per Unsur Pelayanan IKM Inspektorat Tahun 2025

Ini menandakan bahwa responden puas dengan layanan yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Wonogiri. Kepuasan ini dapat menjadi indikasi bahwa pelayanan publik yang diberikan Inspektorat sudah sesuai dengan ekspektasi, baik dari segi waktu, kualitas layanan, maupun interaksi dengan responden.

Dari keseluruhan tabel 3.1, terlihat bahwa berdasarkan target yang telah ditetapkan di tahun 2025 atas indikator tujuan dan sasaran, sebagian besar diperoleh hasil capaian kinerja yang menunjukkan kategori capaian "Sangat Baik". Hanya satu indikator tujuan yang masih dalam kategori "Cukup" yaitu indikator sasaran "Level Maturitas SPIP". Namun demikian, secara skor maturitas SPIP telah mendekati level 3 dengan skor 2,963 yang berdasarkan capaian skornya telah mencapai 98,87% yang masuk dalam kategori "Sangat Baik".

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya (minimal 3 tahun)

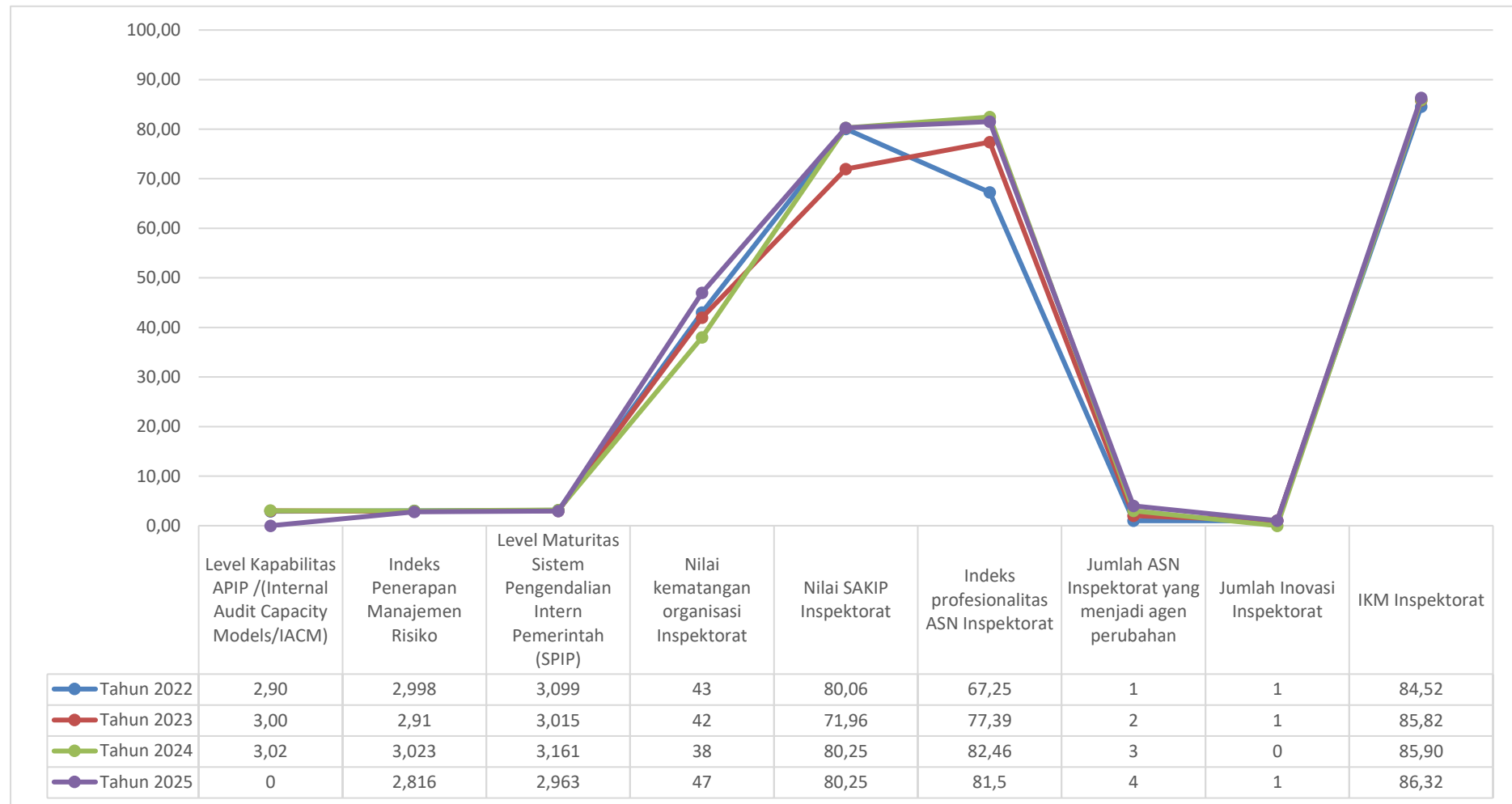
Dalam sub bab ini akan dibagi menjadi 2 tabel dengan tabel pertama yaitu Tabel 3.2 (realisasi atas capaian kinerja indikator tujuan dan sasaran di tahun 2025 dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya) dan Tabel 3.3 (realisasi capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan di tahun 2025 dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya) sebagai berikut :

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2025 Dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2022, 2023 dan Tahun 2024

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatkan efektivitas peran APIP dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan percepatan pelaksanaan pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Level Kapabilitas APIP /(Internal Audit Capacity Models/IACM)	Level	3	2 Skor : 2,9	66,67	3	3 Skor : 3,0	100	3	3 (Skor : 3,02)	100	3	n/a	n/a
		Indeks Penerapan Manajemen Risiko	Indeks	2	2,998	149,9	2,25	2,910	129	2,5	3,023	120	3,023	2,816	93,15
1.1	Meningkatnya efektivitas pengawasan	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	3 Skor : 3,099	100	3	3 Skor : 3,015	100	3	3 (Skor 3,161)	100	3	2 (Skor 2,963)	66,67
2	Mewujudkan tata kelola pemerintahan Inspektorat yang baik	Nilai kematangan organisasi Inspektorat	Nilai	43	43	100	43	42	97,67	43	38	88	43	47	109,3
2.1	Meningkatnya kinerja Inspektorat	Nilai SAKIP Inspektorat	Nilai	80	80,06	100,07	81	71,96	88,84	82	80,25	97,9	83	80,25	96,7
		Indeks profesionalitas ASN Inspektorat	Indeks	82	67,25	82	87	77,39	88,95	88,5	82,46	93,2	88,5	81,5	92,1
		Jumlah ASN Inspektorat yang menjadi agen perubahan	Orang	1	1	100	2	2	100	3	3	100	4	4	100
		Jumlah Inovasi Inspektorat	Inovasi	1	1	100	1	1	100	0	0	n/a	1	1	100
		IKM Inspektorat	Indeks	84	84,52	100,62	85	85,82	100,96	85	85,9	101	86	86,32	100,4

Berdasarkan tabel 3.2 di atas juga telah dibuat grafik atas capaiannya dari tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025 sebagai berikut :



Gambar 3.5
Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Wonogiri
Tahun 2025 dengan Tahun 2022, 2023 dan 2024

Kemudian berikut beberapa analisis atas realisasi dan capaian tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 :

- a) Tujuan 1 : Meningkatkan efektifitas peran APIP dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan dua indikator tujuannya sebagai berikut :

1) Level Kapabilitas APIP

2022 : Target yang ditetapkan adalah pada level 3, namun realisasi hanya mencapai level 2 dengan skor 2,9 (Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri, Nomor : PE.09.03/LHP-778/PW11/6/2022, Tanggal 5 Desember 2022). Capaian ini hanya 66,67% dari target yang diharapkan. Ini menunjukkan bahwa pada tahun 2022, masih terdapat elemen penilaian yang belum tercapai sesuai ekspektasi dalam meningkatkan kapabilitas APIP untuk mencapai level yang diinginkan, yaitu pada elemen peran dan layanan dengan level 2.

2023 : Pada tahun ini, terjadi perbaikan yang signifikan, di mana target level 3 akhirnya berhasil dicapai dengan skor 3,00 (Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri, Nomor : PE.09.03/LHP-1013/PW11/6/2023, Tanggal 29 Desember 2023). Hal ini menunjukkan bahwa langkah-langkah perbaikan telah dilakukan dengan tepat dan cukup efektif. Capaian 100% menandakan keberhasilan dalam peningkatan level kapabilitas APIP melalui aktivitas pengawasan (*assurance* dan *consulting*) sesuai dengan standar dan praktik profesional.

2024 : Target masih di level 3, dan realisasinya menunjukkan bahwa level 3 masih dapat dipertahankan, dengan peningkatan skor menjadi 3,02. Hal ini mengindikasikan konsistensi dalam peningkatan kapabilitas APIP yang dibangun dengan peningkatan skor berkelanjutan setiap tahunnya. Namun

demikian, upaya perbaikan tetap perlu terus dilakukan untuk mempertahankan Level 3 dengan peningkatan skor setiap tahunnya sebelum menuju peningkatan level berikutnya pada Level Kapabilitas APIP di Inspektorat Kabupaten Wonogiri.

2025 : Target masih sama seperti tahun sebelumnya di Level 3, namun tidak tersedia hasil realisasinya karena tidak terbit laporan evaluasi penilaian kapabilitas APIP oleh BPKP. Hal ini disebabkan adanya perubahan regulasi penilaian dari Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 yang telah diganti dengan Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 sehingga tidak dilakukan penilaian oleh BPKP di tahun 2025.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan secara menyeluruh bahwa pada tahun 2022, terjadi ketertinggalan dalam pencapaian yang disebabkan karena elemen penilaian peran dan layanan masih berada di level 2. Namun, dengan keberhasilan mencapai target di tahun 2023, menunjukkan bahwa strategi perbaikan yang ditetapkan Inspektur Kabupaten Wonogiri telah berhasil diimplementasikan dan meningkat skornya di tahun 2024. Konsistensi dalam menjaga level 3 ini harus terus didukung oleh seluruh APIP Inspektorat Kabupaten Wonogiri, terutama untuk memastikan bahwa tidak ada penurunan skor Kapabilitas APIP di masa depan.

2) Indeks Penerapan Manajemen Risiko

Target tahun 2022 adalah indeks 2, namun realisasinya jauh melebihi ekspektasi, mencapai 2,998 dengan capaian 149,9%. Kemudian di tahun 2023, target dinaikkan menjadi 2,25, tetapi realisasi tetap sangat positif, mencapai indeks 2,910 (129%). Meskipun capaian atas indeks penerapan manajemen risiko di tahun 2022 dan 2023 sangat tinggi melebihi capaian di tahun 2024, tetapi hal ini tidak dapat diartikan bahwa capaian kinerja di tahun 2024 menurun. Hal ini sudah dijelaskan dalam catatan tabel 3.2 terkait capaian yang sangat tinggi di tahun 2022 dan 2023. Selain itu, juga sudah dijelaskan sebelumnya jika di tahun 2024 ini merupakan awal

pertama kalinya Kabupaten Wonogiri berhasil mencapai nilai Indeks 3 untuk Indeks Penerapan Manajemen Risiko. Namun hal ini belum dapat dipertahankan di tahun 2025 dengan realisasinya adalah 2,816. Penurunan indeks pada tahun 2025 menunjukkan bahwa peningkatan kematangan penerapan manajemen risiko belum berlangsung secara berkelanjutan dan konsisten. Kondisi ini mengindikasikan masih adanya kelemahan struktural dan operasional dalam implementasi manajemen risiko, sebagaimana tercermin dalam hasil evaluasi MRI tahun 2025. Dengan demikian, meskipun Kabupaten Wonogiri telah menunjukkan capaian yang signifikan pada periode 2022–2024, namun diperlukan penguatan lebih lanjut agar capaian Indeks 3 tidak hanya dapat diraih, tetapi juga dapat dipertahankan secara stabil pada tahun-tahun berikutnya.

- b) Sasaran 1 : Meningkatnya efektivitas pengawasan dengan indikator sasarannya adalah Level Maturitas SPIP. Target di tahun 2022 hingga 2024 tetap pada level 3, dengan realisasi stabil di level yang sama setiap tahunnya (2022:skor 3,099; 2023:skor 3,015; 2024:skor 3,161). Semua capaian pada tiga tahun ini berada di angka 100%, menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) sudah berjalan sesuai ekspektasi di Level 3. Stabilitas dalam pencapaian level maturitas SPIP menunjukkan bahwa Kabupaten Wonogiri sudah memiliki sistem yang mapan dalam hal pengendalian intern. Namun, di tahun 2025 level maturitas SPIP turun satu tingkat menjadi level 2 dengan skor 2,963. Penurunan ini mengindikasikan bahwa konsistensi penerapan unsur-unsur SPIP belum sepenuhnya terjaga, khususnya pada aspek struktur dan proses pengendalian. Kondisi tersebut berdampak pada tidak tercapainya target Level 3 yang telah ditetapkan untuk tahun 2025. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kembali implementasi SPIP secara menyeluruh, terutama pada komponen lingkungan pengendalian, penilaian risiko, informasi dan komunikasi, serta pemantauan, agar level maturitas SPIP dapat kembali ditingkatkan dan dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya.

- c) Tujuan 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan Inspektorat yang baik dengan indikator tujuannya adalah Nilai Kematangan Organisasi. Berdasarkan Tabel 3.2, nilai kematangan organisasi Inspektorat Kabupaten Wonogiri menunjukkan tren penurunan pada periode 2022–2024, dari 43 pada tahun 2022 menjadi 42 pada tahun 2023, dan menurun cukup signifikan menjadi 38 pada tahun 2024. Penurunan tersebut mengindikasikan belum optimalnya pemenuhan beberapa indikator penilaian kematangan organisasi, khususnya pada aspek tata kelola internal dan standarisasi proses kerja. Salah satu faktor utama yang memengaruhi rendahnya capaian pada tahun 2024 adalah belum terlaksananya penyusunan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) secara menyeluruh, sehingga berdampak pada konsistensi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Kondisi tersebut menjadi dasar penetapan langkah perbaikan melalui penguatan tata kelola, percepatan penyusunan SOP, serta pelaksanaan evaluasi secara berkelanjutan. Implementasi langkah-langkah perbaikan tersebut secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan kinerja organisasi, yang tercermin dari naiknya nilai kematangan organisasi pada tahun 2025 menjadi 47, sekaligus menunjukkan bahwa upaya perbaikan yang dilakukan telah efektif dan mampu melampaui target yang ditetapkan.
- d) Sasaran 2 : Meningkatnya kinerja Inspektorat dengan beberapa indikator sasaran sebagai berikut :
- 1) Nilai SAKIP Inspektorat
- Tahun 2022, nilai SAKIP Inspektorat mencapai target, bahkan sedikit melampaui (realisasi 80,06 dari target 80), dengan capaian 100,07%. Namun di tahun 2023 terjadi penurunan capaian yang cukup signifikan. Target dinaikkan menjadi 81, namun realisasinya turun menjadi 71,96 sehingga menghasilkan capaian hanya 88,84%. Hal ini dikarenakan adanya perubahan regulasi dalam pelaksanaan penilaian evaluasi AKIP di tahun 2023 sehingga Nilai AKIP Inspektorat di tahun 2023 mengalami penurunan dan belum dapat mencapai targetnya. Kemudian target di tahun 2024 tetap dinaikkan menjadi 82 mengikuti target di Renstra yang belum terpenuhi,

dengan realisasi sebesar 80,25. Ini menunjukkan bahwa meskipun realisasi di tahun 2024 sedikit lebih baik dari realisasi di tahun 2023, capaian ini masih di bawah target yang diharapkan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa upaya perbaikan yang dilakukan belum sepenuhnya mampu mengimbangi peningkatan target kinerja yang ditetapkan. Pada tahun 2025, target kinerja kembali ditetapkan sebesar 83 sesuai Renstra, dengan realisasi yang masih sama dengan tahun 2024 yaitu 80,25. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun telah terjadi stabilisasi kinerja, peningkatan nilai AKIP belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi AKIP secara lebih konsisten dan berkelanjutan, khususnya dalam penyelarasan perencanaan, pengukuran kinerja, serta pemanfaatan hasil evaluasi kinerja, agar peningkatan nilai AKIP pada tahun-tahun berikutnya dapat lebih signifikan dan selaras dengan target yang ditetapkan.

2) Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat

Indeks profesionalitas ASN pada tahun 2022 masih di bawah target dengan capaian kinerja 82%, namun telah terjadi peningkatan pada tahun 2023 menjadi 88,95%. Kemudian untuk tahun 2024 menunjukkan peningkatan lebih lanjut menjadi 93,18%, meskipun masih sama-sama belum mencapai target yang ditetapkan. Kemudian untuk capaian di tahun 2025 adalah 92,1% dengan masih berdasarkan pada data tahun 2024, sebagaimana telah disampaikan dalam analisa Tabel 3.1.

3) Jumlah ASN Inspektorat yang Menjadi Agen Perubahan

Target ini selalu tercapai baik di tahun 2022, 2023, 2024 maupun 2025 dengan capaiannya 100%.

4) Jumlah Inovasi Inspektorat

Inovasi telah berhasil dicapai sesuai target selama dua tahun berturut-turut (2022 dan 2023). Namun, pada 2024 tidak ada target inovasi yang ditetapkan dan di tahun 2025 kembali ditetapkan 1 target inovasinya dan telah terealisasi dengan capaian 100% dengan

inovasi *digital library* seperti yang telah disampaikan dalam analisa atas Tabel 3.1.

5) IKM Inspektorat

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menunjukkan peningkatan yang stabil di atas target dengan capaian lebih dari 100% pada tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025. Namun demikian, masih terdapat catatan dalam dokumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri yang perlu menjadi perhatian terkait kecepatan waktu dalam pelayanan dan sarana dan prasarana.

Kemudian berikut adalah Tabel 3.3 yang akan menyajikan capaian kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan di tahun 2025 dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya (tahun 2022, 2023 dan 2024) sebagai berikut :

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 Dibandingkan dengan
Realisasi Tahun 2022, 2023 dan Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022			Realisasi 2023			Realisasi 2024			Realisasi 2025		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
I	Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase realisasi pengawasan sesuai PKPT	Persen	100	100	100	100	107,69	107,69	100	108,12	108,12	100	101,9	101,9
I.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Laporan	132	132	100	135	135	100	135	136	100,74	136	136	100
I.1.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	4	4	100	8	8	100	8	9	112,5	9	9	100
I.1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	5	5	100	5	5	100	5	5	100	5	5	100
I.1.3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	54	54	100	53	53	100	53	53	100	53	53	100
I.1.4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	1	1	100	1	1	100	1	1	100	1	1	100
I.1.5	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	30	30	100	30	30	100	30	30	100	30	30	100
I.1.6	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	1	1	100	1	1	100	1	1	100	1	1	100
I.1.7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	37	37	100	37	37	100	37	37	100	37	37	100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022			Realisasi 2023			Realisasi 2024			Realisasi 2025		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
I.2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan	99	99	100	99	117	118,18	99	117	118,18	127	132	103,94
I.2.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	2	2	100	2	2	100	2	2	100	2	2	100
I.2.2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	97	97	100	97	115	118,56	97	115	118,56	125	130	104
II	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan & Asistensi	Persentase realisasi Reformasi Birokrasi Komponen Penguatan Pengawasan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
II.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah laporan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Laporan	11	11	100	12	12	100	12	12	100	12	12	100
II.1.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	1 laporan	1 laporan	100	2	2	100	2	2	100	2	2	100
II.1.2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	10 laporan	10 laporan	100	10	10	100	10	10	100	10	10	100
II.2	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah laporan pendampingan & Asistensi	Laporan	9	9	100	9	9	100	9	9	100	9	9	100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022			Realisasi 2023			Realisasi 2024			Realisasi 2025		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
II.2.1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	2 laporan	2 laporan	100	53	53	100	53	53	100	53	53	100
II.2.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	1 laporan	1 laporan	100	53	53	100	53	53	100	53	53	100
II.2.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	5 laporan	5 laporan	100	5	5	100	5	5	100	5	5	100
II.2.4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	1 laporan	1 laporan	100	53	53	100	53	53	100	53	53	100
III	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Persen	100	100,26	100,26	100	99,49	99,49	100	98,41	98,41	100	100,68	100,68
III.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
III.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	100	3	3	100	3	3	100	3	3	100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022			Realisasi 2023			Realisasi 2024			Realisasi 2025		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
III.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	100	1	1	100	1	1	100	1	1	100
III.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan daerah yang di susun	Persen	100	100	100	100	95,93	95,93	100	87,27	87,27	100	105,45	105,45
III.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	14 kali	14 kali	100	41	36	87,8049	41	34	82,93	41	44	107,32
III.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	100	1	1	100	1	1	100	1	1	100,00
III.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	13	13	100	13	13	100	13	13	100	13	13	100,00
III.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang daerah pada Perangkat Daerah yang disusun	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
III.3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	2	100	5	5	100	5	5	100	5	5	100
IV.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022			Realisasi 2023			Realisasi 2024			Realisasi 2025		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
IV.1.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	12 laporan	12 laporan	100	8	8	100	8	8	100	8	8	100
IV.1.2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	24 SK	24 SK	100	24	24	100	24	24	100	24	24	100
IV.1.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	16 laporan	16 laporan	100	12	12	100	12	12	100	12	12	100
IV.1.4	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1 laporan	1 laporan	100	1	1	100	1	1	100	4	4	100
IV.1.5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	50	50	100	50	50	100	50	50	100	50	50	100
V.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Umum perangkat daerah	Persen	100	101,82	101,82	100	100	100	100	100	100	100	100	100
V.1.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	15 jenis	15 jenis	100	1	1	100	1	1	100	1	1	100
V.1.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	30 jenis	30 jenis	100	1	1	100	1	1	100	1	1	100
V.1.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	0	0	0	1	1	100	1	1	100	1	1	100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022			Realisasi 2023			Realisasi 2024			Realisasi 2025		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
V.1.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12 kali	12 kali	100	1	1	100	1	1	100	1	1	100
V.1.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12 jenis	12 jenis	100	1	1	100	1	1	100	1	1	100
V.1.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12 kali	12 kali	100	12	12	100	12	12	100	12	12	100
V.1.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12 kali	12 kali	100	20	20	100	20	20	100	20	20	100
V.1.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	15 kali	17 kali	113	15	15	100	15	15	100	15	15	100
V.1.9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1 laporan	1 laporan	100	2	2	100	2	2	100	2	2	100
V.1.10	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1 laporan	1 laporan	100	1	1	100	1	1	100	1	1	100
VI.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah	Persen	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100
VI.1.1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	0	2	2	100	0	0	0	0	0	0
VI.1.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	10	10	100	6	6	100	12	12	100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022			Realisasi 2023			Realisasi 2024			Realisasi 2025		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
VI.1.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	4	4	100	0	0	0	3	3	100
VII.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
VII.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	100 buah	100 buah	100	12	12	100	12	12	100	12	12	100
VII.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12 kali	12 kali	100	12	12	100	12	12	100	12	12	100
VII.1.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	2 kali	2 kali	100	12	12	100	12	12	100	12	12	100
VII.1.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12 kali	12 kali	100	12	12	100	12	12	100	12	12	100
VIII.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
VIII.1.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	2	100	2	2	100	2	2	100	2	2	100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022			Realisasi 2023			Realisasi 2024			Realisasi 2025		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
VIII.1.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	17	17	100	14	14	100	14	14	100	11	11	100
VIII.1.3	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	2 kali	2 kali	100	3	3	100	3	3	100	3	3	100
VIII.1.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4 jenis	4 jenis	100	10	10	100	10	10	100	10	10	100
VIII.1.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100	1	1	100	1	1	100	1	1	100

Berdasarkan Tabel 3.3 atas capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, terjadi perbedaan indikator kinerja di tahun 2022 karena di tahun tersebut belum ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri terkait indikator kinerja kegiatan dan sub kegiatan. Namun demikian, capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan setiap tahun dari tahun 2022 sampai dengan 2025 telah tercapai sesuai targetnya dan beberapa melebihi targetnya.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan 2025 dengan target jangka menengah (akhir tahun 2026) yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Dalam sub bab ini akan dibagi menjadi 2 tabel dengan tabel pertama untuk menyajikan data realisasi atas capaian kinerja indikator tujuan dan sasaran sampai dengan tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir Renstra. Kemudian tabel kedua menyajikan realisasi capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan tahun 2025 dibandingkan dengan target akhirnya di Renstra.

Kategori tingkat kemajuan atas capaian kinerja sampai dengan di tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir Renstranya tahun 2026 di Inspektorat Kabupaten Wonogiri, dengan kategori tingkat kemajuan yaitu : akan tercapai (capaian $<91\%$), sangat baik (capaian $\geq 91\%-100\%$) dan sudah melebihi target akhir Renstra (capaian $>100\%$) sebagaimana tabel 3.3 di bawah ini :

Tabel 3.4
Capaian Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Wonogiri s.d Tahun 2025
Dibandingkan dengan Target Akhir Tahun 2026

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Realisasi s.d Tahun 2025	Target Akhir s.d Tahun 2026	Capaian (%)	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatkan efektifitas peran APIP dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Level Kapabilitas APIP /(<i>Internal Audit Capacity Models/IACM</i>)	Level	3	3	100	Sangat Baik
		Indeks Penerapan Manajemen Risiko	Indeks	2,816	3,25	86,65	Akan Tercapai
1.1	Meningkatnya efektivitas pengawasan	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	2	3	66,67	Akan Tercapai
2	Mewujudkan tata kelola pemerintahan Inspektorat yang baik	Nilai kematangan organisasi Inspektorat	Nilai	47	43	109,3	Sangat Baik
2.1	Meningkatnya kinerja Inspektorat	Nilai SAKIP Inspektorat	Nilai	80,25	84	95,5	Sangat Baik
		Indeks profesionalitas ASN Inspektorat	Indeks	81,5	88,5	92,1	Sangat Baik
		Jumlah ASN Inspektorat yang menjadi agen perubahan	Orang	4	5	80	Akan Tercapai
		Jumlah Inovasi Inspektorat	Inovasi	3	2	150	Sangat Baik
		IKM Inspektorat	Indeks	86,32	86	100,4	Sangat Baik

Berdasarkan Tabel 3.4 di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Wonogiri secara umum menunjukkan hasil yang baik, dengan mayoritas indikator berada pada kategori Sangat Baik dan Akan Tercapai. Pada tujuan “Meningkatkan efektivitas peran APIP dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi”, indikator Level Kapabilitas APIP telah mencapai Level 3 sesuai target dengan capaian 100% dan berada pada kategori Sangat Baik. Namun demikian, indikator Indeks Penerapan Manajemen Risiko baru mencapai nilai 2,816 dari target akhir Renstra sebesar 3,25 atau sebesar 86,65%, sehingga berada pada kategori Akan Tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi manajemen risiko telah berjalan cukup baik, tetapi masih memerlukan penguatan agar dapat mencapai target optimal pada akhir periode perencanaan. Pada sasaran “Meningkatnya efektivitas pengawasan”, indikator Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berada pada Level 2 dari target Level 3, dengan capaian 66,67% dan dikategorikan Akan Tercapai. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penyelenggaraan SPIP masih perlu ditingkatkan, khususnya pada aspek struktur dan proses pengendalian, agar target Level 3 dapat tercapai.

Pada tujuan “Mewujudkan tata kelola pemerintahan Inspektorat yang baik”, indikator “Nilai Kematangan Organisasi Inspektorat” menunjukkan capaian yang sangat baik dengan realisasi 47 dari target akhir Renstra 43 atau sebesar 109,3%, yang menandakan adanya peningkatan signifikan dalam tata kelola internal organisasi. Selanjutnya, pada sasaran “Meningkatnya kinerja Inspektorat”, indikator “Nilai SAKIP Inspektorat” mencapai 80,25 dari target akhir Renstra 84 atau sebesar 95,5%, yang menunjukkan kinerja cukup baik namun masih memerlukan upaya perbaikan agar selaras dengan target Renstra. Indikator “Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat” mencapai nilai 81,5 dari target akhir Renstra 88,5 atau sebesar 92,1%, menunjukkan kompetensi dan profesionalisme ASN berada pada kategori sangat baik meskipun masih terdapat ruang peningkatan. Indikator “Jumlah ASN Inspektorat yang menjadi agen perubahan” baru mencapai 80% dan berada pada kategori akan tercapai, sehingga perlu menjadi perhatian untuk ditingkatkan pada periode berikutnya agar tercapai sesuai

target akhir Renstra. Sebaliknya, indikator “Jumlah Inovasi Inspektorat” dan “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)” menunjukkan kinerja yang sangat baik, bahkan melampaui target, yang mencerminkan komitmen Inspektorat dalam mendorong inovasi serta peningkatan kualitas pelayanan kepada pemangku kepentingan.

Kemudian untuk selanjutnya adalah Tabel 3.5 yang akan menyajikan capaian kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan sampai dengan tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir Renstra di tahun 2026 sebagai berikut :

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sampai Dengan Tahun 2025
Dibandingkan Dengan Target Akhir Tahun 2026

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi s.d 2025	Target Akhir s.d Tahun 2026	Capaian (%)	Tingkat Kemajuan
I	Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase realisasi pengawasan sesuai PKPT	Persen	100	100	100,00	Sangat Baik
I.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Laporan	535	792	67,55	Akan tercapai
I.1.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	47	37	127,03	Melampaui Renstra
I.1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	20	25	80,00	Akan tercapai
I.1.3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	267	324	82,41	Akan tercapai
I.1.4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	5	6	83,33	Akan tercapai
I.1.5	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	147	177	83,05	Akan tercapai
I.1.6	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	4	5	80,00	Akan tercapai
I.1.7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	181	218	83,03	Akan tercapai
I.2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan	429	587	73,08	Akan tercapai

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi s.d 2025	Target Akhir s.d Tahun 2026	Capaian (%)	Tingkat Kemajuan
I.2.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	8	10	80,00	Akan tercapai
I.2.2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	548	577	94,97	Sangat Baik
II	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan & Asistensi	Persentase realisasi Reformasi Birokrasi Komponen Penguatan Pengawasan	Persen	100	100	100,00	Sangat Baik
II.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah laporan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Laporan	49	66	74,24	Akan tercapai
II.1.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	21	16	131,25	Melampaui Renstra
II.1.2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	40	50	80,00	Akan tercapai
II.2	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah laporan pendampingan & Asistensi	Laporan	37	55	67,27	Akan tercapai
II.2.1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	53	53	100,00	Sangat Baik
II.2.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	53	53	100,00	Sangat Baik
II.2.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	5	5	100,00	Sangat Baik

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi s.d 2025	Target Akhir s.d Tahun 2026	Capaian (%)	Tingkat Kemajuan
II.2.4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	53	53	100,00	Sangat Baik
III	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Persen	98,41	100	98,41	Sangat Baik
III.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Persen	100	100	100,00	Sangat Baik
III.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	14	17	82,35	Akan tercapai
III.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	5	80,00	Akan tercapai
III.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan daerah yang di susun	Persen	100	100	100,00	Sangat Baik
III.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	44	41	107,32	Melampaui Renstra
III.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	6	83,33	Akan tercapai
III.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	65	78	83,33	Akan tercapai
III.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang daerah pada Perangkat Daerah yang disusun	Persen	100	100	100,00	Sangat Baik

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi s.d 2025	Target Akhir s.d Tahun 2026	Capaian (%)	Tingkat Kemajuan
III.3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	17	22	77,27	Akan tercapai
IV.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian	Persen	100	100	100,00	Sangat Baik
IV.1.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	8	8	100,00	Sangat Baik
IV.1.2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	96	120	80,00	Akan tercapai
IV.1.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	52	64	81,25	Akan tercapai
IV.1.4	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	7	5	140,00	Melampaui Renstra
IV.1.5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	50	50	100,00	Sangat Baik
V.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah	Persen	100	100	100,00	Sangat Baik
V.1.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	6	83,33	Akan tercapai
V.1.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	6	83,33	Akan tercapai
V.1.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	6	83,33	Akan tercapai
V.1.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	6	83,33	Akan tercapai

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi s.d 2025	Target Akhir s.d Tahun 2026	Capaian (%)	Tingkat Kemajuan
V.1.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	6	83,33	Akan tercapai
V.1.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	60	72	83,33	Akan tercapai
V.1.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tarnu	Laporan	72	92	78,26	Akan tercapai
V.1.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	110	125	88,00	Akan tercapai
V.1.9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	7	9	77,78	Akan tercapai
V.1.10	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	4	5	80,00	Akan tercapai
VI.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah	Persen				
VI.1.1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	2	25	8,00	Akan tercapai
VI.1.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	22	30	73,33	Akan tercapai
VI.1.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Disediakan	Unit	7	5	140,00	Melampaui Renstra
VII.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	100,00	Sangat Baik
VII.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	72	83,33	Akan tercapai

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi s.d 2025	Target Akhir s.d Tahun 2026	Capaian (%)	Tingkat Kemajuan
VII.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	72	83,33	Akan tercapai
VII.1.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	48	60	80,00	Akan tercapai
VII.1.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	72	83,33	Akan tercapai
VIII.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100	100	100,00	Sangat Baik
VIII.1.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	8	10	80,00	Akan tercapai
VIII.1.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	75	102	73,53	Akan tercapai
VIII.1.3	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	13	16	81,25	Akan tercapai
VIII.1.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	39	49	79,59	Akan tercapai
VIII.1.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	6	83,33	Akan tercapai

Berdasarkan tabel 3.5 diatas dapat dijelaskan secara singkat bahwa sebagian besar capaian kinerja sampai dengan tahun 2025 jika dibandingkan dengan target akhir tahun 2026 masih termasuk dalam kategori capaian yang “akan tercapai” karena targetnya terakumulasi sampai dengan akhir tahun 2026 sehingga belum dapat tercapai jika belum sampai akhir tahun 2026. Kemudian terdapat beberapa indikator yang capaiannya telah “melampaui target Renstra”, hal ini dikarenakan dalam perjalanan menuju tahun 2025 terjadi perubahan target dalam Perjanjian Kinerja (target meningkat) sehingga meningkatkan realisasinya dan terjadi keterlampaian target jika dibandingkan dengan target akhir Renstra. Selain itu, terdapat pula beberapa indikator kinerja yang capaiannya “sangat baik” dengan ketercapaian “100%”. Hal ini dikarenakan dalam perhitungan target akhir renstranya tidak terakumulasi sehingga capaian setiap tahunnya sama hingga akhir tahun 2026.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar Provinsi dan Kabupaten

Pada bagian ini akan ditampilkan perbandingan atas realisasi indikator kinerja tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Wonogiri tahun 2024 dengan standar Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten se-Jawa Tengah sebagaimana tabel 3.6 di bawah ini :

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Indikator Tujuan dan Sasaran Tahun 2025
dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Standar Kabupaten	Capaian	Standar Provinsi	Capaian
1	Meningkatkan efektifitas peran APIP dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Level Kapabilitas APIP /(<i>Internal Audit Capacity Models/IACM</i>)	Level	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Indeks Penerapan Manajemen Risiko	Indeks	2,816	n/a	n/a	2,902	97,04%
1.1	Meningkatnya efektivitas pengawasan	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	2 (Skor 2,963)	n/a	n/a	2 (Skor 2,977)	100%
2	Mewujudkan tata kelola pemerintahan Inspektorat yang baik	Nilai kematangan organisasi Inspektorat	Nilai	47	43,68	107,6%	-	n/a
2.1	Meningkatnya kinerja Inspektorat	Nilai SAKIP Inspektorat	Nilai	80,25	77,69	103%	-	n/a
		Indeks profesionalitas ASN Inspektorat	Indeks	81,5	80,62	101,1%	-	n/a
		Jumlah ASN Inspektorat yang menjadi agen perubahan	Orang	4	-	n/a	-	n/a
		Jumlah Inovasi Inspektorat	Inovasi	1	-	n/a	-	n/a
		IKM Inspektorat	Indeks	86,32	87,20	98,9%	-	n/a

Berdasarkan tabel 3.6 di atas dapat dijelaskan bahwa tidak semua indikator kinerja tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di Inspektorat Kabupaten Wonogiri memiliki standar yang dapat dibandingkan dengan standar provinsi/kabupaten sehingga terisi “n/a” yang artinya tidak tersedia data terkait standarnya. Kemudian untuk Indeks Profesionalitas ASN sudah tidak dilakukan verifikasi penilaian oleh BKN atas tahun 2025 sebagaimana telah dijelaskan dalam analisa Tabel 3.1 sehingga dalam Tabel 3.6 di atas, realisasi dan capaiannya adalah “n/a”. Sama halnya dengan Level Kapabilitas APIP juga masih “n/a” karena belum dilakukan penilaian di tahun 2025 karena adanya perubahan regulasi seperti yang telah dijelaskan dalam analisa Tabel 3.1.

Berikut adalah beberapa indikator kinerja tujuan dan sasaran yang memiliki standar untuk perbandingan yang dapat dijelaskan analisisnya sebagai berikut :

a) Indeks Penerapan Manajemen Risiko

Berdasarkan Tabel perbandingan kinerja Kabupaten Wonogiri dengan Provinsi Jawa Tengah, capaian Indeks Penerapan Manajemen Risiko Kabupaten Wonogiri pada tahun 2025 tercatat sebesar 2,816, sementara realisasi Provinsi Jawa Tengah sebesar 2,902. Dengan demikian, capaian Kabupaten Wonogiri berada sedikit di bawah capaian provinsi, dengan tingkat ketercapaian sebesar 97,04% terhadap nilai provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko di Kabupaten Wonogiri relatif sudah mendekati kinerja Provinsi Jawa Tengah, namun masih terdapat selisih kinerja yang perlu dikejar agar dapat sejajar atau melampaui capaian provinsi. Selisih ini mengindikasikan bahwa penguatan implementasi manajemen risiko, khususnya pada aspek integrasi risiko dalam pengambilan keputusan, kualitas rencana tindak pengendalian, serta efektivitas monitoring risiko, masih diperlukan. Adapun untuk Indeks Manajemen Risiko, capaian Kabupaten Wonogiri sudah relatif kompetitif, tetapi masih memerlukan penguatan lebih lanjut agar tidak hanya mendekati, melainkan

mampu menyamai bahkan melampaui capaian Provinsi Jawa Tengah. Fokus perbaikan perlu diarahkan pada penguatan struktur dan proses pengendalian, konsistensi penerapan manajemen risiko, serta efektivitas pemantauan, sehingga kinerja pengendalian intern dan manajemen risiko di Kabupaten Wonogiri dapat terus meningkat secara berkelanjutan.

b) Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Indikator Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Wonogiri pada tahun 2025 berada pada Level 2 dengan skor 2,963, sedangkan Provinsi Jawa Tengah juga berada pada Level 2 dengan skor 2,977. Secara level, capaian Kabupaten Wonogiri sudah setara dengan capaian provinsi, yang tercermin dari tingkat ketercapaian sebesar 100%. Namun demikian, secara skor terdapat selisih tipis sebesar 0,014 poin, yang menunjukkan bahwa meskipun berada pada level yang sama, kualitas implementasi SPIP di Kabupaten Wonogiri masih sedikit di bawah rata-rata provinsi. Dengan demikian, dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, capaian Level Maturitas SPIP Kabupaten Wonogiri sudah sejajar secara level, namun masih perlu peningkatan dari sisi skor agar kualitas penyelenggaraan SPIP semakin mendekati atau melampaui capaian provinsi.

c) Nilai kematangan organisasi Inspektorat

Berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor B/6201/000.8.1/XII/2025 tanggal 22 Desember 2025, diperoleh hasil penilaian terkait nilai kematangan organisasi untuk Inspektorat Kabupaten Wonogiri, dengan skor sebesar 47. Kematangan organisasi yang diukur melalui berbagai indikator seperti tata kelola, manajemen risiko, serta kualitas sumber daya manusia, menunjukkan bahwa Inspektorat telah berada pada tahap perkembangan yang signifikan, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan lebih lanjut seperti yang telah dibahas dalam analisa capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Wonogiri pada Tabel 3.1.

Sementara itu, nilai kematangan organisasi secara

keseluruhan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri mencapai 43,68. Dengan membandingkan hasil antara Inspektorat dan pemerintah daerah secara keseluruhan, capaian kematangan organisasi Inspektorat Kabupaten Wonogiri dapat dikatakan cukup baik, yaitu 107,6% dari nilai yang diraih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri. Persentase ini menunjukkan bahwa Inspektorat Kabupaten Wonogiri telah mampu melebihi standar kematangan organisasi Kabupaten Wonogiri. Selisih nilai sebesar 3,32 poin antara Inspektorat dan Pemerintah Daerah mengindikasikan bahwa Inspektorat, sebagai aparat pengawasan internal pemerintah, memiliki tata kelola internal yang relatif lebih matang dan kapabilitas yang memadai dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Kabupaten Wonogiri.

Meskipun demikian, perbedaan capaian tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh aspek kematangan organisasi telah optimal. Masih terdapat peluang peningkatan pada beberapa variabel penilaian, sebagaimana telah diuraikan dalam analisis Tabel 3.1. Inspektorat Kabupaten Wonogiri diharapkan dapat semakin berperan aktif dalam mendukung pencapaian target reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Untuk mendukung hal tersebut, Inspektorat perlu terus melakukan evaluasi internal secara berkelanjutan, mengadopsi praktik-praktik terbaik dari daerah lain yang telah memiliki tingkat kematangan organisasi lebih tinggi, serta memperkuat koordinasi dan sinergi dengan perangkat daerah lainnya. Dengan langkah-langkah tersebut, Inspektorat diharapkan mampu mempertahankan keunggulan kematangan organisasinya sekaligus mendorong peningkatan kematangan organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri secara keseluruhan.

d) Nilai SAKIP Inspektorat

Jika dibandingkan dengan perolehan nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Pemerintah Kabupaten Wonogiri,

yang memperoleh predikat "BB" dengan skor 77,69, hasil evaluasi AKIP untuk Inspektorat Kabupaten Wonogiri menunjukkan capaian yang lebih tinggi. Inspektorat Kabupaten Wonogiri berhasil meraih predikat "A" dengan skor 80,25. Perbedaan skor ini, meskipun tidak terlalu besar, mencerminkan adanya perbedaan dalam pengelolaan kinerja antara pemerintah daerah secara keseluruhan dan Inspektorat sebagai lembaga pengawasan internal. Predikat "A" yang diperoleh oleh Inspektorat menunjukkan telah memenuhi atau bahkan melampaui standar kinerja yang diharapkan dengan capaian 103%.

Di sisi lain, meskipun Pemerintah Kabupaten Wonogiri memperoleh predikat "BB", yang menunjukkan kinerja yang baik, capaian ini masih menunjukkan adanya ruang untuk peningkatan lebih lanjut dalam hal transparansi, keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, dan peningkatan kualitas laporan kinerja. Selisih skor yang ada antara Inspektorat dan Pemerintah Kabupaten Wonogiri menunjukkan bahwa dalam beberapa area, khususnya yang berkaitan dengan pengawasan internal dan akuntabilitas, Inspektorat sudah melampaui standar yang diterapkan untuk pemerintah daerah secara keseluruhan. Sebagai langkah selanjutnya, meskipun Inspektorat telah mencapai skor yang tinggi, penting bagi Inspektorat Kabupaten Wonogiri untuk terus melakukan evaluasi dan peningkatan berkelanjutan untuk memastikan bahwa pengelolaan kinerja tetap optimal dan dapat beradaptasi dengan tantangan baru yang muncul.

e) Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN)

Jika dibandingkan dengan hasil Indeks Profesionalitas ASN (IPASN) untuk Pemerintah Kabupaten Wonogiri, yang memperoleh nilai 80,62, Inspektorat Kabupaten Wonogiri menunjukkan pencapaian yang lebih baik dengan skor 81,5, yang artinya capaian Inspektorat Kabupaten Wonogiri mencapai 101,1% dari nilai IPASN Pemerintah Kabupaten Wonogiri secara keseluruhan. Pencapaian ini menandakan bahwa Inspektorat Kabupaten Wonogiri telah

berhasil melampaui standar profesionalitas yang tercermin dalam pengelolaan sumber daya manusia di instansi pemerintah, khususnya dalam hal peningkatan kompetensi, kinerja, dan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN).

Selisih skor yang tercatat sebesar 0,88 poin antara Inspektorat Kabupaten Wonogiri dan Pemerintah Kabupaten Wonogiri secara keseluruhan menggambarkan bahwa Inspektorat Kabupaten Wonogiri memiliki tingkat profesionalisme yang lebih tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Capaian 101,1% ini menunjukkan bahwa Inspektorat tidak hanya memenuhi, tetapi juga melebihi ekspektasi yang ditetapkan dalam hal pengelolaan ASN, baik dari aspek kualifikasi, disiplin kerja, maupun peningkatan kompetensi pegawainya jika dibandingkan dengan hasil IPASN Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri.

Nilai 81,5 yang diperoleh oleh Inspektorat Kabupaten Wonogiri mencerminkan bahwa instansi ini telah berhasil mengembangkan dan menerapkan sistem pengelolaan ASN yang lebih terstruktur dan transparan. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti penataan karir, pengembangan kapasitas dan kompetensi ASN, serta penerapan kebijakan yang mendukung terciptanya lingkungan kerja yang lebih profesional dan akuntabel. Dengan demikian, Inspektorat Kabupaten Wonogiri telah berhasil menciptakan iklim kerja yang lebih produktif.

Namun demikian, meskipun capaian ini menunjukkan hasil yang baik, masih terdapat peluang untuk terus meningkatkan kualitas profesionalisme ASN di Inspektorat Kabupaten Wonogiri. Peningkatan lebih lanjut dapat difokuskan pada pengembangan pelatihan yang lebih terarah, memperkuat pendekatan berbasis kompetensi, serta mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam manajemen ASN. Hal ini penting untuk memastikan bahwa seluruh pegawai di Inspektorat Kabupaten Wonogiri dapat terus beradaptasi dengan perubahan tuntutan dan tantangan yang berkembang dalam pengelolaan pemerintahan yang semakin kompleks.

f) IKM Inspektorat

Jika dibandingkan dengan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk Pemerintah Kabupaten Wonogiri, yang tercatat sebesar 87,20, sementara Inspektorat Kabupaten Wonogiri memperoleh nilai 86,32, capaian Inspektorat tersebut menunjukkan 98,9% dari nilai IKM yang diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri secara keseluruhan. Pencapaian ini menggambarkan bahwa meskipun Inspektorat Kabupaten Wonogiri memiliki tingkat kepuasan masyarakat yang sedikit lebih rendah, hanya sedikit di bawah nilai rata-rata yang dicapai oleh pemerintah daerah secara keseluruhan.

Namun, capaian 86,32 pada Inspektorat masih mengindikasikan adanya beberapa ruang untuk perbaikan, terutama dalam aspek sarana dan prasarana yang menjadi salah satu faktor penting dalam penilaian IKM. Dalam hal ini, penilaian IKM menunjukkan bahwa kekurangan pada sarana dan prasarana di lingkungan Inspektorat Kabupaten Wonogiri dapat memengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, serta efektivitas pelaksanaan tugas-tugas pengawasan. Sarana dan prasarana yang memadai, seperti infrastruktur teknologi informasi, ruang pelayanan yang nyaman, serta peralatan kerja yang efisien, sangat berpengaruh pada kemudahan akses dan kecepatan dalam menyelesaikan pengaduan atau permintaan masyarakat.

Meskipun IKM Pemerintah Kabupaten Wonogiri secara keseluruhan menunjukkan angka 87,20, yang mencerminkan tingkat kepuasan yang relatif tinggi, nilai 86,32 pada Inspektorat menggambarkan bahwa ada tantangan yang lebih besar dalam meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan, khususnya dalam hal aksesibilitas dan responsivitas pelayanan. Sebagai lembaga yang bertugas melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja instansi lain di pemerintah daerah, Inspektorat Kabupaten Wonogiri sangat bergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran tugasnya. Keterbatasan

dalam fasilitas ini dapat berpengaruh terhadap efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan tugas pengawasan, yang pada gilirannya dapat menurunkan kepuasan masyarakat terhadap layanan Inspektorat.

Kekurangan pada sarana dan prasarana ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti kurangnya perangkat teknologi yang memadai untuk mendukung sistem pengelolaan data, belum optimalnya penggunaan sistem informasi untuk transparansi laporan, atau bahkan terbatasnya fasilitas fisik untuk pelayanan publik yang dapat mempengaruhi kenyamanan dan kecepatan layanan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan hasil IKM dan mencapai tingkat kepuasan yang lebih tinggi, sangat penting bagi Inspektorat Kabupaten Wonogiri untuk melakukan investasi pada peningkatan sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan lebih baik.

Dengan melakukan perbaikan di area sarana dan prasarana serta peningkatan aspek pelayanan lainnya, diharapkan Inspektorat Kabupaten Wonogiri dapat memperbaiki capaian nilai IKM dan menciptakan lingkungan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Keberhasilan dalam hal ini juga akan mendukung tercapainya tujuan untuk membangun pemerintahan yang bersih dan baik (*good governance*) di Kabupaten Wonogiri, yang pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja Inspektorat dan pemerintahan daerah secara keseluruhan.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada sub bab ini akan ditampilkan tabel yang menyajikan data penyebab keberhasilan atas kinerja yang telah tercapai sesuai target dan rencana tindak lanjutnya serta penyebab kegagalan atas kinerja yang belum tercapai sesuai targetnya dan alternatif solusinya seperti pada tabel 3.7 berikut ini :

Tabel 3.7

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2025 serta Alternatif Solusinya

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
1	Meningkatkan efektifitas peran APIP dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Level Kapabilitas APIP /(Internal Audit Capacity Models/IACM)	Level	3	n/a	n/a	Belum tersedia hasil laporan evaluasinya dari BPKP sehingga realisasi dan capaiannya masih "n/a"	Belum tersedia hasil capaiannya sehingga belum dapat dilakukan analisa atas solusi atau tindak lanjutnya untuk perbaikan dan peningkatan kinerjanya di tahun berikutnya.
		Indeks Penerapan Manajemen Risiko	Indeks	3,023	2,816	93,15	Penerapan Manajemen Risiko telah berjalan cukup baik dengan capaian 93,15%. Nilai masih dipengaruhi oleh rendahnya skor pada area kapabilitas, khususnya kepemimpinan, SDM, dan proses manajemen risiko.	Penguatan komitmen pimpinan, peningkatan kapasitas SDM pengelola risiko, serta penyempurnaan proses manajemen risiko secara terintegrasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.
1.1	Meningkatnya efektivitas pengawasan	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	2 (Skor 2,963)	66,67	Kelemahan masih terdapat pada unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, serta pemantauan yang belum optimal.	Penguatan implementasi SPIP melalui peningkatan kualitas lingkungan pengendalian, penilaian risiko yang lebih sistematis, serta optimalisasi pemantauan dan tindak lanjut hasil pengawasan.
2	Mewujudkan tata kelola pemerintahan Inspektorat yang baik	Nilai kematangan organisasi Inspektorat	Nilai	43	47	109,3	Telah berhasil melampaui targetnya	Meskipun capaiannya telah melampaui target namun masih terdapat variabel dengan nilai terendah di variabel III terkait penjaminan mutu layanan yang menjadi fokus untuk dilakukan perbaikan agar terjadi peningkatan nilai di tahun berikutnya dengan penyusunan standar pelayanan yang di tahun 2025.

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
2.1	Meningkatnya kinerja Inspektorat	Nilai SAKIP Inspektorat	Nilai	83	80,25	96,7	Belum berhasil mencapai targetnya di tahun 2025 karena perubahan cara evaluasi yang lebih kompleks per tahun 2023 sehingga belum mampu mencapai targetnya	Pemahaman mendalam tentang perubahan metode penilaian SAKIP yang lebih kompleks untuk mengidentifikasi area yang terpengaruh oleh perubahan tersebut dan menyesuaikan strategi serta kebijakan Inspektorat agar lebih sesuai dengan kriteria penilaian yang baru.
		Indeks profesionalitas ASN Inspektorat	Indeks	88,5	81,5	92,1	Belum berhasil mencapai targetnya di tahun 2025	Melakukan evaluasi terhadap SDM yang ada agar dimanfaatkan secara maksimal untuk peningkatan kompetensi di tahun berikutnya.
		Jumlah ASN Inspektorat yang menjadi agen perubahan	Orang	4	4	100	Telah berhasil mencapai targetnya di tahun 2025	Terus dilakukan penambahan agen perubahan setiap tahunnya untuk memperbaiki kinerja internal organisasi dalam Inspektorat Kabupaten Wonogiri.
		Jumlah Inovasi Inspektorat	Inovasi	1	1	100	Telah berhasil mencapai targetnya di tahun 2025	Meskipun realisasinya telah tercapai sesuai targetnya namun tetap perlu dilakukan langkah persiapan untuk menciptakan inovasi digital yang dapat didaftarkan dalam WIA tahun berikutnya untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja pengawasan di Inspektorat Kabupaten Wonogiri
		IKM Inspektorat	Indeks	86	86,32	100,4	Telah berhasil melampaui targetnya di tahun 2025 meskipun masih terdapat catatan terkait sarana dan prasarana yang belum memadai	Fokus pada peningkatan sarana dan prasarana yang menjadi kendala berdasarkan hasil survei dan membuat rencana anggaran dan <i>timeline</i> untuk perbaikan sarana dan prasarana tersebut dengan prioritas berdasarkan urgensi dan dampaknya terhadap kinerja Inspektorat dan tingkat kepuasan masyarakat.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan anggaran

Tabel 3.8
Capaian Kinerja dan Capaian Keuangan per Sasaran di Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran		Satuan	Kinerja			Keuangan			
					Target	Realisasi	Capaian	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan	1.1	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	2 (Skor 2,963)	66,67%	Program Penyelenggaraan Pengawasan	262.910.250	217.021.160	82,55%
								Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	197.459.900	188.361.700	95,39%
Rata-rata Total Capaian Indikator Sasaran							66,67%	Total Penyerapan	460.370.150	405.382.860	88,05%
2	Meningkatnya kinerja Inspektorat	2.1	Nilai SAKIP Inspektorat	Nilai	83	80,25	96,7%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	8.284.534.412	6.785.112.804	81,90%
		2.2	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat	Indeks	88,5	81,5	92,1%				
		2.3	Jumlah ASN Inspektorat yang menjadi agen perubahan	Orang	4	4	100%				
		2.4	Jumlah Inovasi Inspektorat	Inovasi	1	1	100%				
		2.5	IKM Inspektorat	Indeks	86	86,32	100,4%				
Rata-rata Total Capaian Indikator Sasaran							97,84%	Total Penyerapan	8.284.534.412	6.785.112.804	81,90%

Kemudian berdasarkan data pada tabel 3.8 di atas dapat dilakukan penghitungan atas tingkat efektivitas dan efisiensinya pada tabel 3.9 sebagai berikut :

Tabel 3.9
Tingkat Efektivitas dan Efisiensi per Sasaran Tahun 2025

No	Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Capaian Keuangan (%)	Tingkat Efektivitas	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan	66,67	88,05	75,72	-21,38
2	Meningkatnya kinerja Inspektorat	97,84	84,88	115,27	12,96

Keterangan :

- Rumus Tingkat Efektivitas = (Persentase capaian per sasaran / Persentase serapan anggaran per sasaran) x 100
- Rumus Tingkat Efisiensi = Persentase capaian per sasaran - Persentase serapan anggaran per sasaran

Berdasarkan tabel 3.9 diatas dapat dianalisis datanya sebagai berikut :

a) Sasaran 1 : Meningkatnya efektivitas pengawasan

Nilai efektivitas tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pengawasan belum sepenuhnya efektif, karena capaian kinerja yang dihasilkan masih lebih rendah dibandingkan dengan tingkat penyerapan anggaran. Hal ini mengindikasikan bahwa output atau hasil yang dicapai belum sebanding dengan sumber daya yang telah digunakan.

Sementara itu, tingkat efisiensi sebesar -21,38% menunjukkan kondisi tidak efisien. Nilai efisiensi yang negatif menandakan bahwa persentase penyerapan anggaran lebih tinggi dibandingkan capaian kinerja yang diraih. Dengan kata lain, penggunaan anggaran relatif besar, namun belum diikuti oleh pencapaian kinerja yang optimal.

Secara keseluruhan, sasaran Meningkatnya efektivitas pengawasan pada tahun 2025 memerlukan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, agar penggunaan anggaran dapat lebih tepat sasaran dan mampu menghasilkan capaian kinerja yang lebih maksimal

serta efisien di periode berikutnya..

b) Sasaran 2 : Meningkatnya kinerja Inspektorat

- Capaian Kinerja 97,84%, sedikit di bawah 100%, yang menunjukkan bahwa kinerja mendekati target namun tidak sepenuhnya tercapai.
- Capaian Keuangan 84,88%, yang lebih rendah dibandingkan capaian kinerja, menunjukkan bahwa anggaran yang terserap juga tidak sebesar target yang diharapkan.
- Tingkat Efektivitas 115,27, menunjukkan efektivitas yang sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun anggaran yang diserap tidak sepenuhnya sesuai target, kinerja yang dicapai sangat baik.
- Tingkat Efisiensi 12,96, yang menunjukkan bahwa kinerja yang dicapai jauh lebih tinggi dibandingkan penggunaan anggaran.
- Secara keseluruhan menunjukkan kinerja organisasi yang sangat baik dalam hal efektivitas, tetapi ada potensi peningkatan efisiensi, di mana ada perbedaan yang lebih besar antara capaian kinerja dan penggunaan anggaran. Hal ini dikarenakan sisa anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang masih menyisakan anggaran cukup besar sekitar 1,1 Milyar sehingga menjadikan tingkat efisiensinya belum optimal. Hal ini dikarenakan untuk persiapan jika ada mutasi pegawai ke Inspektorat yang tidak terprediksi serta adanya pengurangan pegawai karena pensiun di tahun 2025.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 3.10

Program/Kegiatan Penunjang Tujuan dan Sasaran Tahun 2025 di Inspektorat Kabupaten Wonogiri

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran		Satuan	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	Meningkatkan efektifitas peran APIP dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Level Kapabilitas APIP /(<i>Internal Audit Capacity Models/IACM</i>)		Level	n/a				
		Indeks Penerapan Manajemen Risiko		Indeks	93,15				
1.1	Meningkatnya efektivitas pengawasan	1.1.1	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	66,67	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase realisasi pengawasan sesuai PKPT	101,9	Menunjang
						Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100	Menunjang
						Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	103,94	Menunjang
						PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase realisasi Reformasi Birokrasi Komponen Penguatan Pengawasan	100	Menunjang
						Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah laporan perumusan kebijakan teknis di Bidang	100	Menunjang

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran		Satuan	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
							Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan		
						Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Jumlah laporan pendampingan & Asistensi	100	Menunjang
2	Mewujudkan tata kelola pemerintahan Inspektorat yang baik	Nilai kematangan organisasi Inspektorat		Nilai	109,3				
2.1	Meningkatnya kinerja Inspektorat	2.1.1	Nilai SAKIP Inspektorat	Nilai	96,7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Persentase tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100,68	Menunjang
		2.1.2	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat	Indeks	92,1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100	Menunjang
		2.1.3	Jumlah ASN Inspektorat yang menjadi agen perubahan	Orang	100	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan daerah yang disusun	105,45	Menunjang
		2.1.4	Jumlah Inovasi Inspektorat	Inovasi	100	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang daerah pada Perangkat Daerah yang disusun	100	Menunjang
		2.1.5	IKM Inspektorat	Indeks	100,4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian	100	Menunjang

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
					Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah	100	Menunjang
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah	100	Menunjang
					Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	Menunjang
					Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100	Menunjang

Berdasarkan tabel 3.10 diatas dapat dijelaskan bahwa dalam pencapaian indikator tujuan dan sasaran di Inspektorat Kabupaten Wonogiri tahun 2025 ditunjang oleh 3 Program dan 12 Kegiatan dengan rincian untuk tujuan dan sasaran pertama didukung oleh 2 Program, yaitu : Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi. Sedangkan untuk tujuan dan sasaran kedua didukung oleh 1 program, yaitu : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Kemudian untuk dapat melihat capaian atas *output* Sub Kegiatan yang mendukung capaian kegiatan dan program dapat dilihat pada lampiran Realisasi Kinerja dan Keuangan s.d 31 Desember 2025 dalam laporan LKjIP ini.

Kemudian untuk tujuan dan sasaran pertama pada Urusan Pengawasan yang didukung dengan 2 Program yaitu : Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, berikut beberapa analisa atas capaian kinerjanya sampai dengan Sub Kegiatan :

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Capaian kinerja atas program ini adalah 101,9% yang diperoleh dari capaian 2 kegiatan sebagai berikut :

1.1. Kegiatan Pengawasan Internal

Capaian kinerja atas kegiatan ini adalah 100% dari targetnya 136 Laporan dan realisasinya 136 Laporan yang diperoleh dari hasil *output* laporan 7 Sub Kegiatan berikut ini :

a) Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Capaian kinerja atas sub kegiatan ini adalah 100% dari targetnya 9 Laporan dengan hasil *outputnya* adalah 9 Laporan atas Audit Kinerja pada OPD dengan risiko sangat tinggi atau tinggi berdasarkan penyusunan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) Tahun 2025.

b) Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Capaian kinerja atas sub kegiatan ini adalah 100% dari targetnya 5 Laporan dengan hasil *outputnya* adalah 2 laporan hasil pendampingan BPK atas LKPD untuk pendahuluan dan terinci; 2 laporan hasil audit monitoring pendapatan, aset dan PSU yang

dilaksanakan Tim Keuangan dan Aset Daerah; serta 1 laporan hasil asistensi penyusunan LKPD tahun 2025.

c) Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja

Capaian kinerja atas sub kegiatan ini adalah 100% dari targetnya 53 laporan yang diperoleh dari *output* hasil evaluasi implementasi AKIP di tahun 2024 pada 53 Perangkat Daerah di Kabupaten Wonogiri.

d) Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan

Capaian kinerja atas sub kegiatan ini adalah 100% dari targetnya 1 laporan atas hasil reviu LKPD tahun 2024.

e) Sub Kegiatan Pengawasan Desa

Capaian kinerja atas sub kegiatan ini adalah 100% yang diperoleh dari *output* hasil pengawasan pada 30 desa di Kabupaten Wonogiri. Penentuan obrik desa ini sudah berbasis risiko dengan menggunakan aplikasi Siswaskeudes dalam penentuan skor risiko desa.

f) Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal

Capaian kinerja atas sub kegiatan ini adalah 100% dari targetnya 1 kesepakatan yang diperoleh dari *output* 1 kesepakatan telaah intern antar bidang yang ditandatangani oleh semua Inspektur Pembantu dengan lampiran hasil telaah intern antar bidang di tahun 2025.

g) Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Capaian kinerja atas sub kegiatan ini adalah 100% dari targetnya 37 dokumen yang diperoleh dari *output* hasil 2 dokumen ikhtisar semester I dan II, 2 dokumen hasil TLRHP Provinsi semester I dan II, 2 dokumen hasil TLRHP BPK semester I dan II, 1 dokumen hasil penyelenggaraan Larwasda, serta 30 dokumen hasil TLRHP APIP Inspektorat Kabupaten Wonogiri.

1.2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Capaian kinerja atas kegiatan ini adalah 103,94% dari targetnya 127 laporan dan realisasinya 132 laporan yang diperoleh dari *output* 2 sub kegiatan berikut ini :

a) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Capaian kinerja atas sub kegiatan ini adalah 100% yang diperoleh dari *output* hasil laporan penanganan penyelesaian kerugian daerah semester I dan II yang pelaksanaannya bersamaan dengan penanganan TLRHP BPK semester I dan II.

b) Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Capaian kinerja atas sub kegiatan ini adalah 104% dari targetnya 125 laporan realisasinya 130 laporan. Realisasi sub kegiatan ini dapat melebihi targetnya karena adanya tugas mandatori tambahan yang belum masuk dalam penyusunan rencana kerja pengawasan di akhir tahun 2024 atas Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025. Aktivitas pengawasan dalam sub kegiatan ini ada banyak, yaitu : pemeriksaan saldo kas akhir tahun, reviu RKA perubahan dan RKA penetapan, reviu Renja , reviu RKPD, reviu DAK, reviu DAU yang ditentukan penggunaannya, reviu HPS, reviu ASB dan SSH, reviu tata kelola BMD, reviu tata kelola PBJ, reviu SPBE, pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan, reviu LPPD, audit investigasi, *Probitiy Audit* dan beberapa aktivitas pengawasan lainnya diluar pengawasan reguler seperti yang telah diuraikan di sub kegiatan pengawasan pada Kegiatan Pengawasan Internal. Dalam sub kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu ini, Inspektorat ikut berpartisipasi aktif dalam Pengarusutamaan *Gender* dengan melaksanakan tupoksinya di bidang pengawasan untuk melakukan monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan *gender* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Capaian kinerja atas program ini adalah 100% yang diperoleh dari capaian 2 kegiatan sebagai berikut :

2.1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Capaian kinerja atas kegiatan ini adalah 100% dari targetnya 12 Laporan yang diperoleh dari capaian kinerja 2 sub kegiatan berikut :

- a) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
Capaian kinerja atas sub kegiatan ini adalah 100% dari targetnya 2 rekomendasi yang diperoleh dari *output* hasil rekomendasi penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Perubahan tahun 2025 dan rekomendasi penyusunan PKPT tahun 2026.
- b) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan
Capaian kinerja atas sub kegiatan ini adalah 100% dari targetnya 10 rekomendasi yang diperoleh dari hasil rapat koordinasi maupun konsultasi terkait semua aktivitas pengawasan yang dihadiri oleh Inspektur atau Inspektur Pembantu (Irban) di tahun 2025.

2.2. Pendampingan dan Asistensi

Capaian kinerja atas kegiatan ini adalah 100% dari targetnya 9 Laporan yang diperoleh dari 2 laporan terkait SPIP dan MR, 5 laporan terkait Pemberantasan Korupsi (ZI, Gratifikasi, Saber Pungli, MCP dan SPI), serta 2 laporan terkait monitoring RB dan LHKAN yang terinci dalam 4 sub kegiatan sebagai berikut :

- a) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
Capaian kinerja atas sub kegiatan ini adalah 100% dari targetnya 53 Perangkat Daerah. Di tahun 2025 telah dilakukan pendampingan/asistensi dalam pelaksanaan SPIP pada semua OPD di Kabupaten Wonogiri (53 Perangkat Daerah) baik dalam penyusunan Register Risiko (RR) tahun 2026 maupun monitoring Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Semester I tahun 2025.
- b) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
Capaian kinerja atas sub kegiatan ini adalah 100% dari targetnya 53 Perangkat Daerah. Di tahun 2025 telah dilakukan Evaluasi Internal RB pada tahap Perencanaan dan Pelaksanaan Monitoring RB secara Triwulanan pada Perangkat Daerah.

- c) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Capaian kinerja atas sub kegiatan ini adalah 100% dari targetnya 5 kegiatan. Di tahun 2025 telah dilaksanakan 5 kegiatan atas sub kegiatan ini yaitu kegiatan terkait Pembangunan Zona Integritas (ZI), *Monitoring Centre for Prevention* (MCP), Survei Penilaian Integritas (SPI), Gratifikasi, serta kegiatan Saber Pungli.

- d) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
- Capaian kinerja atas sub kegiatan ini adalah 100% dari targetnya 53 Perangkat Daerah. Di tahun 2025 telah dilaksanakan Monitoring atas LHKAN pada semua Perangkat Daerah di Kabupaten Wonogiri (53 Perangkat Daerah).

3.3. REALISASI ANGGARAN

Dalam sub bab ini akan diuraikan terkait pagu anggaran dan realisasi anggaran untuk mewujudkan pencapaian kinerja di Inspektorat Kabupaten Wonogiri tahun 2025 sebagaimana tabel 3.11 di bawah ini :

Tabel 3.11
Capaian Kinerja Keuangan Inspektorat Tahun 2025

No	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	8.284.534.412	7.032.195.378	84,88
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.455.000	2.299.750	93,68
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.494.023.755	6.333.774.516	84,51
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	999.940	979.100	97,92
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	154.346.130	145.482.710	94,26
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	135.313.100	109.705.546	81,08
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	119.685.700	113.140.000	94,53
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	251.133.900	210.654.844	83,88
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	126.576.887	116.158.912	91,77
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	262.910.250	217.021.160	82,55
2.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	128.318.050	113.277.757	88,28

No	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
2.2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	134.592.200	103.743.403	77,08
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	197.459.900	188.361.700	95,39
3.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	13.305.000	12.608.500	94,77
3.2	Pendampingan dan Asistensi	184.154.900	175.753.200	95,44
TOTAL ANGGARAN		8.744.904.562	7.437.578.238	85,05

Berdasarkan tabel 3.11 di atas dapat dijelaskan bahwa di Inspektorat Kabupaten Wonogiri dalam memenuhi target kinerja organisasi di tahun 2025 telah menggunakan anggaran sebesar 85,05% dari total pagu anggaran yang disediakan (termasuk di dalamnya pembayaran gaji dan tunjangan ASN) dari pagu anggaran sebesar Rp 8.744.904.562,- telah diserap sebanyak Rp 7.437.578.238,-.

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja dalam LKjIP, dapat disimpulkan bahwa Inspektorat Kabupaten Wonogiri menetapkan dua tujuan strategis yang dijabarkan ke dalam enam sasaran kinerja. Tujuan pertama diukur melalui dua indikator kinerja tujuan (Level Kapabilitas APIP dan Indeks Manajemen Risiko) yang didukung oleh satu indikator kinerja sasaran (Level Maturitas SPIP).

Sementara itu, tujuan kedua diukur melalui satu indikator kinerja tujuan (Nilai Kematangan Organisasi) yang didukung oleh lima indikator kinerja sasaran (Nilai AKIP Inspektorat, Jumlah Agen Perubahan, Jumlah Inovasi, IPASN dan IKM Inspektorat). Namun untuk indikator IPASN sudah tidak dilakukan verifikasi penilaiannya di tahun 2025 sehingga menggunakan data tahun 2024 dengan penyesuaian pada pegawai di tahun 2025.

Berdasarkan hasil analisis di Bab III terkait capaian kinerja di Inspektorat Kabupaten Wonogiri, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada tujuan pertama, hanya satu indikator kinerja yang telah tersedia data realisasinya, yaitu Indeks Manajemen Risiko dengan capaian kinerja 93,15% yang masuk dalam kategori “Sangat Baik”. Sementara indikator Level Kapabilitas APIP belum tersedia data hasil realisasinya sehingga masih terisi “n/a”.
2. Pada tujuan kedua dengan indikatornya Nilai Kematangan Organisasi telah tercapai melampaui targetnya dengan target 43 dan realisasinya di tahun 2025 adalah 47.
3. Pada indikator sasaran atas tujuan pertama, yaitu Level Maturitas SPIP capaian kinerjanya 66,67 yang masuk dalam kategori “Cukup” dengan targetnya Level 3 dan realisasinya masih di Level 2. Namun demikian jika dilihat dari skor realisasinya adalah 2,963, ini termasuk realisasi yang hampir mendekati Level 3.
4. Pada sasaran kedua “Meningkatnya Kinerja Inspektorat”, sebagian besar target di tahun 2025 atas indikator tujuan dan sasaran telah tercapai atau

bahkan melampaui targetnya yang semuanya menunjukkan kategori capaian "Sangat Baik" dengan capaian $\geq 91\%$ (Nilai Kematangan Organisasi, Jumlah Agen Perubahan, Jumlah Inovasi, Indeks Profesionalitas ASN dan Indeks Kepuasan Masyarakat). Namun, masih terdapat ruang perbaikan pada Nilai AKIP Inspektorat, yang masih berada di bawah target meskipun dalam kategori "Baik" dengan capaian $< 91\%$.

5. Pada tujuan dan sasaran pertama, realisasi indikator tujuan dan sasaran kinerja tahun 2025 jika dibandingkan dengan tahun 2022, 2023 dan 2024, terjadi penurunan dimana di tahun 2025, semua indikator tujuan dan sasarannya tidak ada yang memenuhi target (Indeks Manajemen Risiko dan Level Maturitas SPIP).
6. Pada tujuan dan sasaran kedua, realisasi indikator tujuan dan sasaran kinerja tahun 2025 jika dibandingkan dengan tahun 2022, 2023 dan 2024, sebagian besar mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hanya saja pada Nilai AKIP Inspektorat meskipun tidak terjadi penurunan dari tahun sebelumnya di 2024 tapi juga tidak mengalami peningkatan dan belum mencapai targetnya di tahun 2025.
7. Realisasi indikator tujuan dan sasaran pertama di tahun 2025 jika dibandingkan dengan target akhir renstra, sebagian besar masih dalam kategori "Akan Tercapai" yaitu Indeks Manajemen Risiko dan Level Maturitas SPIP. Sementara Level Kapabilitas APIP masih menggunakan realisasi di tahun 2024 karena belum tersedia data realisasinya di tahun 2025 sehingga capainnya masih 100% dibanding target akhir Renstra.
8. Realisasi indikator tujuan dan sasaran kedua di tahun 2025 jika dibandingkan dengan target akhir renstra, sebagian besar telah memperoleh capaian kategori "Sangat Baik" dengan capaian $> 91\%$. Hanya satu indikator sasaran masih dalam kategori "Akan Tercapai" yaitu Jumlah Agen Perubahan karena targetnya terakumulasi sampai dengan akhir tahun 2026 sehingga belum dapat tercapai jika belum sampai akhir tahun 2026.
9. Sebagian besar capaian kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sampai dengan tahun 2025 jika dibandingkan dengan target akhir tahun 2026 masih termasuk dalam kategori capaian yang "Akan Tercapai" karena targetnya terakumulasi sampai dengan akhir tahun 2026 sehingga belum dapat tercapai jika belum sampai akhir tahun 2026. Kemudian terdapat

beberapa indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan yang capaiannya telah “melampaui target Renstra”, hal ini dikarenakan dalam perjalanan menuju tahun 2025 terjadi perubahan target dalam Perjanjian Kinerja (target meningkat) sehingga meningkatkan realisasinya dan terjadi keterlampauan target jika dibandingkan dengan target akhir Renstra. Selain itu, terdapat pula beberapa indikator kinerja yang capaiannya “Sangat Baik” dengan ketercapaian “100%”. Hal ini dikarenakan dalam perhitungan target akhir renstranya tidak terakumulasi sehingga capaian setiap tahunnya sama hingga akhir tahun 2026.

10. Seluruh capaian indikator tujuan dan sasaran jika dibandingkan dengan Standar Kabupaten Wonogiri maupun Standar Provinsi Jawa Tengah, capainnya masih termasuk dalam kategori “Sangat Baik” dengan ketercapaian >91%.
11. Capaian Kinerja atas sasaran “Meningkatnya Efektivitas Pengawasan” dengan Capaian Kinerja 66,67% dan serapan anggaran 88,05% dan tingkat efektivitas 75,72. Kemudian tingkat efisiensi -21,38, yang menunjukkan adanya selisih yang lebih besar antara capaian kinerja dan serapan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja yang dicapai jauh lebih rendah dibandingkan penggunaan anggarannya.
12. Capaian Kinerja atas sasaran “Meningkatnya Kinerja Inspektorat” dengan Capaian Kinerja 97,84% dan serapan anggaran 84,88% dan tingkat efektivitas 115,27, menunjukkan efektivitas yang sangat tinggi. Kemudian tingkat efisiensi 12,96, yang menunjukkan adanya selisih yang lebih besar antara capaian kinerja dan serapan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja yang dicapai jauh lebih tinggi dibandingkan penggunaan anggarannya.
13. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran di Inspektorat Kabupaten Wonogiri tahun 2025 ditunjang oleh 3 Program dan 12 Kegiatan dengan rincian untuk tujuan dan sasaran pertama didukung oleh 2 Program, yaitu : Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan 4 Kegiatan pendukungnya. Sedangkan untuk tujuan dan sasaran kedua didukung oleh 1 program, yaitu : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan 8 Kegiatan pendukungnya.

14. Inspektorat Kabupaten Wonogiri dalam memenuhi target kinerja organisasi di tahun 2025 telah menggunakan anggaran sebesar 85,05% dari total pagu anggaran yang disediakan (termasuk di dalamnya pembayaran gaji dan tunjangan ASN) sebesar Rp 8.744.904.562,- dan telah diserap sebanyak Rp 7.437.578.238,-.

Meskipun demikian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Wonogiri masih menghadapi berbagai kendala dan hambatan yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja. Kendala – kendala tersebut antara lain :

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Wonogiri adalah keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM). Meskipun pada Triwulan II telah dilakukan penambahan sebanyak 6 (enam) CPNS yang terdiri dari 4 (empat) Auditor dan 2 (dua) PPUPD, serta tambahan 1 (satu) CPNS PPUPD pada Triwulan IV, keberadaan SDM tersebut belum dapat memberikan kontribusi secara optimal pada Tahun 2025. Hal ini disebabkan karena CPNS yang baru direkrut masih berada pada tahap penyesuaian dan belum mengikuti pendidikan dan pelatihan pembentukan auditor. Kondisi tersebut berdampak pada efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan, mengingat SDM yang ada masih harus menanggung beban kerja yang relatif tinggi. Selain itu, kebutuhan akan penguatan kapasitas SDM, khususnya dalam pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan audit berbasis risiko, masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian pada periode selanjutnya.

2. Belum Optimalnya Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi

Implementasi SPIP Terintegrasi di sejumlah Perangkat Daerah di Kabupaten Wonogiri masih belum optimal. Sebenarnya Perangkat Daerah sudah menerapkan prinsip-prinsip pengendalian intern, seperti penyusunan pemetaan risiko, pemantauan berkala, dan pengendaliannya. Hanya saja hal ini masih belum optimal, masih terdapat beberapa kekurangan seperti dalam penentuan skor risiko dan rencana pengendalian yang kurang efektif

sehingga masih memunculkan potensi terjadinya kelemahan dalam sistem pengawasan internal di lingkungan pemerintahan daerah.

3. Rendahnya Kesadaran dan Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap Pengawasan Internal

Beberapa Perangkat Daerah di Kabupaten Wonogiri masih memandang proses audit dan pengawasan sebagai beban administrasi. Rendahnya kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya pengawasan internal menyebabkan keterlambatan dalam penyampaian laporan, tidak lengkapnya data pendukung, serta adanya resistensi terhadap proses audit. Ini dapat memperlambat pelaksanaan program pengawasan yang efektif.

4. Kendala Teknologi dan Sistem Informasi Pengawasan yang Terintegrasi

Pemanfaatan teknologi dalam sistem pengawasan masih belum optimal. Penggunaan sistem informasi manajemen pengawasan yang terintegrasi antara Perangkat Daerah dan Inspektorat masih menghadapi berbagai kendala, seperti infrastruktur teknologi yang belum optimal dan kurangnya SDM yang memahami teknologi tersebut. Ini mempengaruhi akurasi dan kecepatan pelaporan kinerja hasil pengawasan. Beberapa aplikasi yang mendukung kegiatan pengawasan seperti E-Sakip, Siswaskeudes dan SIMHP masih perlu dioptimalkan menyesuaikan kebutuhan pengawasan.

5. Respon Aktif terhadap Rekomendasi Hasil Pengawasan

Belum maksimalnya tingkat respon aktif dari Perangkat Desa dan sebagian Perangkat Daerah terhadap rekomendasi hasil pengawasan. Meskipun Inspektorat telah memberikan saran perbaikan dan rekomendasi pasca pengawasan, tidak semua Perangkat Desa dan sebagian Perangkat Daerah menindaklanjuti dengan respon yang cepat dan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini menyebabkan perbaikan kinerja organisasi berjalan lebih lambat.

Namun demikian dengan keterbatasan sumber daya serta kendala-kendala lainnya yang dihadapi, Inspektorat Kabupaten Wonogiri telah berusaha dengan optimal untuk tetap konsisten terhadap rencana kegiatan yang telah ditetapkan.

4.2. REKOMENDASI

Strategi pemecahan masalah yang akan ditempuh oleh Inspektorat Kabupaten Wonogiri pada tahun-tahun mendatang untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia Inspektorat Kabupaten Wonogiri dengan upaya terus mengajukan rekrutmen SDM baru dan mengikutsertakan dalam pelatihan teknis dan fungsional terutama sertifikasi auditor, sehingga terbentuk aparatur pengawasan yang tangguh, handal dan profesional.
2. Mengupayakan peningkatan kesadaran para Pimpinan OPD dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah maupun tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional pemerintah, melalui sosialisasi dalam setiap kesempatan rapat dinas dan koordinasi.
3. Untuk mengatasi kendala teknologi dan sistem informasi pengawasan yang terintegrasi, perlu dilakukan peningkatan infrastruktur teknologi, pengembangan sistem yang mudah diakses, serta pelatihan SDM agar mampu menggunakan teknologi tersebut. Selain itu, monitoring dan evaluasi berkala, serta dukungan kebijakan dan anggaran yang memadai juga penting untuk memastikan sistem pengawasan berjalan efektif dan efisien.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 ini telah kami susun secara obyektif dengan mengacu kepada nilai-nilai transparansi dan akuntabel. Saran dan masukan positif sangat kami harapkan agar tujuan penyusunan LKjIP dapat tercapai dengan lebih baik.

Wonogiri, 19 Februari 2026

Inspektur Kabupaten Wonogiri,



Mardianto, S.E.
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19710124 199903 1 002

LAMPIRAN

PENETAPAN

**RENCANA KINERJA
TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2025**

DAN

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Rencana Kinerja Tahunan (Tahun 2025) INSPEKTORAT

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025
1	Meningkatkan efektivitas peran APIP dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1. Levelling Kapabilitas APIP / (Internal Audit Capacity Models/IACM)	Level	3
2	Mewujudkan tata kelola pemerintahan Inspektorat yang baik	2. Indeks Penutupan Manajemen Risiko	Indeks	3
3	Meningkatnya efektivitas pengawasan	3. Nilai kematangan organisasi Inspektorat	Nilai	43
4	Meningkatnya kinerja Inspektorat	4. Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3
		5. Nilai SAKIP Inspektorat	Nilai	83
		6. Indeks profesionalitas ASN Inspektorat	Indeks	88.5
		7. Jumlah ASN Inspektorat yang menjadi agen perubahan	Orang/tahun	4
		8. Jumlah Inovasi Inspektorat	Buah	0
		9. IKM Inspektorat	Indeks	86

Wongiri, 7 Januari 2025



INSPEKTUR
M. HENDIANTO, S.E.
07100241989031003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MARDIANTO, S.E
Jabatan : INSPEKTUR

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : JOKO SUTOPO
Jabatan : Bupati Wonogiri

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonogiri, 07 Januari 2025

Pihak Kedua,

JOKO SUTOPO

Pihak Pertama,

MARDIANTO, S.E

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

SKPD : INSPEKTORAT
TAHUN ANGGARAN : 2025

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1	2	3		4
1	Meningkatkan efektifitas peran APIP dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1.	Levelling Kapabilitas APIP /(Internal Audit Capacity Models/IACM)	3 Level
		2.	Indeks Penerapan Manajemen Resiko	3 Indeks
2	Mewujudkan tata kelola pemerintahan Inspektorat yang baik	3.	Nilai kematangan organisasi Inspektorat	43 Nilai
3	Meningkatnya efektivitas pengawasan	4.	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3 Level
4	Meningkatnya kinerja Inspektorat	5.	Nilai SAKIP Inspektorat	83 Nilai
		6.	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat	88,5 Indeks
		7.	Jumlah ASN Inspektorat yang menjadi agen perubahan	4 Orang/tahun
		8.	Jumlah Inovasi Inspektorat	0 Buah
		9.	IKM Inspektorat	86 Indeks

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	85.293.767	APBD
2	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	61.197.150	APBD
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	80.085.846	APBD
4	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	5.000.000	APBD
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	60.361.503	APBD
6	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	260.074.776	APBD
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	104.707.952	APBD
8	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	5.000.000	APBD
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	95.150.932	APBD
10	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	5.000.000	APBD
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.818.027.112	APBD
TOTAL		8.579.899.038	

Wonogiri, 07 Januari 2025





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MULYANTO, S.E.

Jabatan : Sekretaris

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : MARDIANTO, S.E

Jabatan : Inspektur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonogiri, 08 Januari 2025



Pihak Pertama,

MULYANTO, S.E.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

SKPD : INSPEKTORAT
TAHUN ANGGARAN : 2025

No	Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1	Terselenggaranya tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Persentase tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100 %
1.1	Terselenggaranya penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100 %
1.2	Terselenggaranya administrasi keuangan daerah yang disusun	Persentase administrasi keuangan daerah yang disusun	100 %
1.3	Terselenggaranya administrasi barang daerah pada Perangkat Daerah yang disusun	Persentase administrasi barang daerah pada Perangkat Daerah yang disusun	100 %
1.4	Terselenggaranya tertib administrasi kepegawaian	Persentase tertib administrasi kepegawaian	100 %
1.5	Terselenggaranya fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah	100 %
1.6	Terselenggaranya pelaksanaan pengadaan barang milik daerah	Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah	100 %
1.7	Terselenggaranya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %
1.8	Terselenggaranya pemeliharaan barang milik daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100 %

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	999.940	APBD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	177.199.530	APBD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.970.473.755	APBD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	222.657.400	APBD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	113.576.887	APBD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	69.685.700	APBD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	259.433.900	APBD
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000	APBD
TOTAL		7.818.027.112	

Wonogiri, 08 Januari 2025



Sekretaris

MULYANTO, S.E.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. EDY MARTONO, M.M

Jabatan : Inspektur Pembantu Bidang Aparatur dan Administrasi Pemerintahan

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : MARDIANTO, S.E

Jabatan : Inspektur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonogiri, 08 Januari 2025



Pihak Pertama,

Drs. EDY MARTONO, M.M

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

SKPD : INSPEKTORAT
TAHUN ANGGARAN : 2025

No	Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terealisasinya pengawasan sesuai PKPT	Persentase realisasi pengawasan sesuai PKPT	100 %
1.1	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	40 Laporan
1.1.1	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Laporan
1.1.2	Tersusunnya Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	21 Laporan
1.1.3	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	8 Laporan
1.1.4	Tersusunnya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	8 Dokumen
1.1.5	Terealisasinya Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan
1.2	Tersusunnya laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	26 Laporan
1.2.1	Tersusunnya laporan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	26 Laporan
2	Terealisasinya Reformasi Birokrasi Komponen Penguatan Pengawasan	Persentase realisasi Reformasi Birokrasi Komponen Penguatan Pengawasan	100 %
2.1	Tersusunnya laporan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah laporan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	4 Laporan
2.1.1	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi
2.1.2	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi

No	Sasaran Program dan SasaranKegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
2.2	Tersusunnya laporan pendampingan dan Asistensi	Jumlah laporan pendampingan dan Asistensi	5 Laporan
2.2.1	Terealisasinya Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	53 Perangkat Daerah
2.2.2	Terealisasinya Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	53 Perangkat Daerah
2.2.3	Terealisasinya Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1 Kegiatan
2.2.4	Terealisasinya Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	53 Perangkat Daerah

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	48.408.735	APBD
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	6.606.040	APBD
	Reviu Laporan Kinerja	9.053.588	APBD
	Pengawasan Desa	29.549.107	APBD
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	3.000.000	APBD
	Kerjasama Pengawasan Internal	200.000	APBD
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	36.885.032	APBD
	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	36.885.032	APBD
2	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	5.000.000	APBD
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	1.000.000	APBD
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	4.000.000	APBD
	Pendampingan dan Asistensi	56.197.150	APBD
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	40.000.000	APBD
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10.197.150	APBD
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	3.000.000	APBD
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	3.000.000	APBD
	TOTAL	146.490.917	

Wonogiri, 8 Januari 2025

Inspektur



MARDIANTO, S.E

Inspektur Pembantu Bidang Aparatur dan Administrasi Pemerintahan



Drs. EDY MARTONO, M.M



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEWI ATTUTIANINGRUM, S.Sos., M.M

Jabatan : Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset Daerah

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : MARDIANTO, S.E

Jabatan : Inspektur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonogiri, 08 Januari 2025



Pihak Pertama,

DEWI ATTUTIANINGRUM, S.Sos., M.M

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

SKPD : INSPEKTORAT
TAHUN ANGGARAN : 2025

No	Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terealisasinya pengawasan sesuai PKPT	Persentase realisasi pengawasan sesuai PKPT	100 %
1.1	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	20 Laporan
1.1.1	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Laporan
1.1.2	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	5 Laporan
1.1.3	Tersusunnya Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	6 Laporan
1.1.4	Tersusunnya Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan
1.1.5	Tersusunnya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	5 Laporan
1.1.6	Terealisasinya Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan
1.2	Tersusunnya laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	24 Laporan
1.2.1	Tersusunnya Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan
1.2.2	Tersusunnya laporan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	22 Laporan
2	Terealisasinya Reformasi Birokrasi Komponen Penguatan Pengawasan	Persentase realisasi Reformasi Birokrasi Komponen Penguatan Pengawasan	100 %
2.1	Tersusunnya laporan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah laporan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	4 Laporan

No	Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
2.1.1	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi
2.1.2	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	51.785.836	APBD
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	6.606.040	APBD
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	26.000.000	APBD
	Reviu Laporan Kinerja	979.796	APBD
	Reviu Laporan Keuangan	8.000.000	APBD
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	10.000.000	APBD
	Kerjasama Pengawasan Internal	200.000	APBD
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	43.365.096	APBD
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	1.600.000	APBD
	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	41.765.096	APBD
2	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	5.000.000	APBD
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	1.000.000	APBD
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	4.000.000	APBD
TOTAL		100.150.932	

Wonogiri, 8 Januari 2025

Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset Daerah



DEWI ATTUTIANINGRUM, S.Sos., M.M



Inspektur

MARDIANTO, S.E



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SRIYONO, S.Sos, M.M

Jabatan : Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : MARDIANTO, S.E

Jabatan : Inspektur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonogiri, 08 Januari 2025

Pihak Pertama,

SRIYONO, S.Sos, M.M

Pihak Kedua,



MARDIANTO, S.E

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

SKPD : INSPEKTORAT
TAHUN ANGGARAN : 2025

No	Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terealisasinya pengawasan sesuai PKPT	Persentase realisasi pengawasan sesuai PKPT	100 %
1.1	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	28 Laporan
1.1.1	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Laporan
1.1.2	Tersusunnya Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	9 Laporan
1.1.3	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	8 Laporan
1.1.4	Tersusunnya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	8 Dokumen
1.1.5	Terealisasinya Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan
1.2	Tersusunnya laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	23 Laporan
1.2.1	Tersusunnya laporan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	23 Laporan
2	Terealisasinya Reformasi Birokrasi Komponen Penguatan Pengawasan	Persentase realisasi Reformasi Birokrasi Komponen Penguatan Pengawasan	100 %
2.1	Tersusunnya laporan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah laporan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	4 Laporan
2.1.1	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi
2.1.2	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	41.755.241	APBD
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	6.606.040	APBD
	Reviu Laporan Kinerja	1.794.694	APBD
	Pengawasan Desa	30.154.507	APBD
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	3.000.000	APBD
	Kerjasama Pengawasan Internal	200.000	APBD
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	38.330.605	APBD
	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	38.330.605	APBD
2	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	5.000.000	APBD
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	1.000.000	APBD
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	4.000.000	APBD
TOTAL		85.085.846	



Wonogiri, 8 Januari 2025

Inspektur Pembantu Bidang
Ekonomi dan Pembangunan

SRIYONO, S.Sos., M.M



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SARDJITO, S.Sos.M.H

Jabatan : Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : MARDIANTO, S.E

Jabatan : Inspektur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonogiri, 08 Januari 2025



Pihak Pertama,

SARDJITO, S.Sos.M.H

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

SKPD : INSPEKTORAT
TAHUN ANGGARAN : 2025

No	Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terealisasinya pengawasan sesuai PKPT	Persentase realisasi pengawasan sesuai PKPT	100 %
1.1	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	27 Laporan
1.1.1	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Laporan
1.1.2	Tersusunnya Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	8 Laporan
1.1.3	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	8 Laporan
1.1.4	Tersusunnya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	8 Dokumen
1.1.5	Terealisasinya Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan
1.2	Tersusunnya laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	20 Laporan
1.2.1	Tersusunnya laporan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	20 Laporan
2	Terealisasinya Reformasi Birokrasi Komponen Penguatan Pengawasan	Persentase realisasi Reformasi Birokrasi Komponen Penguatan Pengawasan	100 %
2.1	Tersusunnya laporan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah laporan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	4 Laporan
2.1.1	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi
2.1.2	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	75.036.774	APBD
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	6.605.040	APBD
	Reviu Laporan Kinerja	1.577.228	APBD
	Pengawasan Desa	29.654.506	APBD
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	37.000.000	APBD
	Kerjasama Pengawasan Internal	200.000	APBD
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	29.671.178	APBD
	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	29.671.178	APBD
2	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	5.000.000	APBD
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	1.000.000	APBD
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	4.000.000	APBD
TOTAL		109.707.952	

Wonogiri, 8 Januari 2025

Inspektur Pembantu Bidang
Kesejahteraan Rakyat

SARDJITO, S.Sos., M.H





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARIS DEWI ANGGRAINI, S.E, M.M
Jabatan : Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : MARDIANTO, S.E
Jabatan : Inspektur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonogiri, 08 Januari 2025



Pihak Kedua,

MARDIANTO, S.E

Pihak Pertama,

ARIS DEWI ANGGRAINI, S.E, M.M

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

SKPD : INSPEKTORAT
TAHUN ANGGARAN : 2025

No	Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terealisasinya pengawasan sesuai PKPT	Persentase realisasi pengawasan sesuai PKPT	100 %
1.1	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	25 Laporan
1.1.1	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan
1.1.2	Tersusunnya Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	9 Laporan
1.1.3	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	6 Laporan
1.1.4	Tersusunnya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	8 Dokumen
1.1.5	Terealisasinya Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan
1.2	Tersusunnya laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	10 Laporan
1.2.1	Tersusunnya laporan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	10 Laporan
2	Terealisasinya Reformasi Birokrasi Komponen Penguatan Pengawasan	Persentase realisasi Reformasi Birokrasi Komponen Penguatan Pengawasan	100 %
2.1	Tersusunnya laporan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah laporan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	4 Laporan
2.1.1	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi
2.1.2	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi

No	Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
2.2	Tersusunnya laporan pendampingan dan Asistensi	Jumlah laporan pendampingan dan Asistensi	4 Laporan
2.2.3	Terealisasinya Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	31.013.414	APBD
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	3.576.840	APBD
	Reviu Laporan Kinerja	1.594.694	APBD
	Pengawasan Desa	22.641.880	APBD
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	3.000.000	APBD
	Kerjasama Pengawasan Internal	200.000	APBD
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	9.348.089	APBD
	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	29.348.089	APBD
2	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	5.000.000	APBD
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	1.000.000	APBD
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	4.000.000	APBD
	Pendampingan dan Asistensi	255.074.776	APBD
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	255.074.776	APBD
TOTAL		320.436.279	

Wonogiri, 8 Januari 2025

Inspektur Pembantu Bidang
Pencegahan dan
Investigasi



ARIS DEWI ANGGRAINI,
S.E.,M.M

Inspektur



MARZANTO, S.E



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MURNI HASTUTI, S.E., M.M
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : MULYANTO, S.E.
Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonogiri, 07 Januari 2025

Pihak Kedua,

MULYANTO, S.E.

Pihak Pertama,

MURNI HASTUTI, S.E., M.M

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

SKPD : INSPEKTORAT
TAHUN ANGGARAN : 2025

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen
2	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan
3	Tersusunnya Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik	5 Dokumen
4	Terealisasinya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	8 Unit
5	Tersusunnya Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24 Dokumen
6	Tersusunnya Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen
7	Tersusunnya Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen
8	Terealisasinya Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang
9	Terealisasinya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
10	Terealisasinya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
11	Terealisasinya Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket
12	Terealisasinya Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
13	Terealisasinya Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
14	Tersusunnya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen
15	Terealisasinya Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	20 Laporan
16	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan
17	Tersusunnya Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen
18	Tersusunnya Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
19	Terealisasinya Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit
20	Terealisasinya Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit
21	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan
22	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
23	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan
24	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
25	Terealisasinya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit
26	Terealisasinya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit
27	Terealisasinya Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit
28	Terealisasinya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit
29	Terealisasinya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
	<i>Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>	999.940	APBD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
	<i>Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>	1.999.810	APBD
	<i>Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>	999.860	APBD
	<i>Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	2.000.000	APBD
	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	171.200.000	APBD
	<i>Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i>	999.860	APBD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	<i>Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	999.860	APBD
	<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	8.048.000	APBD
	<i>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	999.150	APBD
	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	2.400.000	APBD
	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	39.499.800	APBD
	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	19.999.980	APBD
	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	1.997.000	APBD
	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	54.999.110	APBD
	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	1.795.200	APBD
	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	91.919.300	APBD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	<i>Pemeliharaan Mebel</i>	2.000.000	APBD
	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	4.990.000	APBD
	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	6.704.000	APBD
	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	19.694.270	APBD
	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	80.188.617	APBD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	63.820.000	APBD
	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	5.865.700	APBD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	53.600.000	APBD
	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	192.833.900	APBD
	<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	9.000.000	APBD
	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	4.000.000	APBD

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	2.000.000	APBD
	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	2.000.000	APBD
	TOTAL	847.553.357	

Wonogiri, 07 Januari 2025

Sekretaris


MULYANTO, S.E.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian


MURNI HASTUTI, S.E., M.M



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LANTIN ISTINGGAR, S.E., M.M

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : MULYANTO, S.E.

Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonogiri, 07 Januari 2025

Pihak Kedua,

MULYANTO, S.E.

Pihak Pertama,

LANTIN ISTINGGAR, S.E., M.M

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

SKPD : INSPEKTORAT
TAHUN ANGGARAN : 2025

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terealisasinya Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 orang/bulan
2	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
3	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	1.000.000	APBD
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	1.000.000	APBD
	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	6.968.473.755	APBD
	TOTAL	6.970.473.755	

Wonogiri, 07 Januari 2025

Sekretaris


MULYANTO, S.E.

Kepala Sub Bagian Keuangan


LANTIN ISTINGGAR, S.E., M.M.

PERUBAHAN

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MARDIANTO, S.E.

Jabatan : Inspektur

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SETYO SUKARNO

Jabatan : Bupati Wonogiri

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonogiri, 01 September 2025

Pihak Kedua,

SETYO SUKARNO

Pihak Pertama,

MARDIANTO, S.E.

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

NAMA OPD : INSPEKTORAT
TAHUN ANGGARAN : 2025

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tujuan		
1.1	Meningkatkan efektivitas peran APIP dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Levelling Kapabilitas APIP/ <i>Internal Audit Capacity Models</i> (IACM)	3 Level
		Indeks Penerapan Manajemen Risiko	3,023 Indeks
1.2	Mewujudkan tata kelola pemerintahan Inspektorat yang baik	Nilai Kematangan Organisasi Inspektorat	43 Nilai
2.	Sasaran Strategis		
2.1	Meningkatnya efektivitas pengawasan	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3 Level
2.2	Meningkatnya kinerja Inspektorat	Nilai SAKIP Inspektorat	83 Nilai
		Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat	88,5 Indeks
		Jumlah ASN Inspektorat yang menjadi Agen Perubahan	4 Orang/tahun
		Jumlah Inovasi Inspektorat	1 Buah
		IKM Inspektorat	86 Indeks

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 262.910.250,00	
2.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 197.459.900,00	
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten / Kota	Rp. 8.284.534.412,00	
TOTAL		Rp. 8.744.904.562,00	

Wonogiri, 01 September 2025



Bupati Wonogiri,

SETYO SUKARNO



Inspektur,

MARDIANTO, S.E.



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mulyanto, S.E.

Jabatan : Sekretaris

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Mardianto, S.E.

Jabatan : Inspektur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonogiri, 01 September 2025

Pihak Kedua,



MARDIANTO, S.E.

Pihak Pertama,

MULYANTO, S.E.

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

SKPD : INSPEKTORAT
TAHUN ANGGARAN : 2025

No	Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1	Terselenggaranya tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Persentase tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100 %
1.1	Terselenggaranya penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100 %
1.2	Terselenggaranya administrasi keuangan daerah yang disusun	Persentase administrasi keuangan daerah yang disusun	100 %
1.3	Terselenggaranya administrasi barang daerah pada Perangkat Daerah yang disusun	Persentase administrasi barang daerah pada Perangkat Daerah yang disusun	100 %
1.4	Terselenggaranya tertib administrasi kepegawaian	Persentase tertib administrasi kepegawaian	100 %
1.5	Terselenggaranya fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah	100 %
1.6	Terselenggaranya pelaksanaan pengadaan barang milik daerah	Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah	100 %
1.7	Terselenggaranya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %
1.8	Terselenggaranya pemeliharaan barang milik daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100 %

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	999.940	APBD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	154.346.130	APBD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.494.023.755	APBD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	135.313.100	APBD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	126.576.887	APBD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	119.685.700	APBD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	251.133.900	APBD
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.455.000	APBD
TOTAL		8.284.534.412	

Wonogiri, 01 September 2025



 Inspektur
 MARDIANTO, S.E

Sekretaris

 MULYANTO, S.E.



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SARDJITO, S.Sos., M.H.

Jabatan : Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MARDIANTO, S.E.

Jabatan : Inspektur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonogiri, 01 September 2025



Pihak Kedua,

MARDIANTO, S.E.

Pihak Pertama,

SARDJITO, S.Sos., M.H.

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

NAMA OPD : INSPEKTORAT
TAHUN ANGGARAN : 2025

No	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Sasaran Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terealisasinya pengawasan sesuai PKPT	Persentase Realisasi Pengawasan sesuai PKPT	100%
1.1.	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	27 Laporan
1.1.1	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Laporan
1.1.2	Tersusunnya Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	8 Laporan
1.1.3	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	8 Laporan
1.1.4	Tersusunnya Dokumen Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	8 Dokumen
1.1.5	Terealisasinya Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan
1.2.	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	30 Laporan
1.2.1	Tersusunnya Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	30 Laporan
2.	Terealisasinya Reformasi Birokrasi Komponen Penguatan Pengawasan	Persentase Realisasi Reformasi Birokrasi Komponen Penguatan Pengawasan	100%
2.1.	Tersusunnya Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	4 Laporan

(1)	(2)	(3)	(4)
2.1.1	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi
2.1.2	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 79.983.640,00	APBD
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Rp. 48.541.440,00	APBD
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp. 3.430.000,00	APBD
	Reviu Laporan Kinerja	Rp. 2.000.000,00	APBD
	Pengawasan Desa	Rp. 12.335.040,00	APBD
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Rp. 30.576.400,00	APBD
	Kerjasama Pengawasan Internal	Rp. 200.000,00	APBD
	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Rp. 31.442.200,00	APBD
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Rp. 31.442.200,00	APBD
2.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 2.661.000,00	APBD
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Rp. 2.661.000,00	APBD
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Rp. 550.000,00	APBD
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Rp. 2.111.000,00	APBD
TOTAL		Rp. 82.644.640,00	APBD

Wonogiri, 01 September 2025

Inspektur



MARDIANTO, S.E.

Inspektur Pembantu
Bidang Kesejahteraan Rakyat



SARDJITO, S.Sos., M.H.



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARIS DEWI ANGGRAINI, S.E., M.M.

Jabatan : Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MARDIANTO, S.E.

Jabatan : Inspektur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonogiri, 01 September 2025

Pihak Kedua,



MARDIANTO, S.E.

Pihak Pertama,

ARIS DEWI ANGGRAINI, S.E., M.M.

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

NAMA OPD : INSPEKTORAT
TAHUN ANGGARAN : 2025

No	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Sasaran Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terealisasinya pengawasan sesuai PKPT	Persentase Realisasi Pengawasan sesuai PKPT	100%
1.1.	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	25 Laporan
1.1.1	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan
1.1.2	Tersusunnya Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	9 Laporan
1.1.3	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	6 Laporan
1.1.4	Tersusunnya Dokumen Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	8 Dokumen
1.1.5	Terealisasinya Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan
1.2.	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	10 Laporan
1.2.1	Tersusunnya Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	10 Laporan
2.	Terealisasinya Reformasi Birokrasi Komponen Penguatan Pengawasan	Persentase Realisasi Reformasi Birokrasi Komponen Penguatan Pengawasan	100%
2.1.	Tersusunnya Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	4 Laporan

(1)	(2)	(3)	(4)
2.1.1	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi
2.1.2	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi
2.2	Tersusunnya Laporan Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi	4 Laporan
2.2.3	Terealisasinya Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 73.609.480,00	APBD
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Rp. 18.609.480,00	APBD
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp. 2.918.200,00	APBD
	Reviu Laporan Kinerja	Rp. 2.000.000,00	APBD
	Pengawasan Desa	Rp. 11.461.280,00	APBD
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Rp. 2.030.000,00	APBD
	Kerjasama Pengawasan Internal	Rp. 200.000,00	APBD
	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Rp. 55.000.000,00	APBD
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Rp. 55.000.000,00	APBD
2.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 153.682.200,00	APBD
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Rp. 2.661.000,00	APBD
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Rp. 550.000,00	APBD
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Rp. 2.111.000,00	APBD
	Pendampingan dan Asistensi	Rp. 151.021.200,00	APBD
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Rp. 151.021.200,00	APBD
TOTAL		Rp. 227.291.680,00	APBD

Wonogiri, 01 September 2025



MARDIANTO, S.E.

Inspektur Pembantu
Bidang Pencegahan dan Investigasi

ARIS DEWI ANGGRAINI, S.E., M.M.



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DEWI ATTUTIANINGRUM, S.Sos., M.M.

Jabatan : Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MARDIANTO, S.E.

Jabatan : Inspektur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonogiri, 01 September 2025

Pihak Kedua,

MARDIANTO, S.E.

Pihak Pertama,

DEWI ATTUTIANINGRUM, S.Sos., M.M.

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

NAMA OPD : INSPEKTORAT
TAHUN ANGGARAN : 2025

No	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Sasaran Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terealisasinya pengawasan sesuai PKPT	Persentase Realisasi Pengawasan sesuai PKPT	100%
1.1.	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	20 Laporan
1.1.1	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Laporan
1.1.2	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	5 Laporan
1.1.3	Tersusunnya Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	6 Laporan
1.1.4	Tersusunnya Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan
1.1.5	Tersusunnya Dokumen Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	5 Dokumen
1.1.6	Terealisasinya Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan
1.2.	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	31 Laporan
1.2.1	Tersusunnya Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang Ditangani	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang Ditangani	2 Laporan
1.2.2	Tersusunnya Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	29 Laporan

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Terealisasinya Reformasi Birokrasi Komponen Penguatan Pengawasan	Persentase Realisasi Reformasi Birokrasi Komponen Penguatan Pengawasan	100%
2.1.	Tersusunnya Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	4 Laporan
2.1.1	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi
2.1.2	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 27.027.050,00	APBD
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Rp. 19.877.050,00	APBD
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp. 3.430.000,00	APBD
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp. 7.095.000,00	APBD
	Reviu Laporan Kinerja	Rp. 863.200,00	APBD
	Reviu Laporan Keuangan	Rp. 6.258.850,00	APBD
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Rp. 2.030.000,00	APBD
	Kerjasama Pengawasan Internal	Rp. 200.000,00	APBD
	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Rp. 7.150.000,00	APBD
	Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Rp. 1.150.000,00	APBD
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Rp. 6.000.000,00	APBD
2.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 2.661.000,00	APBD
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Rp. 2.661.000,00	APBD
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Rp. 550.000,00	APBD
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Rp. 2.111.000,00	APBD
TOTAL		Rp. 29.688.050,00	APBD

Wonogiri, 01 September 2025

Inspektur

MARDIANTO, S.E.

Inspektur Pembantu
Bidang Keuangan dan Aset Daerah

DEWI ATTUTIANINGRUM, S.Sos., M.M.



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DEWI ATTUTIANINGRUM, S.Sos., M.M.

Jabatan : Plt. Inspektur Pembantu Bidang Aparatur dan Administrasi Pemerintahan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MARDIANTO, S.E.

Jabatan : Inspektur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonogiri, 01 September 2025



Pihak Kedua,

MARDIANTO, S.E.

Pihak Pertama,

DEWI ATTUTIANINGRUM, S.Sos., M.M.

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

NAMA OPD : INSPEKTORAT
TAHUN ANGGARAN : 2025

No	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Sasaran Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terealisasinya pengawasan sesuai PKPT	Persentase Realisasi Pengawasan sesuai PKPT	100%
1.1.	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	14 Laporan
1.1.1	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan
1.1.2	Tersusunnya Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 Laporan
1.1.3	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	6 Laporan
1.1.4	Tersusunnya Dokumen Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	5 Dokumen
1.1.5	Terealisasinya Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan
1.2.	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	14 Laporan
1.2.1	Tersusunnya Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	14 Laporan
2.	Terealisasinya Reformasi Birokrasi Komponen Penguatan Pengawasan	Persentase Realisasi Reformasi Birokrasi Komponen Penguatan Pengawasan	100%
2.1.	Tersusunnya Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	2 Laporan

(1)	(2)	(3)	(4)
2.1.1	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi
2.1.2	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi
2.2	Tersusunnya Laporan Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi	5 Laporan
2.2.1	Terealisasinya Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	53 Perangkat Daerah
2.2.2	Terealisasinya Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	53 Perangkat Daerah
2.2.3	Terealisasinya Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1 Kegiatan
2.2.4	Terealisasinya Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	53 Perangkat Daerah

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 36.835.040,00	APBD
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Rp. 17.535.040,00	APBD
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp. 3.230.000,00	APBD
	Reviu Laporan Kinerja	Rp. 1.300.000,00	APBD
	Pengawasan Desa	Rp. 11.135.040,00	APBD
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Rp. 1.730.000,00	APBD
	Kerjasama Pengawasan Internal	Rp. 140.000,00	APBD
	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Rp. 19.300.000,00	APBD

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Rp. 19.300.000,00	APBD
2.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 23.484.700,00	APBD
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Rp. 1.851.000,00	APBD
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Rp. 440.000,00	APBD
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Rp. 1.411.000,00	APBD
	Pendampingan dan Asistensi	Rp. 21.633.700,00	APBD
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 16.635.500,00	APBD
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Birokrasi	Rp. 3.355.000,00	APBD
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Rp. 300.000,00	APBD
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Rp. 1.343.200,00	APBD
TOTAL		Rp. 60.319.740,00	APBD

Wonogiri, 01 September 2025

Inspektur



MARDIANTO, S.E.

Plt. Inspektur Pembantu
Bidang Aparatur dan Administrasi
Pemerintahan



DEWI ATTUTIANINGRUM, S.Sos., M.M.



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. EDY MARTONO, M.M

Jabatan : Inspektur Pembantu Bidang Aparatur dan Administrasi Pemerintahan

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : MARDIANTO, S.E

Jabatan : Inspektur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

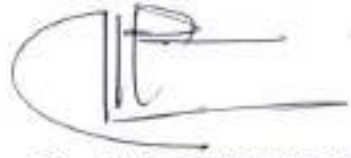
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonogiri, 30 Juli 2025

Pihak Kedua,

MARDIANTO, S.E

Pihak Pertama,

Drs. EDY MARTONO, M.M

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

SKPD : INSPEKTORAT
TAHUN ANGGARAN : 2025

No	Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terealisasinya pengawasan sesuai PKPT	Persentase realisasi pengawasan sesuai PKPT	100 %
1.1	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	28 Laporan
1.1.1	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan
1.1.2	Tersusunnya Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	21 Laporan
1.1.3	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	2 Laporan
1.1.4	Tersusunnya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	3 Dokumen
1.1.5	Terealisasinya Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan
1.2	Tersusunnya laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	14 Laporan
1.2.1	Tersusunnya laporan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	14 Laporan
2	Terealisasinya Reformasi Birokrasi Komponen Penguatan Pengawasan	Persentase realisasi Reformasi Birokrasi Komponen Penguatan Pengawasan	100 %
2.1	Tersusunnya laporan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah laporan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	2 Laporan
2.1.1	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi
2.1.2	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi
2.2	Tersusunnya laporan pendampingan dan Asistensi	Jumlah laporan pendampingan dan Asistensi	5 Laporan
2.2.1	Terealisasinya Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	53 Perangkat Daerah
2.2.2	Terealisasinya Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	53 Perangkat Daerah

No	Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
2.2.3	Terealisasinya Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1 Kegiatan
2.2.4	Terealisasinya Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	53 Perangkat Daerah

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	3.760.000	APBD
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	200.000	APBD
	Revisi Laporan Kinerja	700.000	APBD
	Pengawasan Desa	2.500.000	APBD
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	300.000	APBD
	Kerjasama Pengawasan Internal	60.000	APBD
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	6.700.000	APBD
	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	6.700.000	APBD
2	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	810.000	APBD
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	110.000	APBD
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	700.000	APBD
	Pendampingan dan Asistensi	11.500.000	APBD
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	8.400.000	APBD
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	200.000	APBD
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2.700.000	APBD
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	200.000	APBD
TOTAL		22.770.000	



Wonogiri, 30 Juli 2025

Inspektur Pembantu Bidang Aparatur
dan Administrasi Pemerintahan


Drs. EDY MARTONO, M.M



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SRIYONO, S.Sos., M.M.

Jabatan : Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MARDIANTO, S.E.

Jabatan : Inspektur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonogiri, 01 September 2025



Pihak Kedua,

MARDIANTO, S.E.

Pihak Pertama,

SRIYONO, S.Sos., M.M.

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

NAMA OPD : INSPEKTORAT
TAHUN ANGGARAN : 2025

No	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Sasaran Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terealisasinya pengawasan sesuai PKPT	Persentase Realisasi Pengawasan sesuai PKPT	100%
1.1.	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	28 Laporan
1.1.1	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Laporan
1.1.2	Tersusunnya Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	9 Laporan
1.1.3	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	8 Laporan
1.1.4	Tersusunnya Dokumen Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	8 Dokumen
1.1.5	Terealisasinya Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan
1.2.	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	28 Laporan
1.2.1	Tersusunnya Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	28 Laporan
2.	Terealisasinya Reformasi Birokrasi Komponen Penguatan Pengawasan	Persentase Realisasi Reformasi Birokrasi Komponen Penguatan Pengawasan	100%
2.1.	Tersusunnya Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	4 Laporan

(1)	(2)	(3)	(4)
2.1.1	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi
2.1.2	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 34.995.040,00	APBD
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Rp. 19.995.040,00	APBD
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp. 3.430.000,00	APBD
	Reviu Laporan Kinerja	Rp. 2.000.000,00	APBD
	Pengawasan Desa	Rp. 12.335.040,00	APBD
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Rp. 2.030.000,00	APBD
	Kerjasama Pengawasan Internal	Rp. 200.000,00	APBD
	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Rp. 15.000.000,00	APBD
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Rp. 15.000.000,00	APBD
2.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 2.661.000,00	APBD
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Rp. 2.661.000,00	APBD
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Rp. 550.000,00	APBD
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Rp. 2.111.000,00	APBD
TOTAL		Rp. 37.656.040,00	APBD

Wonogiri, 01 September 2025



Inspektur

MARDIANTO, S.E.

Inspektur Pembantu
Bidang Ekonomi dan Pembangunan

SRIYONO, S.Sos., M.M.



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MURNI HASTUTI, S.E., M.M
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : MULYANTO, S.E.
Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonogiri, 01 September 2025

Pihak Kedua,

MULYANTO, S.E.

Pihak Pertama,

MURNI HASTUTI, S.E., M.M

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

SKPD : INSPEKTORAT
TAHUN ANGGARAN : 2025

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen
2	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan
3	Tersusunnya Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik	5 Dokumen
4	Terealisasinya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	8 Unit
5	Tersusunnya Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24 Dokumen
6	Tersusunnya Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen
7	Tersusunnya Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen
8	Terealisasinya Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang
9	Terealisasinya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
10	Terealisasinya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
11	Terealisasinya Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket
12	Terealisasinya Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
13	Terealisasinya Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
14	Tersusunnya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen
15	Terealisasinya Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	20 Laporan
16	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan
17	Tersusunnya Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen
18	Tersusunnya Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen
19	Terealisasinya Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit
20	Terealisasinya Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit
21	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan
22	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
23	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan
24	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
25	Terealisasinya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit
26	Terealisasinya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit
27	Terealisasinya Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit
28	Terealisasinya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit
29	Terealisasinya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
	- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	999.940	APBD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
	- Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1.999.810	APBD
	- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	999.860	APBD
	- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.000.000	APBD
	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	148.346.600	APBD
	- Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	999.860	APBD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	999.860	APBD
	- Fasilitas Kunjungan Tamu	8.048.000	APBD
	- Penafusausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	999.150	APBD
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000	APBD
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.499.800	APBD
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.999.980	APBD
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.997.000	APBD
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.999.110	APBD
	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.795.200	APBD
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37.575.000	APBD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	- Pemeliharaan Mebel	2.000.000	APBD
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.990.000	APBD
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.704.000	APBD
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19.694.270	APBD
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	93.188.617	APBD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	113.820.000	APBD
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.865.700	APBD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47.300.000	APBD
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	192.833.900	APBD
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.000.000	APBD
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	APBD
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.400.000	APBD
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.055.000	APBD
	TOTAL	790.510.657	

Wonogiri, 01 September 2025

Sekretaris

MULYANTO, S.E.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

MURNI HASTUTI, S.E., M.M.

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

SKPD : INSPEKTORAT
TAHUN ANGGARAN : 2025

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terealisasinya Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 orang/bulan
2	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
3	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.000.000	APBD
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.000.000	APBD
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.492.023.755	APBD
	TOTAL	7.494.023.755	

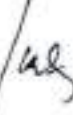
Wonogiri, 01 September 2025

Sekretaris



MULYANTO, S.E.

Kepala Sub Bagian Keuangan



LANTIN ISTINGGAR, S.E., M.M



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LANTIN ISTINGGAR, S.E., M.M
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : MULYANTO, S.E.
Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonogiri, 01 September 2025

Pihak Kedua,

MULYANTO, S.E.

Pihak Pertama,

LANTIN ISTINGGAR, S.E., M.M

RENCANA TINDAK DAN CAPAIAN AGEN PERUBAHAN TAHUN 2025

V. CAPAIAN RENCANA TINDAK.

Sebagai tindak lanjut atas penyusunan Rencana Kerja Agen Perubahan tersebut, telah dilaksanakan beberapa kegiatan dan pengendalian oleh Agen Perubahan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan hasil perbaikan secara berkelanjutan dalam meningkatkan kinerja organisasi khususnya terkait capaian penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.

Capaian dari rencana tindak agen perubahan pada tahun 2025 yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN	RENCANA KEGIATAN	CAPAIAN
1.	Meningkatnya efektivitas pengawasan	Menyusun kajian struktur organisasi Inspektorat untuk bahan evaluasi.	Telah menyusun kajian terkait kelembagaan Sekretariat Inspektorat dan disampaikan kepada Sekda melalui surat No. B/602/000.8.1/VI/2025 tgl. 23 Juni 2025 Hal Kajian Kelembagaan Inspektorat.
		Membentuk <i>squad team</i> dalam rangka pengelolaan temuan dan rekomendasi hasil pengawasan.	Telah diterbitkan SK Inspektur No. 19 Tahun 2025 tgl 1 Juli 2025 tentang Pembentukan Tim Pengelola Hasil Pengawasan Pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri.
		Pengarahan dan sosialisasi kebijakan pemantauan tindak lanjut.	Telah dilaksanakan Rakor dan pengarahan terkait pengelolaan hasil pengawasan pada tanggal 26-11-2026 berdasar nota dinas undangan Inspektur No. 120/700/1.2/XI/2025 tgl. 25 Nopember 2025
		Inventarisasi dan penyusunan daftar temuan pada masing-masing Bidang.	Telah dilaksanakan inventarisasi temuan dan rekomendasi hasil pengawasan dan rakor persiapan desk pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan. Undangan No.130/700/1.2.5/XII/2025 tanggal 12 Desember 2025.

		Pembuatan daftar undangan	Telah disusun undangan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan berdasar surat Sekda Kabupaten Wonogiri No. R/559/700/1.2.5/XII/2025 tgl 17 Desember 2025.
		Pelaksanaan rakorwas pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan	Telah diselenggarakan Rakor pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan terhadap 8 (delapan) obyek pengawasan pada Tgl. 23 Desember 2025
		Evaluasi SIM HP.	Telah dilaksanakan evaluasi SIM HP pada tanggal 30 Desember 2025 berdasar surat undangan No.136/700.1.2/XII/2025 tgl 29 Desember 2025.

VI. PENUTUP

Di dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 - 2025 yang bertujuan untuk mendorong pemerintahan yang efektif dan efisien, reformasi birokrasi dapat memberikan dampak signifikan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), meningkatkan kinerja Perangkat Daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dengan rencana tindak Agen Perubahan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Wonogiri dan meningkatkan capaian kinerja dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.

Wonogiri, 31 Desember 2025

Mengetahui,

INSPEKTUR
KABUPATEN WONOGIRI



MARDIANTO, S.E.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710124 199903 1 002

AGEN PERUBAHAN

MARDIANTO, S.E.
NIP. 19710124 199903 1 002

V. CAPAIAN RENCANA TINDAK

Sebagai tindak lanjut atas penyusunan Rencana Kerja Agen Perubahan tersebut, telah dirumuskan kebijakan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan dilaksanakan pengendalian kegiatan oleh Agen Perubahan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan hasil perbaikan secara berkelanjutan dalam meningkatkan kinerja organisasi.

Capaian dari rencana tindak yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN	RENCANA KEGIATAN	CAPAIAN
1.	Kualitas lingkungan fisik kantor	- pengecatan pagar gedung kantor - Perbaikan teras - Perbaikan taman	1. Pagar gedung kantor lebih rapi. 2. Atap dan Lisplang teras kantor lebih aman 3. Halaman kantor lebih bersih dan rapi.

Teras dan halaman gedung kantor sebelum dan sesudah perbaikan :



BEFORE



AFTER



VI. PENUTUP

Dengan rencana tindak Agen Perubahan ini diharapkan dapat memberikan kenyamanan dalam beraktivitas sehingga mampu meningkatkan produktivitas pegawai, yang pada akhirnya memberikan dampak positif terhadap pelayanan publik di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Wonogiri.

Wonogiri, 27 November 2025



Mengetahui,
INSPEKTUR,

MARDIANTO, S.E.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710124 199903 1 002

AGEN PERUBAHAN

MULYANTO, S.E.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19680618 199303 1 010

NO	NILAI ORGANISASI/ BUDAYA KERJA	PERUBAHAN YANG DIINGINKAN			RENCANA TINDAK		KETERANGAN
		SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	WAKTU	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mewujudkan peningkatan / optimalisasi pengelolaan arsip dinamis	Tertatanya arsip secara baik dan sistematis sesuai kaidah-kaidah kearsipan sehingga mudah ditemukan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan	Dokumen pengelolaan arsip dinamis	1 Dokumen	1. Memeriksa arsip (surat/berkas) apakah sudah siap untuk disimpan 2. Membaca isi informasi surat dan dibuatkan indeks 3. Memberkaskan arsip yang mempunyai kode dan kegiatan yang sama 4. Memberi kode klasifikasi sesuai dengan Kode Klasifikasi Surat 5. Menuliskan indeks dan kode klasifikasi sebagai nama yang dituangkan ke dalam <i>guide</i> atau <i>tab folder</i> 6. Menata arsip dalam map gantung 7. Menyimpan arsip dalam <i>filling cabinet</i>	12 bulan	-

NO	SASARAN	URAIAN KEGIATAN	PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS	
			SEBELUM	SETELAH
1	2	3	4	5
1.	Tertatanya arsip secara baik dan sistematis sesuai kaidah-kaidah kearsipan sehingga mudah ditemukan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan	1. Memeriksa arsip (surat/berkas) apakah sudah siap untuk disimpan 2. Membaca isi informasi surat dan dibuatkan indeks 3. Memberkaskan arsip yang mempunyai kode dan kegiatan yang sama 4. Memberi kode klasifikasi sesuai dengan Kode Klasifikasi Surat 5. Menuliskan indeks dan kode klasifikasi sebagai nama yang dituangkan ke dalam <i>guide</i> atau <i>tab folder</i> 6. Menata arsip dalam map gantung 7. Menyimpan arsip dalam <i>filling cabinet</i>	 	 

VI. PENUTUP

Sejalan dengan sasaran kegiatan yang ingin dicapai oleh Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset Daerah Inspektorat Kabupaten Wonogiri dalam mewujudkan peningkatan integritas dan kinerja birokrasi yang tinggi yaitu tertatanya arsip secara baik dan sistematis sesuai kaidah-kaidah kearsipan, perlu dilakukan perubahan berupa optimalisasi pengelolaan arsip dinamis.

Dengan rencana tindak Agen Perubahan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Wonogiri sehingga berdampak arsip mudah ditemukan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.

Wonogiri, 31 Desember 2025



MARDIANTO, S.E.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710124 199903 1 002

AGEN PERUBAHAN

DEWI ATTUTIANINGRUM, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740206 199903 2 008

NO	NILAI ORGANISASI/ BUDAYA KERJA	PERUBAHAN YANG DIINGINKAN			RENCANA TINDAK		KETERANGAN
		SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	WAKTU	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Profesional, Berintegritas, Transparan, Terbuka, dan Akuntabel	Meningkatkan pemanfaatan instagram dalam penyebarluasan informasi dan sosialisasi program program antikorupsi	Jumlah publikasi dan penayangan konten	4	1. Mengusulkan penyusunan SK Tim Pengelola Media Sosial 2. Memproduksi konten untuk dipublikasikan atau ditayangkan 3. Melakukan proses kendali mutu atau verifikasi berjenjang atas konten yang telah diproduksi 4. Melakukan publikasi dan mendokumentasikan <i>traffic</i> (arus) aktivitas publikasi instagram Inspektorat Kabupaten Wonogiri	12 bulan	

V. CAPAIAN RENCANA TINDAK

Sebagai tindak lanjut atas penyusunan Rencana Kerja Agen Perubahan tersebut, telah dirumuskan dan ditetapkan dalam rencana program/kegiatan/sub kegiatan dan pendanaan pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri. Di samping itu, telah ditetapkan juga Keputusan Inspektur yang mengatur adanya Tim Pengelola Media Sosial dan telah terdapat peningkatan aktivitas publikasi di instagram serta telah dilaksanakan pengendalian kegiatan oleh Agen Perubahan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan hasil perbaikan secara berkelanjutan dalam meningkatkan kinerja organisasi.

Capaian dari rencana tindak yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

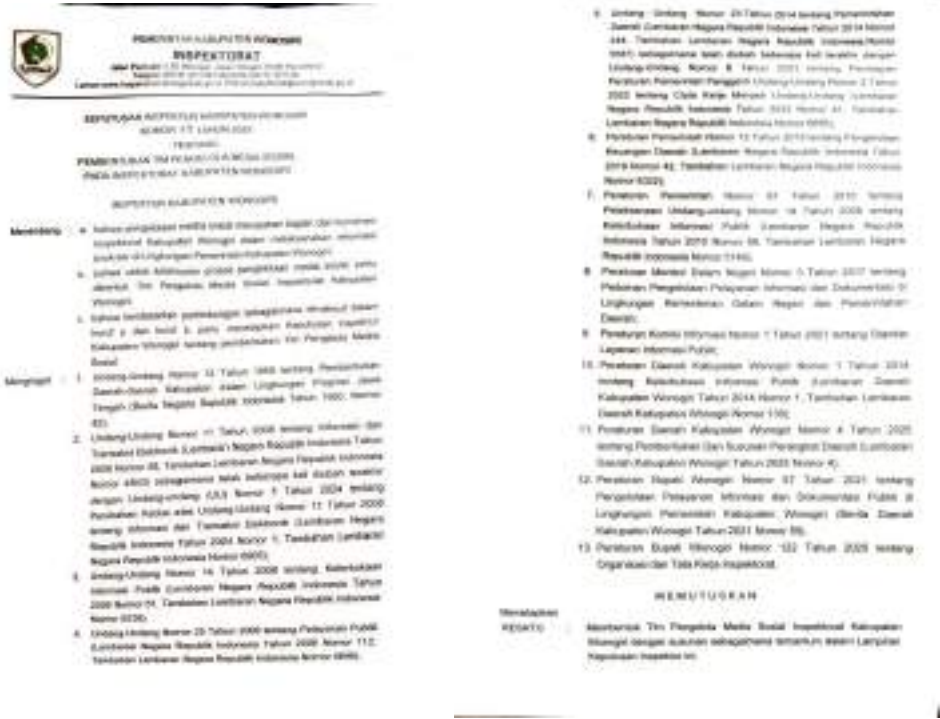
NO	SASARAN	RENCANA KEGIATAN	CAPAIAN
1	Meningkatkan pemanfaatan instagram dalam penyebaran informasi dan sosialisasi program antikorupsi	1. Mengusulkan penyusunan SK Tim Pengelola Media Sosial. 2. Memproduksi konten untuk dipublikasikan atau ditayangkan 3. Melakukan proses kendali mutu atau verifikasi berjenjang atas konten yang telah diproduksi 4. Melakukan publikasi dan mendokumentasikan traffic (arus) aktivitas publikasi instagram Inspektorat Kabupaten Wonogiri	1. Tersusunya SK Tim Pengelola Media Sosial Inspektorat Kabupaten Wonogiri melalui Keputusan Inspektur Kabupaten Wonogiri Nomor 79 Tahun 2025 Tentang Tim Pengelola Media Sosial Inspektorat Kabupaten Wonogiri 2. Terproduksinya konten untuk dipublikasikan atau ditayangkan 3. Terdapat proses kendali mutu atau verifikasi berjenjang oleh pihak yang berwenang 4. Terpublikasinya serta terdokumentasikannya peningkatan aktivitas publikasi pada Instagram Inspektorat Kabupten Wonogiri

BUKTI DUKUNG :

1. Rapat Koordinasi Awal Dengan Perwakilan Masing-Masing Bidang



2. Pengelola Instagram

Sebelum 2025	Pada Tahun 2025
Belum ada Tim Pengelola secara <i>de jure</i>	Telah ditetapkan Tim pengelola Media Sosial  PERMENKES RI TENTANG TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL DAFTAR ANGGOTA Anggota 1. Menteri Kesehatan 2. Sekretaris Jenderal 3. Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat 4. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 5. Kepala Bidang Rehabilitasi Medik 6. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat 7. Kepala Bidang Pelayanan Medik 8. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan 9. Kepala Bidang Kerja Sama 10. Kepala Bidang Hukum 11. Kepala Bidang Administrasi Umum 12. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 13. Kepala Bidang Keperawatan 14. Kepala Bidang Kefarmasian 15. Kepala Bidang Kesehatan Gigi 16. Kepala Bidang Kesehatan Anak 17. Kepala Bidang Kesehatan Ibu dan Anak 18. Kepala Bidang Kesehatan Kulit, Mata, Telinga, Hidung, Tenggorokan, dan Kepala 19. Kepala Bidang Kesehatan Jantung, Darah, dan Sistem Peredaran Darah 20. Kepala Bidang Kesehatan Sistem Pernafasan 21. Kepala Bidang Kesehatan Sistem Pencernaan 22. Kepala Bidang Kesehatan Sistem Urin 23. Kepala Bidang Kesehatan Sistem Reproduksi 24. Kepala Bidang Kesehatan Sistem Gerak 25. Kepala Bidang Kesehatan Sistem Endokrin 26. Kepala Bidang Kesehatan Sistem Imun 27. Kepala Bidang Kesehatan Sistem Saraf 28. Kepala Bidang Kesehatan Sistem Kulit, Rambut, dan Kuku 29. Kepala Bidang Kesehatan Sistem Mata 30. Kepala Bidang Kesehatan Sistem Telinga, Hidung, Tenggorokan, dan Kepala 31. Kepala Bidang Kesehatan Sistem Jantung, Darah, dan Sistem Peredaran Darah 32. Kepala Bidang Kesehatan Sistem Pernafasan 33. Kepala Bidang Kesehatan Sistem Pencernaan 34. Kepala Bidang Kesehatan Sistem Urin 35. Kepala Bidang Kesehatan Sistem Reproduksi 36. Kepala Bidang Kesehatan Sistem Gerak 37. Kepala Bidang Kesehatan Sistem Endokrin 38. Kepala Bidang Kesehatan Sistem Imun 39. Kepala Bidang Kesehatan Sistem Saraf 40. Kepala Bidang Kesehatan Sistem Kulit, Rambut, dan Kuku 41. Kepala Bidang Kesehatan Sistem Mata 42. Kepala Bidang Kesehatan Sistem Telinga, Hidung, Tenggorokan, dan Kepala 43. Kepala Bidang Kesehatan Sistem Jantung, Darah, dan Sistem Peredaran Darah 44. Kepala Bidang Kesehatan Sistem Pernafasan 45. Kepala Bidang Kesehatan Sistem Pencernaan 46. Kepala Bidang Kesehatan Sistem Urin 47. Kepala Bidang Kesehatan Sistem Reproduksi 48. Kepala Bidang Kesehatan Sistem Gerak 49. Kepala Bidang Kesehatan Sistem Endokrin 50. Kepala Bidang Kesehatan Sistem Imun 51. Kepala Bidang Kesehatan Sistem Saraf 52. Kepala Bidang Kesehatan Sistem Kulit, Rambut, dan Kuku 53. Kepala Bidang Kesehatan Sistem Mata 54. Kepala Bidang Kesehatan Sistem Telinga, Hidung, Tenggorokan, dan Kepala 55. Kepala Bidang Kesehatan Sistem Jantung, Darah, dan Sistem Peredaran Darah 56. Kepala Bidang Kesehatan Sistem Pernafasan 57. Kepala Bidang Kesehatan Sistem Pencernaan 58. Kepala Bidang Kesehatan Sistem Urin 59. Kepala Bidang Kesehatan Sistem Reproduksi 60. Kepala Bidang Kesehatan Sistem Gerak 61. Kepala Bidang Kesehatan Sistem Endokrin 62. Kepala Bidang Kesehatan Sistem Imun 63. Kepala Bidang Kesehatan Sistem Saraf 64. Kepala Bidang Kesehatan Sistem Kulit, Rambut, dan Kuku 65. Kepala Bidang Kesehatan Sistem Mata 66. Kepala Bidang Kesehatan Sistem Telinga, Hidung, Tenggorokan, dan Kepala 67. Kepala Bidang Kesehatan Sistem Jantung, Darah, dan Sistem Peredaran Darah 68. Kepala Bidang Kesehatan Sistem Pernafasan 69. Kepala Bidang Kesehatan Sistem Pencernaan 70. Kepala Bidang Kesehatan Sistem Urin 71. Kepala Bidang Kesehatan Sistem Reproduksi 72. Kepala Bidang Kesehatan Sistem Gerak 73. Kepala Bidang Kesehatan Sistem Endokrin 74. Kepala Bidang Kesehatan Sistem Imun 75. Kepala Bidang Kesehatan Sistem Saraf 76. Kepala Bidang Kesehatan Sistem Kulit, Rambut, dan Kuku 77. Kepala Bidang Kesehatan Sistem Mata 78. Kepala Bidang Kesehatan Sistem Telinga, Hidung, Tenggorokan, dan Kepala 79. Kepala Bidang Kesehatan Sistem Jantung, Darah, dan Sistem Peredaran Darah 80. Kepala Bidang Kesehatan Sistem Pernafasan 81. Kepala Bidang Kesehatan Sistem Pencernaan 82. Kepala Bidang Kesehatan Sistem Urin 83. Kepala Bidang Kesehatan Sistem Reproduksi 84. Kepala Bidang Kesehatan Sistem Gerak 85. Kepala Bidang Kesehatan Sistem Endokrin 86. Kepala Bidang Kesehatan Sistem Imun 87. Kepala Bidang Kesehatan Sistem Saraf 88. Kepala Bidang Kesehatan Sistem Kulit, Rambut, dan Kuku 89. Kepala Bidang Kesehatan Sistem Mata 90. Kepala Bidang Kesehatan Sistem Telinga, Hidung, Tenggorokan, dan Kepala 91. Kepala Bidang Kesehatan Sistem Jantung, Darah, dan Sistem Peredaran Darah 92. Kepala Bidang Kesehatan Sistem Pernafasan 93. Kepala Bidang Kesehatan Sistem Pencernaan 94. Kepala Bidang Kesehatan Sistem Urin 95. Kepala Bidang Kesehatan Sistem Reproduksi 96. Kepala Bidang Kesehatan Sistem Gerak 97. Kepala Bidang Kesehatan Sistem Endokrin 98. Kepala Bidang Kesehatan Sistem Imun 99. Kepala Bidang Kesehatan Sistem Saraf 100. Kepala Bidang Kesehatan Sistem Kulit, Rambut, dan Kuku DAFTAR REFERENSI 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Daerah 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 8. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 13. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 14. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 15. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 16. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 17. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 18. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 19. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 20. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 21. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 22. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 23. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 24. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 25. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 26. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 27. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 28. Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 29. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 30. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 31. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 32. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 33. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 34. Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 35. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 36. Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 37. Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 38. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 39. Undang-Undang Nomor 68 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 40. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 41. Undang-Undang Nomor 70 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 42. Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 43. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 44. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 45. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 46. Undang-Undang Nomor 75 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 47. Undang-Undang Nomor 76 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 48. Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 49. Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 50. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 51. Undang-Undang Nomor 80 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 52. Undang-Undang Nomor 81 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 53. Undang-Undang Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 54. Undang-Undang Nomor 83 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 55. Undang-Undang Nomor 84 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 56. Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 57. Undang-Undang Nomor 86 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 58. Undang-Undang Nomor 87 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 59. Undang-Undang Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 60. Undang-Undang Nomor 89 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 61. Undang-Undang Nomor 90 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 62. Undang-Undang Nomor 91 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 63. Undang-Undang Nomor 92 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 64. Undang-Undang Nomor 93 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 65. Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 66. Undang-Undang Nomor 95 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 67. Undang-Undang Nomor 96 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 68. Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 69. Undang-Undang Nomor 98 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 70. Undang-Undang Nomor 99 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 71. Undang-Undang Nomor 100 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

1. Mengidentifikasi kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh teknologi informasi
2. Mengetahui kemampuan teknologi informasi yang ada
3. Mengidentifikasi kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh teknologi informasi
4. Mengetahui kemampuan teknologi informasi yang ada
5. Mengetahui kemampuan teknologi informasi yang ada
6. Mengetahui kemampuan teknologi informasi yang ada

08214537 : *Daftar Urut yang Telah-diteliti Menurut Periode Waktu di
alamatnya pada Angkasan Persebaran: 2nd. 000-0 1344-0
Kalkulation-Periode*

Copyright © 2006 by John Wiley & Sons, Inc.

2

REFERENCES

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

Category	
Number of cases	1
Number of cases with a positive result	1

3. Proses Produksi Konten

Tahun 2025



Catatan :

Sampel proses produksi konten

4. Proses Kendali Mutu atau Verifikasi Berjenjang

REVIU BERJENJANG KONTEN MEDIA SOSIAL INSTAGRAM INSPEKTORAT						
TIM PRODUSEN	JUDUL KONTEN	LINK KONTEN	NARASI KONTEN	VERIFIKATOR		CATATAN
				LINI	NAMA/JABATAN	
PPUPD	TL hasil pendampingan penerapan SPM	https://drive.google.com/file/d/1oOjxBc7BF1V/Vp1D1n2DEAlicjQwirPBu/view?usp=sharing	Sinergi untuk Wonogiri yang Lebih Melayani! ☐ Bertempat di Ruang Gunung Gandul Setda Wonogiri, tim Inspektorat bersama Sekretariat SPM (Bagian Pemerintahan setda kabupaten wonogiri) menyelenggarakan kegiatan consulting yaitu pendampingan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Melalui pendampingan ini diharapkan menjadi langkah krusial untuk memastikan setiap tahapan penerapan SPM dilalui sesuai ketentuan serta setiap indikator layanan dasar mulai benar-benar terukur dan tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Target kita jelas: Capaian SPM 100% dan kualitas layanan yang terus meningkat. #kabwonogiri #wonogirisukses #inspektoratwonogiri #SPM #ReformasiBirokrasi #PPUPDWonogiri	Verifikator Pertama	Sdr. Ninda	
				Verifikator Kedua	Sdr. Hery	Masukkan data tanggal kegiatan, seperti tujuan dan sasaran kegiatan, bisa ditambahkan data SPM Award 2024 dan 2025,
				Verifikator Final	Inspektur	
PI	Profil Inspektorat	https://drive.google.com/drive/folders/1qmsl7DDVboK9B8orXnaKtD	Mengenal Profil & Struktur Inspektorat Wonogiri Kenalkan, kami adalah Inspektorat. Di sini, peran kami bukan sebagai 'polisi', melainkan	Verifikator Pertama	Sdr. Ninda	Oke
				Verifikator Kedua	Sdr. Hery	OK

		AlCk7tTp4y?usp=sharing	sebagai Mitra Strategis (Quality Assurance). Kami hadir sebagai unit pengawas internal. Dalam konsep The Three Lines of Defense, Inspektorat hadir di Lini Ketiga untuk memberikan kepastian (assurance) bahwa sistem pengawasan internal telah berjalan efektif. #inspektoratwonogiri #pembkabwonogiri #wonogiri #APIP	Verifikator Final	Inspektur	
--	--	--	---	-------------------	-----------	--

5. Proses Produksi Konten

Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
		

		
--	--	--

		
<i>Catatan :</i> Pada tahun 2023 publikasi sejumlah 13 konten	<i>Catatan :</i> Pada tahun 2024 publikasi berjumlah 7 konten	<i>Catatan :</i> Pada tahun 2025 publikasi berjumlah 23 konten

VI. PENUTUP

Demikian laporan rencana tindak agen perubahan ini disusun. Upaya yang dilakukan diharapkan mampu mendukung penguatan nilai-nilai BerAKHLAK, khususnya dalam mewujudkan pelayanan informasi yang berorientasi pada masyarakat, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi komunikasi. Optimalisasi media sosial ini juga diharapkan berkontribusi terhadap pencapaian Reformasi Birokrasi dan Keterbukaan Informasi serta aspek lainnya.

Wonogiri, 23 Desember 2025

Mengetahui,
INSPEKTUR,



MARDIANTO, S.E.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19710124 199903 1 002

AGEN PERUBAHAN

RIZA YOGA SUSANTO, S.E.

Penata Muda Tk.I (III/b)

NIP. 19970326 202012 1 005

TABEL OLAH DATA IKM TAHUN 2025

**PENGOLAHAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN
DAN PER UNSUR PELAYANAN**

UNIT PELAYANAN

ALAMAT

Tlp/Fax

: INSPEKTORAT KABUPATEN WONOGIRI

: Jalan Pemuda I no 55 Wonogiri

: (0273) 321138

NO. RES	NILAI UNSUR PELAYANAN								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1	3	3	3	4	3	3	4	3	4
2	4	4	3	4	3	4	4	3	4
3	3	4	3	4	3	3	3	2	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	3	3	4	4	3	4	4	4	4
6	4	4	3	4	4	3	4	3	4
7	4	4	3	4	3	4	4	3	4
8	3	4	3	4	3	4	4	4	4
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10	4	4	3	4	3	3	4	4	4
11	3	3	3	4	3	4	4	3	4
12	4	4	3	4	4	3	4	4	4
13	4	4	3	4	3	4	4	3	3
14	3	4	3	4	3	4	4	4	4
15	4	3	3	4	3	4	4	2	3
16	3	3	3	4	3	4	4	4	4
17	4	3	3	3	3	3	4	4	4
18	3	3	3	4	4	3	3	3	4
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4
20	4	3	4	4	4	4	4	4	4
21	3	3	3	4	3	3	4	3	4
22	3	3	3	4	3	4	3	3	4
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4
24	4	4	4	4	4	4	4	3	4
25	3	3	3	4	4	3	3	3	4
26	4	4	4	3	4	4	3	4	4
27	3	4	4	4	4	4	4	4	4
28	4	3	3	4	4	4	4	3	3
29	4	4	4	4	4	3	3	4	3
30	4	4	4	3	4	4	4	3	4
31	3	3	3	4	3	3	3	3	4
32	4	4	4	4	4	4	4	3	3
33	4	3	4	3	4	3	4	4	4
34	3	4	4	4	3	4	3	3	3
35	4	3	3	4	3	3	3	3	4
36	3	3	3	3	3	3	4	3	3
37	4	3	3	4	3	3	4	4	4
38	4	3	3	4	3	4	3	3	4
39	3	3	3	4	3	3	3	3	3
40	3	4	3	4	3	3	3	3	4
41	4	3	3	4	4	4	4	3	4
42	3	3	3	4	3	3	3	3	4
43	3	3	3	3	4	4	4	3	3
44	3	3	3	4	3	3	3	3	4
45	4	3	4	4	4	4	4	2	3
46	3	4	3	4	3	3	3	4	4
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3
48	3	4	3	3	3	4	3	3	4
49	3	3	3	4	3	3	4	3	3
50	4	4	3	4	3	4	3	2	4
51	4	3	3	3	3	3	4	3	4

52	3	3	3	4	3	3	3	3	4
53	4	3	3	3	3	4	4	3	3
54	4	3	3	4	3	3	3	3	4
55	3	3	3	4	3	4	3	3	3
56	3	3	3	3	3	3	3	2	4
57	4	3	3	3	3	3	4	3	3
58	3	4	3	4	4	4	3	3	4
59	4	3	3	4	3	4	4	2	3
60	4	3	3	4	3	3	3	3	4
61	4	3	3	4	3	4	4	3	3
62	3	3	4	4	4	3	4	3	4
63	4	3	4	4	3	4	4	3	3
64	4	4	3	4	3	3	3	3	4
65	3	3	3	4	3	3	3	3	3
66	4	3	3	3	3	4	4	3	3
67	3	3	3	4	3	3	3	3	4
68	4	4	4	4	4	3	4	3	3
69	4	3	3	3	3	4	4	3	4
70	4	3	3	4	3	3	3	2	3
71	3	3	3	3	3	3	3	3	4
72	4	4	3	4	3	4	3	3	3
73	4	3	3	3	4	3	3	3	4
74	3	3	3	3	3	3	4	3	4
75	3	3	3	4	3	3	3	3	3
76	4	4	3	4	4	4	4	2	4
77	3	3	3	4	3	3	3	3	4
78	4	3	3	3	3	4	3	2	4
79	3	3	4	4	3	3	3	3	3
80	3	4	3	4	4	3	3	3	4
ΣNilai /Unsur	283	270	259	302	266	279	284	249	294
NRR / Unsur	3,538	3,375	3,238	3,775	3,325	3,488	3,550	3,113	3,675
NRR tertbg/ unsur	0,393	0,375	0,360	0,419	0,369	0,387	0,394	0,346	0,408
								*)	**)
IKM Unit pelayanan								3,453	86,32

Keterangan :

- U1 s.d. U9 = Unsur-Unsur pelayanan
- NRR = Nilai rata-rata
- IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
- *) = Jumlah NRR IKM tertimbang
- **) = Jumlah NRR Tertimbang x 25
- NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi
- NRR tertimbang = NRR per unsur x 0,111

No.	Unsur Pelayanan	Rata-rata
U1	Persyaratan	3,538
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,375
U3	Waktu Penyelesaian	3,238
U4	Biaya/Tarif	3,775
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,325
U6	Kompetensi Pelaksana	3,488
U7	Perilaku Pelaksana	3,550
U8	Sarana dan prasarana	3,113
U9	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	3,675

IKM UNIT PELAYANAN :	86,32
-----------------------------	--------------

Mutu Pelayanan :

- | | | | |
|------------------------|------------------|------------------------|-----------------|
| A (Sangat Baik) | : 88,31 - 100,00 | C (Kurang Baik) | : 65,00 - 76,60 |
| B (Baik) | : 76,61 - 88,30 | D (Tidak Baik) | : 25,00 - 64,99 |

**PENGOLAHAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN
DAN PER UNSUR PELAYANAN**

UNIT PELAYANAN

ALAMAT

Tlp/Fax:

: INSPEKTORAT KABUPATEN WONOGIRI

: Jl. Pemuda 1 No 55 Wonogiri

: (0273) 321138

Tempat Survei : Inspektorat Kabupaten Wonogiri

Waktu Survei : Mei s/d Oktober 2024

Responden : 80

IKM UNIT PELAYANAN : 86,32

Mutu Pelayanan : Baik

A (Sangat Baik) : 88,31 - 100,00

B (Baik) : 76,61 - 88,30

C (Kurang Baik) : 65,00 - 76,60

D (Tidak Baik) : 25,00 - 64,99

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA	
U1	Persyaratan	3,538	Sangat Baik
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,375	Baik
U3	Waktu Penyelesaian	3,238	Baik
U4	Biaya/Tarif	3,775	Sangat Baik
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,325	Baik
U6	Kompetensi Pelaksana	3,488	Baik
U7	Penilaku Pelaksana	3,550	Sangat Baik
U8	Sarana dan prasarana	3,113	Baik
U9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3,675	Sangat Baik

**TABEL REALISASI
KINERJA DAN
PENGUNAAN ANGGARAN
S.D AKHIR TAHUN 2025**

**REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN APBD KAB.WONOGIRI
PER DESEMBER T A 2025**

INSPEKTORAT KABUPATEN WONOGIRI

Kode Rekening	Program,Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu Awal	Pagu Setelah Perubahan	Indikator Kinerja (Output)	Fisik						Keuangan						Permasalahan	Tindak lanjut	
					Target setelah ini	Target s.d bulan ini		Realisasi s.d Bulan ini		Deviasi	Target s.d bulan ini (Rp)	%	Realisasi s.d bulan ini (Rp)	%	Deviasi				
						Jumlah	%	Jumlah	%						Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9=8/7*100	10=9-7	11	12=11/10*100	13	14=13/12*100	15=13-11	16=14-12	17	18		
8.01.01	PROGRAM PEMBIYARAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Rp 7.818.027.113	Rp 8.284.534.412	Persentase terbit laporan kinerja administratif pemerintah daerah	100 %	100,00 %	100,00	98,48 %	99,48	-0,52	Rp 8.284.534.412	100,00	Rp 8.785.112.884	91,50	Rp 1.498.421.688	-18,18			
8.01.01.2.01	Pembiayaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 4.800.000	Rp 2.455.800	Persentase penyusunan administratif perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100 %	100,00 %	100,00	100,00 %	100,00	0,00	Rp 2.455.800	100,00	Rp 2.280.700	93,00	Rp 185.200	-4,30			
8.01.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 2.000.000	Rp 1.055.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	3	Dokumen	100,00	3	Dokumen	100,00	0,00	Rp 1.055.000	100,00	Rp 950.000	90,00	Rp 105.000	-9,30
8.01.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 2.000.000	Rp 1.400.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	1	Laporan	100,00	1	Laporan	100,00	0,00	Rp 1.400.000	100,00	Rp 1.340.750	95,81	Rp 59.250	-3,58
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 8.970.473.758	Rp 7.494.023.735	Persentase administratif keuangan daerah yang disusun	100 %	100,00 %	100,00	99,85 %	99,85	-0,15	Rp 7.494.023.735	100,00	Rp 8.089.089.940	91,37	Rp 1.395.363.810	-18,60			
8.01.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 8.308.473.758	Rp 7.482.023.735	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	482	Orang / Bulan	482	Orang / Bulan	100,00	471	Orang / Bulan	98,73	-4,27	Rp 7.482.023.735	100,00	Rp 8.086.109.940	91,37	Rp 1.395.510.810	-18,60
8.01.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1	Laporan	100,00	1	Laporan	100,00	0,00	Rp 1.000.000	100,00	Rp 975.000	97,50	Rp 25.000	-2,50
8.01.01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	13	Laporan	13	Laporan	100,00	13	Laporan	100,00	0,00	Rp 1.000.000	100,00	Rp 975.000	97,50	Rp 25.000	-2,50
8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 888.940	Rp 888.940	Persentase administratif barang milik pada Perangkat Daerah yang disusun	100 %	100,00 %	100,00	100,00 %	100,00	0,00	Rp 888.940	100,00	Rp 879.160	97,90	Rp 9.980	-1,10			
8.01.01.2.03.002	Pengelolaan Barang Milik Daerah SKPD	Rp 888.940	Rp 888.940	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah SKPD	5	Dokumen	5	Dokumen	100,00	5	Dokumen	100,00	0,00	Rp 888.940	100,00	Rp 875.920	97,50	Rp 30.920	-3,38
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 171.998.538	Rp 184.348.138	Persentase terbit administratif kepegawaian	100 %	100,00 %	100,00	100,00 %	100,00	0,00	Rp 184.348.138	100,00	Rp 145.482.718	79,00	Rp 38.865.420	-21,00			
8.01.01.2.05.001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Dinas Pegawai	Rp 889.880	Rp 889.880	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Dinas Pegawai	8	Unit	8	Unit	100,00	8	Unit	100,00	0,00	Rp 889.880	100,00	Rp 889.500	99,98	Rp 380	-0,04
8.01.01.2.05.003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24	Dokumen	24	Dokumen	100,00	24	Dokumen	100,00	0,00	Rp 2.000.000	100,00	Rp 1.981.000	99,05	Rp 19.000	-0,95
8.01.01.2.05.004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Rp 1.999.870	Rp 1.999.870	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12	Dokumen	12	Dokumen	100,00	12	Dokumen	100,00	0,00	Rp 1.999.870	100,00	Rp 1.775.300	88,77	Rp 224.570	-11,23
8.01.01.2.05.006	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp 889.880	Rp 889.880	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	Dokumen	4	Dokumen	100,00	4	Dokumen	100,00	0,00	Rp 889.880	100,00	Rp 891.800	99,20	Rp 1.920	-0,20
8.01.01.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 171.200.000	Rp 148.348.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60	Orang	60	Orang	100,00	60	Orang	100,00	0,00	Rp 148.348.000	100,00	Rp 138.438.000	93,30	Rp 9.910.000	-6,70
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 222.607.480	Rp 195.313.168	Persentase terbit administratif umum perangkat daerah	100 %	100,00 %	100,00	100,00 %	100,00	0,00	Rp 195.313.168	100,00	Rp 188.785.548	91,00	Rp 6.527.620	-3,30			
8.01.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 1.997.000	Rp 1.997.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Didisokan	1	Paket	1	Paket	100,00	1	Paket	100,00	0,00	Rp 1.997.000	100,00	Rp 1.990.000	99,65	Rp 7.000	-0,35
8.01.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 34.896.110	Rp 34.896.110	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Didisokan	1	Paket	1	Paket	100,00	1	Paket	100,00	0,00	Rp 34.896.110	100,00	Rp 46.978.880	90,00	Rp 12.082.770	-34,30
8.01.01.2.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 1.795.200	Rp 1.795.200	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Didisokan	1	Paket	1	Paket	100,00	1	Paket	100,00	0,00	Rp 1.795.200	100,00	Rp 850.000	47,35	Rp 945.200	-52,65

Kode Rekening	Program/Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu Awal	Pagu Setelah Perubahan	Indikator Kinerja (Output)	Fisik						Keuangan						Pemenuhan	Tindak lanjut
					Target tahunan	Target s.d bulan ini		Realisasi s.d Bulan ini		Deviasi	Target s.d bulan ini (Rp)	%	Realisasi s.d bulan ini (Rp)	%	Deviasi			
						Jumlah	%	Jumlah	%						Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 39.498.800	Rp 8.699.800	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100,00	1 Paket	100,00	0,00	Rp 8.699.800	100,00	Rp 8.111.000	94,32	Rp 588.800	-6,59		
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 10.099.980	Rp 10.099.980	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100,00	1 Paket	100,00	0,00	Rp 10.099.980	100,00	Rp 11.807.900	117,00	Rp 1.707.920	16,91		
6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Baku dan Perakur Perundang-undangan	Rp 2.400.000	Rp 2.400.000	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Perakur Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00	12 Dokumen	100,00	0,00	Rp 2.400.000	100,00	Rp 2.396.300	99,84	Rp 3.700	-0,16		
6.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp 8.040.000	Rp 8.040.000	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	20 Laporan	20 Laporan	100,00	20 Laporan	100,00	0,00	Rp 8.040.000	100,00	Rp 7.800.000	97,01	Rp 240.000	-2,99		
6.01.01.2.06.0009	Pengembangan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 37.675.000	Rp 37.675.000	Jumlah Laporan Pengembangan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	15 Laporan	100,00	15 Laporan	100,00	0,00	Rp 37.675.000	100,00	Rp 27.342.286	72,58	Rp 10.332.714	-27,20		
6.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Asep Dinamis pada SKPD	Rp 889.100	Rp 889.100	Jumlah Dokumen Penatausahaan Asep Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	2 Dokumen	100,00	0,00	Rp 889.100	100,00	Rp 716.000	80,53	Rp 173.100	-19,47		
6.01.01.2.06.0011	Dukung Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp 889.880	Rp 889.880	Jumlah Dokumen Dukung Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	100,00	0,00	Rp 889.880	100,00	Rp 984.900	110,68	Rp 95.020	10,68		
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 116.685.700	Rp 116.685.700	Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah	100 %	100,00 %	100,00	100,00 %	100,00	0,00	Rp 116.685.700	100,00	Rp 113.540.000	97,31	Rp 3.145.700	-2,70		
6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Rp 60.820.000	Rp 113.525.000	Jumlah Unit Perlatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	12 Unit	100,00	12 Unit	100,00	0,00	Rp 113.525.000	100,00	Rp 107.580.000	94,81	Rp 5.945.000	-5,24		
6.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 5.865.700	Rp 5.865.700	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	100,00	3 Unit	100,00	0,00	Rp 5.865.700	100,00	Rp 5.460.000	93,08	Rp 405.700	-6,92		
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 291.433.880	Rp 291.131.900	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100,00 %	100,00	100,00 %	100,00	0,00	Rp 291.131.900	100,00	Rp 289.285.044	99,38	Rp 2.048.856	-0,70		
6.01.01.2.08.0009	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 4.000.000	Rp 2.300.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	100,00	12 Laporan	100,00	0,00	Rp 2.300.000	100,00	Rp 1.304.000	56,70	Rp 996.000	-23,30		
6.01.01.2.08.0010	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 47.300.000	Rp 47.300.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100,00	12 Laporan	100,00	0,00	Rp 47.300.000	100,00	Rp 36.708.701	77,61	Rp 10.591.299	-22,39		
6.01.01.2.08.0013	Penyediaan Jasa Perakutan dan Penggandaan Kantor	Rp 9.000.000	Rp 9.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perakutan dan Penggandaan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100,00	12 Laporan	100,00	0,00	Rp 9.000.000	100,00	Rp 8.722.143	96,91	Rp 277.857	-3,09		
6.01.01.2.08.0014	Penyediaan Jasa Pelayanan Urutan Kantor	Rp 102.820.900	Rp 102.820.900	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Urutan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100,00	12 Laporan	100,00	0,00	Rp 102.820.900	100,00	Rp 101.862.000	98,98	Rp 958.900	-0,93		
6.01.01.2.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 116.576.887	Rp 116.576.887	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100 %	100,00 %	100,00	100,00 %	100,00	0,00	Rp 116.576.887	100,00	Rp 116.188.812	99,71	Rp 388.075	-0,33		
6.01.01.2.09.0001	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perlindungan Karyawan Pemeringin Dinas atau Karyawan Dinas Jabatan	Rp 16.694.270	Rp 16.694.270	Jumlah Karyawan Pemeringin Dinas atau Karyawan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajalnya	2 Unit	2 Unit	100,00	2 Unit	100,00	0,00	Rp 16.694.270	100,00	Rp 16.686.040	99,98	Rp 8.230	-0,05		
6.01.01.2.09.0002	Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perlindungan Karyawan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 60.186.617	Rp 60.186.617	Jumlah Karyawan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Pemeringannya	11 Unit	11 Unit	100,00	11 Unit	100,00	11,00	Rp 60.186.617	100,00	Rp 54.583.708	90,77	Rp 5.602.909	-9,23		
6.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit	100,00	3 Unit	100,00	0,00	Rp 2.000.000	100,00	Rp 1.520.000	76,00	Rp 480.000	-24,00		
6.01.01.2.09.0008	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Rp 4.800.000	Rp 4.800.000	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	100,00	10 Unit	100,00	0,00	Rp 4.800.000	100,00	Rp 4.340.000	90,42	Rp 460.000	-9,58		
6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 6.704.000	Rp 6.704.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	1 Unit	1 Unit	100,00	1 Unit	100,00	0,00	Rp 6.704.000	100,00	Rp 6.417.500	95,73	Rp 286.500	-4,27		
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Rp 425.800.000	Rp 282.110.358	Persentase realisasi pengawasan sesuai RPPT	100 %	111,62 %	111,62	113,14 %	113,14	13,12	Rp 282.110.358	100,00	Rp 217.021.186	76,90	Rp 65.089.172	-17,48		
6.01.02.2.01	Pengembangan Pengawasan Internal	Rp 248.900.000	Rp 128.110.858	Jumlah Laporan Pengembangan Pengawasan Internal	135 Laporan	135 Laporan	100,00	135 Laporan	100,00	0,00	Rp 128.110.858	100,00	Rp 113.277.757	88,42	Rp 14.833.101	-11,72		

Kode Rekening	Program,Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu Awal	Pagu Setelah Perubahan	Indikator Kinerja (Output)	Fisik						Keuangan						Permasalahan	Tindak lanjut
					Target setahun	Target s.d bulan ini		Realisasi s.d Bulan ini		Deviasi	Target s.d bulan ini(Rp)	%	Realisasi s.d bulan ini(Rp)	%	Deviasi			
						Jumlah	%	Jumlah	%						Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp 36.000.000	Rp 16.536.200	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	8 Laporan	8	100,00	8	100,00	0,00	Rp 16.536.200	100,00	Rp 16.536.200	100,00	Rp 0,00	0,00		
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp 26.000.000	Rp 7.396.800	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	5 Laporan	5	100,00	5	100,00	0,00	Rp 7.396.800	100,00	Rp 7.396.800	100,00	Rp 0,00	0,00		
6.01.02.2.01.0003	Revisi Laporan Kinerja	Rp 15.000.000	Rp 8.963.200	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja	53 Laporan	53	100,00	53	100,00	0,00	Rp 8.963.200	100,00	Rp 8.963.200	100,00	Rp 0,00	0,00		
6.01.02.2.01.0004	Revisi Laporan Keuangan	Rp 6.000.000	Rp 6.258.800	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan	1 Laporan	1	100,00	1	100,00	0,00	Rp 6.258.800	100,00	Rp 6.258.800	100,00	Rp 0,00	0,00		
6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	Rp 112.000.000	Rp 49.798.400	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	30 Laporan	30	100,00	30	100,00	0,00	Rp 49.798.400	100,00	Rp 49.798.400	100,00	Rp 0,00	0,00		
6.01.02.2.01.0006	Kepatuhan Pengawasan Internal	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Jumlah Kecepatan Pengawasan Internal yang Tertentu	1 Kecepatan	1	100,00	1	100,00	0,00	Rp 1.000.000	100,00	Rp 1.000.000	100,00	Rp 0,00	0,00		
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	Rp 36.000.000	Rp 36.998.400	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	37 Dokumen	37	100,00	37	100,00	0,00	Rp 36.998.400	100,00	Rp 36.998.400	100,00	Rp 0,00	0,00		
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Rp 107.880.000	Rp 104.562.200	Jumlah laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	181 Laporan	127	100,00	127	100,00	4,85	Rp 104.562.200	100,00	Rp 104.562.200	100,00	Rp 0,00	0,00		
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelidikan keuangan Negara/daerah	Rp 1.800.000	Rp 1.150.000	Jumlah Laporan Penyelidikan keuangan Negara/daerah yang Ditangani	2 Laporan	2	100,00	2	100,00	0,00	Rp 1.150.000	100,00	Rp 1.150.000	100,00	Rp 0,00	0,00		
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Rp 106.080.000	Rp 103.412.200	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	125 Laporan	125	100,00	125	100,00	4,00	Rp 103.412.200	100,00	Rp 103.412.200	100,00	Rp 0,00	0,00		
6.01.02	PROSEDUR PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Rp 197.458.800	Rp 197.458.800	Persentase Realisasi Reformasi Birokrasi/Kepolisian/Pengawasan	100 %	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	Rp 197.458.800	100,00	Rp 197.458.800	100,00	Rp 0,00	0,00		
6.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Rp 13.308.000	Rp 13.308.000	Jumlah laporan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	12 Laporan	12	100,00	12	100,00	0,00	Rp 13.308.000	100,00	Rp 13.308.000	100,00	Rp 0,00	0,00		
6.01.02.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Rp 2.750.000	Rp 2.750.000	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	2	100,00	2	100,00	0,00	Rp 2.750.000	100,00	Rp 2.750.000	100,00	Rp 0,00	0,00		
6.01.02.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Rp 10.558.000	Rp 10.558.000	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	10 Rekomendasi	10	100,00	10	100,00	0,00	Rp 10.558.000	100,00	Rp 10.558.000	100,00	Rp 0,00	0,00		
6.01.02.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Rp 118.750.000	Rp 118.750.000	Jumlah laporan pendampingan & Asistensi	9 Laporan	9	100,00	9	100,00	0,00	Rp 118.750.000	100,00	Rp 118.750.000	100,00	Rp 0,00	0,00		
6.01.02.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Organisasi Pemerintahan Daerah	Rp 25.036.000	Rp 25.036.000	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Organisasi Pemerintahan Daerah	53 Perangkat Daerah	53	100,00	53	100,00	0,00	Rp 25.036.000	100,00	Rp 25.036.000	100,00	Rp 0,00	0,00		
6.01.02.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Rp 3.585.000	Rp 3.585.000	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	53 Perangkat Daerah	53	100,00	53	100,00	0,00	Rp 3.585.000	100,00	Rp 3.585.000	100,00	Rp 0,00	0,00		
6.01.02.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pengawasan dan Pembinaan Korpri	Rp 298.074.770	Rp 194.021.200	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pengawasan dan Pembinaan Korpri	5 Kegiatan	5	100,00	5	100,00	0,00	Rp 194.021.200	100,00	Rp 194.021.200	100,00	Rp 0,00	0,00		

Kode Rekening	Program,Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu Awal	Pagu Setelah Perubahan	Indikator Kinerja (Output)	Fisik						Kuangan						Pemesalahan	Tindak lanjut	
					Target setahun	Target s.d bulan ini		Realisasi s.d Bulan ini		Deviasi	Target s.d bulan ini(Rp)	%	Realisasi s.d bulan ini(Rp)	%	Deviasi				
						Jumlah	%	Jumlah	%						Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
5 51.03.2.02.904	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pengisian Integritas	Rp 3.000.000	Rp 1.543.200	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pengisian Integritas	53	Perangkat Daerah	55	Perangkat Daerah	100,08	53	Perangkat Daerah	100,30	0,00	Rp 1.543.200	100,30	Rp 1.201.000	77,83	Rp 342.200	-22,17
Total		Rp 8.579.899.938	Rp 8.744.904.562						100,3					Rp 7.193.495.664					



Wonogiri, 27 Januari 2025.
 Mardianto,
 Inspektur
 MARDANTO, S.E.
 Perdana Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19710124 199603 1 002

FOTO KEGIATAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2025

FOTO KEGIATAN INSPEKTORAT KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2025

1. Rakor Evaluasi Kegiatan dan Rencana Kerja Unit Saber Pungli



RAKOR EVALUASI KEGIATAN DAN RENCANA KERJA UNIT SABER PUNGLI

14-24 April 2025

2. Pemantauan Pelaksanaan SPMB



PEMANTAUAN PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) T.A. 2025/2026 DI KABUPATEN WONOGIRI

10 Juni 2025

3. Sosialisasi Pelaksanaan SPI Tahun 2025



4. Penandatanganan IAC



5. Gelar Pengawasan Daerah Tahun 2025



6. Rakor Pengawasan Tata Pemerintahan Desa Se-Kabupaten Wonogiri Tahun 2025



7. Pendampingan Penerapan SPM



8. Memperingati Hari Anti Korupsi



9. Rakor MCSP Tahun 2025

